



BUKU II
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Pendidikan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	1	1
1	1	20		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Beasiswa dan Bosda	Persentase SMA/SMK/PKLK yang diberi bantuan Penerima Beasiswa			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	1	1
1	1	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Pememnuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko dan Materai	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	1	1
1	1	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulan)	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	1	1
1	1	1	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	1	1	1
1	1	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan keuangan Dinas	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	1	1
1	1	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayar	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	1	1
1	1	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	1	1
1	1	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	1	1
1	1	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Media Masa yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	1	1
1	1	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyediaan makanan dan minuman	persentase pemenuhan kebutuhan makan minum rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah terpenuhinya makan dan minum setiap bulan	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	1	1
1	1	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	1	1
1	1	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	1	1
1	1	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	1	1
1	1	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perengkapan Kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	1	1
1	1	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	1	1
1	1	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Meubiler yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	26	3	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	2	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	1	1	1
1	1	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	1	1
1	1	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	1	1
1	1	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Jenis Rehabilitasi Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	3	1	1	1
1	1	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	1	1
1	1	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas harian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menerima Pakain Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	1	1
1	1	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas harian	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	4	1	1	1
1	1	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas harian	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menerima Pakain Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	4	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas harian	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menerima Pakain Hari-hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	4	1	1	1
1	1	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan kualitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	1	1
1	1	5	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	meningkatnya kinerja di bidang administrasi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	1	1
1	1	5	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	meningkatnya kinerja di bidang administrasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	4	1	1	1
1	1	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	1	1
1	1	6	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Pengolahan Data dan Aset Pendidikan	Tersedianya data dan laporan aset yang akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	1	1	1
1	1	6	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Pengolahan Data dan Aset Pendidikan	Tersedianya data dan laporan aset yang akuntabel	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	2	1	1	1
1	1	6	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	6	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	1	1
1	1	6	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	1	1
1	1	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Persentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang bersekolah			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	1	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penyelenggaraan PLA		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta didik Pendidikan Khusus yang dibiayai	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	44	3	2	1	1	
1	1	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan PKLK	Jumlah jenjang pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	51	3	2	1	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Unit Asrama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Unit Asrama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	2	1	1	
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	2	1	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Jenis Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Kantin Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras €	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah unit Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah unit Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	36	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	37	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah unit Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Jumlah unit Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	40	3	2	1	1
1	1	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	Jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Unit Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	22	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Asrama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	24	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Kantin Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	26	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	27	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	28	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	30	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	32	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras €	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	34	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	41	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	42	3	2	1	1
1	1	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan PKLK	jumlah sarana dan prasarana jenjang pendidikan PKLK	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	43	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Peserta Didik PKLK	jumlah peserta didik PKLK	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	46	3	2	1	1
1	1	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Peserta Didik PKLK	jumlah peserta didik PKLK	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Event Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	48	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan PKLK	jumlah program dan kegiatan PKLK	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	47	3	2	1	1
1	1	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pembinaan SMA	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA Persentase Pencapaian SPM SMA Kurikulum Muatan Lokal			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	jumlah satuan pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Atas yang mendapat pembiayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45	1	2	1	1
1	1	17	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA	jumlah satuan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	52	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Unit Asrama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Unit Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Unit Pembangunan Kantin Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Ruang Pengadaan Meubiler Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	36	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Unit Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	37	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Jenis Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana Mobiltas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	40	1	2	1	1
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Unit Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	41	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMA	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Unit Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi Sedang/Berat Ruang	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Ruang Asrama yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Jenis Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Kantin Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	umlah Jenis Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Jenis Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42	1	2	1	1
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utulitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMA	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penja Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44	1	2	1	1
1	1	17	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMA	jumlah peserta didik SMA	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMA	jumlah peserta didik SMA	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Event Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49	1	2	1	1
1	1	17	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA	jumlah program dan kegiatan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	48	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pembinaan SMA	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA Persentase Pencapaian SPM SMA Kurikulum Muatan Lokal			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	1	1
1	1	17	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	JUmlah kurikulum pendidikan SMA	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	1	1
1	1	17	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	JUmlah kurikulum pendidikan SMA	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	1	1
1	1	17	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	JUmlah kurikulum pendidikan SMA	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	1	1
1	1	17	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	JUmlah kurikulum pendidikan SMA	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	3	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pembinaan SMK	APM SMK APK SMK Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Persentase tamatan SMK yang bekerja Tingkat kelulusan SMK Reengenering SMK Persentase Pencapaian SPM SMK			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	1	1
1	1	18	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	Jumlah satuan pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	37	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK	jumlah satuan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Unit Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	45	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Seolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna /Aula	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Unit Asrama Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Unit Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Unit Pembangunan Kantin Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Unit Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	14	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Ruang Pengadaan Meubiler Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	28	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Unit Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	30	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Jumlah Unit Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	2	2	1	1
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Jenis Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	38	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	jumlah Sarpras Pendidikan SMK	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Jenis Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang direhabilitasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Jenis Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Kantin Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Jenis Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Jenis Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34	2	2	1	1
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utulitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMK	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penja Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	36	2	2	1	1
1	1	18	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK	jumlah peserta didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK	jumlah peserta didik	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Jenis Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41	2	2	1	1
1	1	18	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan SMK	jumlah program dan kegiatan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	40	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pembinaan SMK	APM SMK APK SMK Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Persentase tamatan SMK yang berkerja Tingkat kelulusan SMK Reengenering SMK Persentase Pencapaian SPM SMK			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	3	1	1
1	1	18	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK	Jumlah kurikulum pendidikan SMK	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	1	1
1	1	18	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK	Jumlah kurikulum pendidikan SMK	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	3	1	1
1	1	18	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK	Jumlah kurikulum pendidikan SMK	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	3	1	1
1	1	18	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK	Jumlah kurikulum pendidikan SMK	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	3	1	1
1	1	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang bersekolah	Persentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang bersekolah			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	3	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	jumlah kurikulum PKLK	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	3	1	1
1	1	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	jumlah kurikulum PKLK	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	3	1	1
1	1	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	jumlah kurikulum PKLK	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	2	3	1	1
1	1	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	jumlah kurikulum PKLK	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	3	1	1
1	1	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan TIK Kerjasama Antar Lembaga Peningkatan pelayanan pendidikan seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Dsiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	1	1
1	1	19	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi di Bidang Pendidikan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	4	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan TIK Kerjasama Antar Lembaga Peningkatan pelayanan pendidikan seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	1	1
1	1	19	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	jumlah program strategis	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	1	1	1
1	1	19	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pendidikan Kab/Kota	jumlah program startegis bidang pendidikan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	1	1	1
1	1	19	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pendidikan Kab/Kota	jumlah program startegis bidang pendidikan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	1	1
1	1	19	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pendidikan Kab/Kota	jumlah program startegis bidang pendidikan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	1	1	1
1	1	19	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pendidikan Kab/Kota	jumlah program startegis bidang pendidikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan TIK Kerjasama Antar Lembaga Peningkatan pelayanan pendidikan seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	1	1
1	1	19	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan PPDB Online	jumlah satuan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	52	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	19	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penyelenggaraan UKS	jumlah satuan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	52	1	2	1	1
1	1	19	29	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pendidikan Keluarga	jumlah satuan pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	52	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan TIK Kerjasama Antar Lembaga Peningkatan pelayanan pendidikan seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	1	1
1	1	19	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Karya Tulis Ilmiah Siswa Jenjang Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	37	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	19	25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pelatihan Kompetensi TIK Pendidikan		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Jenis Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41	2	2	1	1
1	1	19	25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pelatihan Kompetensi TIK Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	1	19	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengelolaan Teknologi Pembelajaran		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	43	2	2	1	1	
1	1	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Guru yang bersertifikat			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	1	1
1	1	16	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMA		Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dipetakan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	1	1
1	1	16	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMA		Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang ditata pendistribusiannya	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	16	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMK	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMK	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dipetakan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	1	1
1	1	16	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMK	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMK	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang ditata pendistribusiannya	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	1	1
1	1	16	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK PKLK	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PKLK	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dipetakan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	1	1
1	1	16	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK PKLK	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PKLK	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang ditata pendistribusiannya	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	1	1
1	1	16	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi	program dan kegiatan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang ditata pendistribusiannya	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	1	1
1	1	16	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pembayaran PTT PTK Non PNS	Jumlah PTT PTK Non PNS	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dipetakan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap murid	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Murid	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang bersertifikat			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	1	1
1	1	16	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMA	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50	1	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	16	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMA	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapat Pengembangan Karir Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51	1	2	1	1
1	1	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang bersertifikat			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	16	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMK	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMK	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42	2	2	1	1
1	1	16	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK SMK	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMK	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Jenis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Persentase tamatan SMK yang bekerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43	2	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		1	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang bersertifikat			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	2	1	1	
1		1	16	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK PKLK	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PKLK	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	49	3	2	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	16	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Peningkatan Kualitas PTK PKLK	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan PKLK	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mendapat Pengembangan Karir Pada Satuan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	50	3	2	1	1
1	1	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pembinaan SMA	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA Persentase Pencapaian SPM SMA Kurikulum Muatan Lokal			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	5	1	1
1	1	17	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA	jumlah satuan pendidikan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang layak	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	5	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	17	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA	jumlah satuan pendidikan	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	5	1	1
1	1	18		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Pembinaan SMK	APM SMK APK SMK Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Persentase tamatan SMK yang berkerja Tingkat kelulusan SMK Reengenering SMK Persentase Pencapaian SPM SMK			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	1	1
1	1	18	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK	jumlah satuan pendidikan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang layak	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	18	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK	jumlah satuan pendidikan	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APM SMA APK SMA Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Tingkat Kelulusan SMA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	5	1	1
1	1	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan TIK Kerjasama Antar Lembaga Peningkatan pelayanan pendidikan seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan			Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	1	1
1	1	19	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengelolaan Jejaring WEB BTIKP	jumlah jaringan dan wabsite	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulan)	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	1	1
1	1	19	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Pengelolaan Jejaring WEB BTIKP	jumlah jaringan dan wabsite	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	1	1
1	1	19	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	terlaksananya tugas dan fungsi BTIKP	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	1	1
1	1	19	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	terlaksananya tugas dan fungsi BTIKP	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	1	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	1	19	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	terlaksananya tugas dan fungsi BTIKP	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	13	3	1	1	1	
1	1	19	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	terlaksananya tugas dan fungsi BTIKP	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	1	1	1	
1	1	19	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	terlaksananya tugas dan fungsi BTIKP	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	1	1	
1	1	20		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Beasiswa dan Bosda	Persentase SMA/SMK/PKLK yang diberi bantuan Penerima Beasiswa			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	1	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	1	20	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Kegiatan BOS APBD	jumlah peserta didik SMA/SMK/PKLK	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Atas yang mendapat pembiayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah Persentase tamatan SMK yang bekerja Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kelulusan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45	1	2	1	1

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Kesehatan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dili (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	2	1	
1	2	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dili (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dil (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	2	1
1	2	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dil (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	2	1
1	2	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dil (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK (Set)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK (Set)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	2	1
1	2	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	2	1
1	2	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan () Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	2	1
1		2	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang)	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan () Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	2	1
1		2	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan () Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	2	1	
1	2	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	2	1
1	2	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	2	1
1		2	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	2	1
1		2	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dll (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	2	30	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	-	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dil (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	2	1
1	2	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar per tahun Periode pembayaran rekening (bulan) Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah jenis ATK (set) Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (buah) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks) Jumlah peserta rapat/tamu/dil (orang) Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	3	1	2	1
1	2	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase PNS yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	2	1	
1	2	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Nilai Asset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) sesuai ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	2	1
1	2	6	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Penataan Aset di Lingkungan Diskes Provinsi Jambi	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Nilai Asset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) sesuai ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	2	1	2	1
1	2	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien RSU dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang dibutuhkan pasien RSU Persentase ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien RS) dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang dibutuhkan pasien RSJ			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase penggunaan obat sesuai FORMAS (Formularium Nasional) di Instalasi Farmasi Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat sesuai FORNAS (Formularium Nasional) di Instalasi Farmasi Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO)	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase penggunaan obat sesuai FORNAS (Formularium Nasional) di Instalasi Farmasi Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	1	2	2	1

[illegible]

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	16	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penerapan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	jumlah puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standar	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	16	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	peningkatan pelayanan kesehatan primer	Jumlah kecamatan yang mempunyai puskesmas terakreditasi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	jumlah puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standar Jumlah kecamatan yang mempunyai puskesmas terakreditasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	16	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	peningkatan pelayanan kesehatan tradisional	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupunktur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2		16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase kab/kota yang dilayani pelayanan jiwa			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	2	1
1	2		16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase kab/kota yang dilayani pelayanan jiwa			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	16	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK)	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK)	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll)	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	2	2	1
1	2		5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	5	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengadaaan pakalan dinas beserta perlengkapannya Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan kursus/pelatihan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	4	1	2	1		
1	2	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang bermutu, aman dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi			Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Rajikan (UJR), dan makanan (sarana makanan jajanan anak sekolah dan industri ru	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan alkes dan PKRT yang terjamin keamanana, mutu dan memenuhi syarat Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang bermutu, aman dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	4	2	1		
1	2	17	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Peningkatan Pengawasan dan Pemberdayaan konsumen/masyarakat terhadap obat, keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana UKOT, U MOT, UJG dan UJR, dan makanan (sarana makanan jajanan anak sekolah dan industri rumah tangga pangan)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana UKOT, U MOT, UJG dan UJR, dan makanan (sarana makanan jajanan anak sekolah dan industri rumah tangga pangan)	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Rajikan (UJR), dan makanan (sarana makanan jajanan anak sekolah dan industri ru	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan alkes dan PKRT yang terjamin keamanana, mutu dan memenuhi syarat Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang bermutu, aman dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	4	2	1	
1	2	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan			Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan di Provinsi Jambi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	5	2		1	
1	2	19	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Menggalang komitmen sektoral dalam Advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan (Pengembangan UKBM , jejaringan dengan Lintas Sektor, Kemitraan dengan dunia usaha dan organisasi)	Jumlah kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan di Provinsi Jambi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan di Provinsi Jambi	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan di Provinsi Jambi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	5	2	1	
1	2	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	5	2		1	
1	2	19	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Mengembangkan Strategi Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Promosi Kesehatan pada Fasyankes dan Masyarakat)	Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	5	2	1	

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	20		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Balita Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	20	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tabalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	20	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penanggungan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi, Gangguan Akibat kekurangan Iodium (GAKI), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Iodium kurang vitamin A	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKM Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	20	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	20	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penguatan Surveilans Gizi	Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	21		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi				Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	21	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	penyehatan air dan sanitasi dasar	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJM/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	21	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	pengamanan limbah dan radiasi	Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJM/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	21	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyehatan Udara Tanah Pangan dan Kawasan	Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	21	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyehatan Pangan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKM Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	21	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kesehatan Kerja	presentase kab/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	presentase kab/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	21	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kesehatan Olahraga	presentase kab/kota melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	presentase kab/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar presentase kab/kota melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	22		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan pencegahan penyakit kusta dan pramubisia	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	pengendalian dan pencegahan penyakit TB	Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	20	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan Pencegahan penyakit HIV	Persentase kasus HIV yang diobati	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	21	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan pencegahan Penyakit ISPA dan Pnevmonia	Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit DBD	Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Malaria	Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (PAK) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Filaria dan Kecacingan	Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	22	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan Pencegahan penyakit Zoonotik	Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	31	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pencegahan dan penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	34	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pembinaan dan pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	35	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hepatitis dan ISF (Infeksi Saluran Pencernaan)	Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	36	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon	Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dan baduta	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	37	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penurunan Kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Tertentu	Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dan baduta	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tabalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	38	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pelaksanaan Imunisasi Rutin Bayi dan Baduta	Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dan baduta	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	2	2	2	1
											Jumlah Puskesmas terakreditasi									
											Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional									
											Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)									
											Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X									
											Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil									
											Persentase Kunjungan Balita									
											Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia									
											Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN									
											Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat									
											Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %.									
											Persentase kasus HIV yang diobati									
											Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS									
											Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk									
											Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria									
											Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1%									
											Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies)									
											Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi									
											Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji									
											Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko									
											Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson									
											Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi									
											Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi									
											Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi									
											Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana									
											Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM									
											Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar									
											Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT									
											Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)									
											Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif									
											Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi									
											Jumlah desa yang melaksanakan STBM									
											Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan									
											Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat									
											Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan									
											Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar									
											Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya									
											Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	39	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (PAK) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	22	40	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpubikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	1		
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	1	2	1	
1	2	23	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	2	1	
1	2	23	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penerapan Komponen-komponen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	2	1	
1	2	23	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	1	2	1	
1	2	23	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan	Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	1	2	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1		2	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan Jumlah kab/kota yang melaporkan data kesehatan melalui jaringan Komunikasi data (KOMDAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	2	1
1		2	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Asistensi pengumpulan dan Update data program kesehatan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan Jumlah kab/kota yang puskesmas tersedia jaringan komunikasi data Jumlah kab/kota yang melaporkan data kesehatan melalui jaringan Komunikasi data (KOMDAT)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan Jumlah kab/kota yang melaporkan data kesehatan melalui jaringan Komunikasi data (KOMDAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1		2	23	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah kab/kota yang puskesmas tersedia jaringan komunikasi data Jumlah kab/kota yang melaporkan data kesehatan melalui jaringan Komunikasi data (KOMDAT)	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan Jumlah kab/kota yang puskesmas tersedia jaringan komunikasi data Jumlah kab/kota yang melaporkan data kesehatan melalui jaringan Komunikasi data (KOMDAT)	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pengumpulan dan update data Program Kesehatan Jumlah kab/kota yang melaporkan data kesehatan melalui jaringan Komunikasi data (KOMDAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2	1			

[illegible]

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																										
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																															
1	2	23	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Diseminasi hasil penelitian dan capaian program kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah publikasi Hasil penelitian kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28	2	2	2	1																											
						Jumlah publikasi Hasil penelitian kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Jumlah publikasi Hasil penelitian kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK)	Jumlah Puskesmas terakreditasi					Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	Persentase Kunjungan Balita	Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat	Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %.	Persentase kasus HIV yang diobati	Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk	Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria	Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1%	Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies)	Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko	Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson	Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi	Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan	Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	3	2	1			
1	2	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	3	2	1		

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	29		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program kesehatan anak balita	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kabikota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kabikota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kabikota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kabikota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kabikota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kabikota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kabikota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kabikota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kabikota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kabikota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	29	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Persentase Kunjungan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Kunjungan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Persentase Kunjungan Balita Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	30	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																					
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE												
1	2	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pelayanan kesehatan Lansia	Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	2	2	1								
									Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKM Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direspon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi									Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat								

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	32	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program kesehatan ibu dan anak	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kabikota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kabikota dengan IR OBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kabikota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kabikota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kabikota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kabikota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kabikota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	LURISSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	LURISSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	32	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Kunjungan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PERMENDAGRI 13/RP/MD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	32	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Kunjungan Balita Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I,	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	32	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah dan remaja	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kabikota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kabikota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kabikota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kabikota yg Eliminasi Rabies (kematan karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kabikota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direspn Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Persentase Kunjungan Balita Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kabikota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang dilanggeng oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kabikota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1		2	33	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program upaya kesehatan perorangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan Jumlah RS yang mendukung prog. PONEK Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di RS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	2	1		
1		2	33	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan Jumlah Rumah Sakit yang mendukung prog. PONEK	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan Jumlah RS yang mendukung prog. PONEK Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di RS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	33	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di Rumah Sakit	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di Rumah Sakit	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan Jumlah RS yang mendukung prog. PONEK Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di RS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	2	2	1
1	2	33	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Peningkatan Rumah Sakit untuk Mendukung Program PONEK	Jumlah Rumah Sakit yang mendukung prog. PONEK	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan Jumlah Rumah Sakit yang mendukung prog. PONEK	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kab/Kota dengan akses layanan rujukan Jumlah RS yang mendukung prog. PONEK Jumlah kasus yang diselesaikan oleh BPRS di RS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	34		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi	Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	1	
1	2	34	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gedung bapelkes	Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	34	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana bapelkes	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	1	2	2	1	
1	2	34		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi	Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi		Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	2	1	
1	2	34	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2	1	
1	2	34	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan peningkatan kelembagaan bapelkes	Persentase persiapan akreditasi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis Persentase persiapan akreditasi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	2	1	

[illegible]

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	35	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pengelolaan program jamkesda provinsi	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	35		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (35.100 jiwa tahun 2021) Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2021)			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	1	
1	2	35	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan pengelolaan PHA dan DHA	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah dokumen Hasil Rakerkesda Jumlah Dokumen SAKIP Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah kab/kota yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan District Health Account (DHA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Informasi Kesehatan Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang disiplin Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang paham terhadap aturan Jumlah Laporan keuangan yang tepat waktu Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	2	1
1	2	37		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	1	
1	2	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan pelayanan balai laboratorium kesehatan	presentase pemeriksaan labotorium yang dilayanin	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	presentase pemeriksaan labotorium yang dilayanin presentase parameter pelayanan labotorium terakreditasi presentase ketersediaan kegiatan operasional balai labotorium kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Persentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Persentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Persentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	37	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pelayanan peningkatan pelayanan laboratorium	presentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	presentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani presentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi presentase ketersediaan kegiatan operasional balai laboratorium kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Presentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Presentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Presentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Presentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	2	1
1	2	37	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan pengembangan pelayanan labkes BLUD	presentase ketersediaan kegiatan operasional balai laboratorium kesehatan	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	presentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani presentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi presentase ketersediaan kegiatan operasional balai laboratorium kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab yang melakukan pelayanan kesehatan yang bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil (DTPK) Presentase pemeriksaan laboratorium yang dilayani Presentase parameter pelayanan laboratorium terakreditasi Presentase ketersediaan kegiatan operasional Balai Laboratorium Kesehatan Presentase ketersediaan obat buffer stock di Provinsi Jambi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan program kefarmasian sesuai standar (laporan POR, PIO dan EPO) Jumlah pembangunan dan Rehab gedung Bapelkes Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapelkes (AC Meubeler Listrik Air Jaringan Internet Minibus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	2	1
1	2	40		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis penunjang Persentase Nakes yang memiliki STR		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparaturnya yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	2	1		
1	2	40	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Percepatan peningkatan kemampuan dan kualifikasi tenaga kesehatan menjadi DIII	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan jenjang Pendidikan Menengah/DI Menjadi D.III Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam bidang kesehatan Persentase persiapan akreditasi Jumlah Kab/Kota yang dibina tenaga kesehatan strategis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparaturnya yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	40	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis penunjang Persentase Nakes yang memiliki STR			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis penunjang Persentase puskesmas yang minimal 9 jenis tenaga kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	2	1	
1	2	40	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pendayagunaan tenaga kesehatan Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis penunjang Persentase puskesmas yang minimal 9 jenis tenaga kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis penunjang Persentase puskesmas yang minimal 9 jenis tenaga kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis penunjang Persentase puskesmas yang minimal 9 jenis tenaga kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan Persentase aparatur yang mendapat pelatihan Persentase pelatihan SDM kesehatan yang terakreditasi Persentase penempatan tenaga strategis (PTT, Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Spesialis) dari Provinsi Jambi ke Ke Kab/Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	41		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usila Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Elimasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	41	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjarangan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %. Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Persentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kiris kesehatan yang diverifikasi dan ditanggulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini disrespon Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	41	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan pengendalian kesehatan jiwa dan NAFZA	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang menerapkan Program Indonesia sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS- PK) Jumlah Puskesmas terakreditasi Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII dan X Jumlah puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Kunjungan Balita Persentase puskesmas yang melaksanakan santun usia Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase kasus HIV yang diobati Persentase kab/kota yang 50% PKM-nya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk Jumlah kab/kota yang memperoleh sertifikat Eliminasi malaria Jumlah Kab/Kota Endemis Filaria yg berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi <1% Presentase kab/kota yg Eliminasi Rabies (kematian karena Rabies) Persentase kritis kesehatan yang diverifikasi dan ditangulangi Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko Persentase sinyal kewaspadaan dini direpson Insiden Rate (IR) kasus suspek campak per 100.000 populasi Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu PTM Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase Kabupaten melaksanakan Surveilans Gizi Jumlah desa yang melaksanakan STBM Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Persentase Kab/Kota melaksanakan kegiatan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah penelitian kesehatan dan capaian program kesehatan terpublikasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mempunyai puskesmas yang terakreditasi Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) Persentase kab/kota yang mempunyai puskesmas santun lansia Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di Provinsi Jambi Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (76.086 jiwa tahun 2020) Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 % Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase Kab/Kota yang 50% desa/kelurahannya melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM Prevalensi Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	42		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan alkes dan PKRT yang terjamin keamanan, mutu dan memenuhi syarat			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah sarana produksi, distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan (pengawasan, sarana, produksi dan penilaian)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan alkes dan PKRT yang terjamin keamanana, mutu dan memenuhi syarat Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang bermutu, aman dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	4	2	1				
1	2	42	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Penilaian dan Pengawasan Alkes dan PKRT	Jumlah sarana produksi, distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan (pengawasan, sarana, produksi dan penilaian)	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah sarana produksi, distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan (pengawasan, sarana, produksi dan penilaian)	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah sarana produksi, distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan (pengawasan, sarana, produksi dan penilaian)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan alkes dan PKRT yang terjamin keamanana, mutu dan memenuhi syarat Persentase Kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang bermutu, aman dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	2	1			

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Rumah Sakit Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	2	1
1	2	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	2	1
1	2	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	2	1
1	2	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	2	1
1	2	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	2	1
1	2	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	13	3	1	2	1
1	2	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta, pasien yang terlayani	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta, pasien yang terlayani	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	2	1
1	2	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	2	1
1	2	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	2	1
1	2	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	2	1
1	2	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	2	1
1	2	2	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	1	2	1
1	2	2	34	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	2	1
1	2	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	2	1
1	2	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	2	1
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	1	2	1
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	2	1
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	1	2	1
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	2	1
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan program anggaran yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	26		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pengadaan, peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	26	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pembangunan rumah sakit	Jumlah gedung yang dibangun	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	2	1
1	2	26	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah alat penunjang pelayanan RS (dapur, laundry, ruang pasien, ruang tunggu dll) yang terpenuhi	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah alat penunjang pelayanan RS (dapur, laundry, ruang pasien, ruang tunggu dll) yang terpenuhi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	14	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	26	27	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non - DAK)	Jumlah alat yang diadakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	1	2	2	1
1	2	26	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat yang diadakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	1	2	2	1
1	2	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	2	1
1	2	5	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah orang yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	2	1
1	2	43		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	43	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher Jumlah pelayanan RS yang sesuai standar akreditasi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	2	2	1
1	2	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	2	1
1	2	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin yang berobat di RS mendapatkan pelayanan kesehatan			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat miskin yang berobat di RS mendapatkan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	2	1
1	2	24	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda	Jumlah pelayanan kesehatan penduduk miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan penduduk miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat miskin yang berobat di RS mendapatkan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	2	2	2	1
1	2	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSU			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	23	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi RS	Jumlah pelayanan RS yang sesuai standar akreditasi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher Jumlah pelayanan RS yang sesuai standar akreditasi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Raden Mattaher	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	4	2	2	1
1	2	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	2	2	1
1	2	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	13	1	2	2	1
1	2	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien RSU dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan pasien			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat Anti Tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai standar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	1	2	2	1

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Rumah Sakit Jiwa Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	2	1
1	2	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar per tahun (surat)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar per tahun (surat)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	2	1
1	2	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	2	1
1	2	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penerima jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	2	1
1	2	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian Jasa Kebersihan Kantor,loundry (bulan)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian Jasa Kebersihan Kantor,loundry (bulan)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	2	1
1	2	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor (set)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor (set)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	2	1
1	2	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan(set)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	2	1
1	2	1	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan RT (buah)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan Kantor (jenis)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	13	3	1	2	1
1	2	1	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan RT (buah)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT (buah)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	14	3	1	2	1
1	2	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu, pegawai (orang) yang makan dan minum	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu, pegawai (orang) yang makan dan minum	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	2	1
1	2	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (OH)	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	2	1
1	2	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	2	1
1	2	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional yang dibeli	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional yang dibeli	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	2	1
1	2	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan penunjang pelayanan yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan penunjang pelayanan yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	2	1
1	2	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase PNS yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin dan kapasitas sdm yang meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	2	1
1	2	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin dan kapasitas sdm yang meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	2	1
1	2	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin dan kapasitas sdm yang meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	2	1
1	2	5	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin dan kapasitas sdm yang meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	2	1
1	2	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien rsj danBahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan pasien RSJ			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan habis pakai dan bahan kimia (reagen) yang dibeli	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis obat, bahan habis pakai dan bahan kimia (reagen) yang dibeli	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kab/kota yang dilayani pelayanan jiwa			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	2	1
1	2	16	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan integrasi, droping, penjangingan,dan home visit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pelaksanaan kegiatan integrasi, droping, penjangingan,dan home visit	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	13	2	2	2	1
1	2	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang menyiapkan satu percontohan desa siaga kesehatan jiwa			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	2	1
1	2	19	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi dikab/kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan promosi & pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan jiwa	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	2	2	2	1
1	2	20		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Periode pemenuhan makanan dan minuman pasien yang disediakan			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	20	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat	Jumlah periode bahan kebutuhan makanan dan minuman pasien rawat inap yang bergizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah periode bahan kebutuhan makanan dan minuman pasien rawat inap yang bergizi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	2	2	1	
1	2	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di RSJ			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	2	1	
1	2	23	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Program Anggaran	Jumlah perencanaan dan program anggaran yang disusun	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah perencanaan dan program anggaran yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	2	1	
1	2	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pesentase masyarakat miskin,gelandangan, orang terlantar yang dilayani di RSJ			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	2	1	
1	2	24	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Pasien Korban Pasung dan Gelandangan Psiotik	Jumlah pembiayaan Pelayanan Kesehatan jiwa bagi penduduk miskin, korban pasung, gelandangan psikotik	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pembiayaan Pelayanan Kesehatan jiwa bagi penduduk miskin, korban pasung, gelandangan psikotik	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan utk UKP,UKM rujukan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	2	2	2	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	26		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pengadaan, peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat yang sesuai dengan standar			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	26	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung,sarana,prasarana rumah sakit yang dibangun	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	2	1
1	2	26	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang direhab	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang direhab & dipelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	2	2	1
1	2	26	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat kedokteran/kesehatan yang diadakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat kedokteran/kesehatan yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	2	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	26	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai RS	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	14	1	2	2	1
1	2	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan Sarpas RS/RSJ/RS Paru/RS Mata			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	2	1
1	2	27	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah pemeriksaan sampel air limbah, air bersih dan pemusnahan sampah medis	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor dan peralatan penunjang pelayanan yang terpelihara Jumlah pemeriksaan sampel air limbah, air bersih dan pemusnahan sampah medis Jumlah gedung kantor & penunjang pelayanan yang terpelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan,sarana,prasarana & alat kesehatan yang tersedia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	1	2	2	1
1	2	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan Sarpas RS/RSJ/RS Paru/RS Mata			Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	2	1
1	2	27	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dan peralatan penunjang pelayanan yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dan peralatan penunjang pelayanan yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	2	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	27	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional dan mesin lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeriksaan sampel air limbah, air bersih dan pemusnahan sampah medis Jumlah kendaraan Dinas/Operasional dan mesin lainnya yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	2	1
1	2	36		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	2	2	1
1	2	36	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSJ	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	2	2	1

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	3	1
1	3	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar pertahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar pertahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	3	1
1	3	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening jumlah dokumen / laporan yang dikeluarkan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	3	1
1	3	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	3	1
1	3	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	3	1
1	3	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	3	1
1	3	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan jumlah penggandaan/foto copy	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan Jumlah Penggandaan/fotocopy	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lokasi penyediaan komponen instalasi air dan listrik/penerang bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi penyediaan komponen instalasi air, listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	3	1	
1	3	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	3	1	
1	3	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah peserta rapat/tamu/dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat/tamu/dll	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	3	1	
1	3	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasu dan Konsultasi Keluar Daerah Yang dilaksanakan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	3	1	
1	3	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	3	1	
1	3	2	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung yang terbangun jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	3	1	
1	3	2	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor jumlah gedung yang terbangun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	3	1	
1	3	2	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara jumlah gedung yang terbangun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	3	1	
1	3	2	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung yang terbangun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	1	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	2	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	3	1	
1	3	2	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	3	1	3	1	
1	3	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/oprasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/oprasional jumlah alat alat berat yang direncanakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	3	1	
1	3	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan dan bahan penunjang laboratorium yang memadai dan handal dalam mencapai hasil berstandar nasional	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	3	1	3	1	
1	3	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang berpelihara Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman Jumlah alat berat yang dipelihara/direhab	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	1	3	1	
1	3	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung yang terbangun jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	3	1	
1	3	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor jumlah gedung yang terbangun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	3	1	
1	3	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan dan bahan penunjang laboratorium yang memadai dan handal dalam mencapai hasil berstandar nasional	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	3	1	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung yang terbangun jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	3	1	
1	3	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor jumlah gedung yang terbangun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	3	1	
1	3	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Mebeleur	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	26	3	1	3	1	
1	3	2	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yg di adakan	Pengadaan Mebeleur	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	26	3	1	3	1	
1	3	2	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Komputer	jumlah pengadaan komputer	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	13	3	1	3	1	
1	3	2	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung yang terbangun jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	3	1	
1	3	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara jumlah gedung yang terbangun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	3	1	
1	3	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpilih	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpilih	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	3	1	
1	3	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpilih	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	2	29	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah meubelair yang terpilih	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	jumlah meubelair yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	36	3	1	3	1
1	3	2	40	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	jumlah ruma jabatan yang direhap sedang/berat	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Jabatan	jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/berat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	37	3	1	3	1
1	3	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Rehabilitasi Seding/Berat Rumah Gedung Kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	3	1	3	1
1	3	2	44	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang di pelihara sedang/berat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpilih	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	3	1
1	3	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase PNS yang Disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	3	1
1	3	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	3	1
1	3	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persemtase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	3	1
1	3	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	1	3	1
1	3	6	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan yang dikeluarkan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	1	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi fungsional dalam kondisi baik			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	3	1
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	2	3	1
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Areal layanan jaringan irigasi yang rehab dan ditingkatkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	2	3	1
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	2	2	3	1
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Peningkatan Bendung Irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	2	2	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Areal layanan jaringan irigasi yang rehab dan ditingkatkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	14	2	2	3	1
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah waduk/embung/situ serta bangunan penampung lainnya yang optimal terpelihara	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	2	2	3	1
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang/luas Jaringan DR yang direhab/reklamasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	2	2	3	1
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang/luas Jaringan DR yang direhab/reklamasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	2	2	3	1
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang / luas jaringan DR yang di rehab/reklamasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	2	2	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	27	2	2	3	1
1	3	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	28	2	2	3	1
1	3	24	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa	Panjang / luas jaringan DR yang di rehab/reklamasi	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Panjang / luas jaringan DR yang di rehab/reklamasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	22	2	2	3	1
1	3	24	19	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa	Panjang / luas jaringan DR yang di rehab/reklamasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang / luas jaringan DR yang di rehab/reklamasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	2	2	3	1
1	3	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase Panjang Jalan Provinsi yang memiliki drainase Persentase pembangunan jalan di jalan provinsi dalam kondisi baik Pesentase jalan provinsi menuju sentara produksi kondisi mantap			Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	
							panjang jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km		Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 65,17 km - Fungsional 45,32 km												
							Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km		Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km												
							Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km		Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km												
							Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km		Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km												
							Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk		Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk												
							Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km		Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km												
							Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km		Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km												
							Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km		Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km												
							Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)	Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi	Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci	panjang jembatan yang dibangun	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi	panjang jembatan yang direhap/pemelihara	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Pertahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	13	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	14	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	panjang jalan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi	panjang jembatan yang dibangun	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Pengelolaan Leger Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Pembangunan Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	15	16	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi	jumlah lokasi yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1
1	3	36		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase kab/kota yang dibina			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	11	3	1	
1	3	36	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah dok/lap yang dikeluarkan	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dok/lap yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	11	3	1	
1	3	36	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi dan SIPJAKI	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	11	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	36	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi dan SIPJAKI	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	11	3	1
1	3	36	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi dan SIPJAKI	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	11	3	1
1	3	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase Panjang Jalan Provinsi yang memiliki drainase Persentase pembangunan jalan di jalan provinsi dalam kondisi baik Pesentase jalan provinsi menuju sentara produksi kondisi mantap			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	3	1
1	3	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen Pembangunan, Dokumen Pengawasan, dan Regulasi Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	3	1
1	3	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase Panjang Jalan Provinsi yang memiliki drainase Persentase pembangunan jalan di jalan provinsi dalam kondisi baik Pesentase jalan provinsi menuju sentara produksi kondisi mantap			Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	3	1
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	4	1
1	4	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rusun layak huni yang dibangun dan mengurangi backlog sebanyak 2 unit	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	4	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	4	15	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rusun layak huni yang dibangun dan mengurangi backlog sebanyak 2 unit	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	2	4	1	
1	3	42		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	3	1	
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	4	1	
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	1	4	1	
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	4	1	
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	1	4	1	
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	4	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	4	1
1	4	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	jumlah dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	4	4	1
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	4	1
1	4	21		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	2	4	1
1	4	21	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Pembangunan PSU perumahan formal	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung Jumlah Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi rumah korban atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	3	2	4	1
1	4	21	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Pembangunan PSU perumahan swadaya	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung Jumlah Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi rumah korban atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	3	2	4	1
1	4	21		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	4	1
1	4	21	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Pembangunan PSU perumahan formal	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	4	1
1	4	21	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Pembangunan PSU perumahan formal	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	4	4	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	4	21	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Pembangunan PSU perumahan swadaya	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	4	1
1	4	21	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Pembangunan PSU perumahan swadaya	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase tersedianya lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	4	4	1
1	4	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Fasilitas, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	jumlah laporan yang dikeluarkan			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	4	1
1	4	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	4	1
1	4	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	4	1
1	4	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	4	1
1	4	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	2	4	1
1	4	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	2	4	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	4	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	2	4	1	
1	4	22		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Persentase tercapainya kegiatan fasilitasi, bantuan teknis dan sosialisasi bidang perumahan pada tahun berkenan			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	4	1	
1	4	22	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	4	1	
1	4	22	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	4	1	
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	4	1	
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya rumah khusus	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebagai sarana pendukung Jumlah Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi rumah korban atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	3	2	4	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Tersedianya Pelayanan sertifikasi, kualifikasi,klasifikasi, dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	5	4	1	
1	4	15	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan	Tersedianya data base perumahan, dokumen perencanaan dan pengawasan bidang perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Tersedianya pelayanan sertifikasi, kualifikasi,klasifikasi, dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	5	4	1	
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah umah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terdistribusi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah umah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terdistribusi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	4	2	4	1	
1	4	15	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	Tersedianya rumah khusus sebanyak 10 set	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah umah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terdistribusi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	2	4	1	
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	4	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	4	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	2	2	4	1	
1	4	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	4	1	
1	4	15	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	jumlah dokumen yang tersusun	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	4	1	4	1	
1	3	38		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	12	3	1	
1	3	38	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	12	3	1	
1	3	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat jabatan fungsional teknis pada tahun berkenaan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	3	1	
1	3	5	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diklat Pelatihan Formal dan Sosialisasi Bidang ke PU-an	jumlah pegawai yang mengikuti diklat jabatan fungsionalteknis	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Teknis Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	3	1	
1	3	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persemtase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persemtase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	6	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di keluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	1	3	1
1	3	6	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan	Jumlah pelayanan informasi yang disedisksn	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	3	1
1	3	6	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Program Rencana Umum dan Strategis Bidang Infrastruktur	jumlah laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di keluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	3	1
1	3	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	3	1
1	3	6	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Aset Dinas PUPR Provinsi Jambi	jumlah laporan yang dikeluarkan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	3	1	3	1
1	3	26		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	3	1
1	3	26	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang direhap	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang direhap	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	1	2	3	1
1	3	26	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah waduk/embun/situ/bangunan penampungan air lainya yang direhap	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang direhap	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	1	2	3	1
1	3	26	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	25		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	3	1
1	3	25	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sumber Air Baku	Jumlah sarpras tersedianya air baku yang akan dibangun	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sarpras tersedianya air baku yang akan dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	1	2	3	1
1	3	25		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	3	3	1
1	3	25	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan destribusi jaringan air bersih	persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan 9419.390 ruma tangga)	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase (%) Pencapaian Pelayanan SPM sub bidang Air Minum Kab/Kota di Provinsi Jambi.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	3	3	1
1	3	25	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan destribusi jaringan air bersih	persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan 9419.390 ruma tangga)	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase (%) Pencapaian Pelayanan SPM sub bidang Air Minum Kab/Kota di Provinsi Jambi.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	3	3	1
1	3	25	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan destribusi jaringan air bersih	persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan 9419.390 ruma tangga)	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase (%) Pencapaian Pelayanan SPM sub bidang Air Minum Kab/Kota di Provinsi Jambi.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	3	3	1
1	3	25	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan destribusi jaringan air bersih	persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan 9419.390 ruma tangga)	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase (%) Pencapaian Pelayanan SPM sub bidang Air Minum Kab/Kota di Provinsi Jambi.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	3	3	1
1	3	25	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan destribusi jaringan air bersih	persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan 9419.390 ruma tangga)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase (%) Pencapaian Pelayanan SPM sub bidang Air Minum Kab/Kota di Provinsi Jambi.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	1	3	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	34		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	11	3	1
1	3	34	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	11	3	1
1	3	34	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	11	3	1
1	3	34	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah orang yang terlatih Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	11	3	1
1	3	34	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi Jumlah dok/lap yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	11	3	1
1	3	35		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	11	3	1
1	3	35	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pemberdayaan Kemitraan dan Peningkatan Peran TPJK dan FJKD	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kemitraan dan peningkatan peran TPJK dan FJKD	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah orang yang terlatih Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	11	3	1
1	3	35	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pelatihan, Pembekalan, dan Fasilitasi Uji Kompetensi TTK	Jumlah orang yang terlatih	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah orang yang terlatih Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	11	3	1
1	3	35	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan BinteK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Konstruksi	Jumlah orang yang terlatih	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopetensi Jumlah orang yang terlatih Jumlah dok/lap yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	11	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	36		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase kab/kota yang dibina			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	11	3	1
1	3	36	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah dok/lap yang dikeluarkan	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkopotensi Jumlah orang yag terlatih Jumlah dok/lap yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase penyelenggaraan bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	11	3	1
1	3	37		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	3	1
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Document Rencana Kebijakan dan Strategi dan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	3	1
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	4	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	3	1
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Tersedia nya TPA/TPST/SPA di Kabupaten Koa yang Memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	4	3	1
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Tersedia nya Sarana dan Prasraana Pendukung Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	4	3	1
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Tersosialisasi nya Standar SPM Bidang Persampahan di Kabupaten Kota Provinsi Jambi	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	4	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	37		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	3	1
1	3	37	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang yang dibangun (Ipal/airlimbah dan TPA regional di PKN, PKNp, dan PKW)	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	3	1
1	3	37		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	3	1
1	3	37	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Persentase pencapaian pemeliharaan sarpra masyarakat tahun berkenan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pencapaian pemeliharaan sarpra masyarakat tahun berkenan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	37	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Bid.Cipta Karya	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan (Rispan, Sanitasi, dan Gorong - Gorong)	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan (Rispan, Sanitasi, dan Gorong - Gorong)	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	7	3	1
1	3	37		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan			Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	9	3	1
1	3	37	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Persentase pencapaian pemeliharaan sarpra masyarakat tahun berkenan	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan Persentase pencapaian pemeliharaan sarpra masyarakat tahun berkenan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	9	3	1
1	3	37	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya	Jumlah Laporan yang dikeluarkan	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Laporan yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	9	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	37	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya	Jumlah Laporan yang dikeluarkan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Laporan yang dikeluarkan Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	1	9	3	1
1	3		38	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	7	3	1
1	3	38	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan serta Penguatan NSPM dan Pengembangan Data Infrastruktur Bidang ke PU an	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	7	3	1
1	3		38	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	9	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	38	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemrograman, dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan Persentase pencapaian pemeliharaan sarpra masyarakat tahun berkenaan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	9	3	1
1	3	38	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Laporan yang dikeluarkan Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	9	3	1
1	3	38		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	12	3	1
1	3	38	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemrograman, dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	12	3	1
1	3	38	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemrograman, dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	12	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	38	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pemrograman, dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	12	3	1
1	3	38	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	12	3	1
1	3	39		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan			Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	ersentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	12	3	1
1	3	39	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	ersentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	12	3	1
1	3	39		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	12	3	1
1	3	39	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	4	12	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	39	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	4	12	3	1
1	3	39		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	11	3	1
1	3	39	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Infrastruktur Bidang ke PU an	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Peningkatan penilaian mengikuti perlombaan konstruksi Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	2	11	3	1
1	3	40		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (KM) pertahun			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	3	1
1	3	40	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan Penunjang Laboratorium Ke PU an	jumlah peralatan dan bahan penunjang laboratorium yang memadai dan handal dalam mencapai hasil berstandar nasional	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan dan bahan penunjang laboratorium yang memadai dan handal dalam mencapai hasil berstandar nasional	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	3	1	3	1
1	3	40	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Ke PU an	jumlah alat-alat ukur dan baha laboratorium yang dipelihara	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah alat-alat ukur dan baha laboratorium yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	3	1	3	1
1	3	40	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Uji Bidang Ke PU an	jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang berpelihara Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman Jumlah alat berat yang dipelihara/direhab	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	1	3	1
1	3	40	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Uji Bidang Ke PU an	jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasu dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	40	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengadaan Alat Berat	jumlah alat alat berat yang direncanakan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/oprasional jumlah alat alat berat yang direncanakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	3	1	
1	3	40	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara/direhab	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang berpelihara Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman Jumlah alat berat yang dipelihara/direhab	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	1	3	1	
1	3	40	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara/direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah alat berat yang dipelihara/direhab	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	41	3	1	3	1	
1	3	40	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengguna Alat Berat Untuk Pekerjaan Infrastruktur Ke PU an	jumlah alat berat dan pendukung lainnya yang dioperasikan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat berat dan pendukung lainnya yang dioperasikan Jumlah yang dikelola dalam tahun berkenaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	3	1	3	1	
1	3	40	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Jumlah yang dikelola dalam tahun berkenaan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat berat dan pendukung lainnya yang dioperasikan Jumlah yang dikelola dalam tahun berkenaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	3	1	3	1	
1	3	40		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (KM) pertahun			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	3	1		
1	3	40	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Uji Bidang Ke PU an	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Teknis Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kelaboratoriuman	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin pada tahun berkenaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	3	1	
1	3	40		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (KM) pertahun			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persemtase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	1		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	40	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Alat alat berat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persemtase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	3	1
1	3	40		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (KM) pertahun			Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	3	1
1	3	40	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Ketatausahaan	Jumlah SDM Ketatausahaan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah SDM Ketatausahaan	Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	1	3	1
1	3	40		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (KM) pertahun			Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	10	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	40	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) - Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	19	1	10	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	40	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jalan yang dibangun (km) - Efektif : 47,50 km - Fungsional : 60 km Panjang jalan yang dibangun (KM) Efektif : 107, 85 km - Fungsional : 81 km Panjang Jalan Yang di Bangun (km) - Efektif : 84,78 Km - Fungsional : 71, 78 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 21 50 km - Fungsional : 29 km Panjang Jalan Yang ditingkatkan (km) -Efektif : 176,50km - fungsional : 28 kk Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif : 74,40 km - Fungsional : 90,40 km Panjang Jalan Yang dibangun (km) -Efektif : 44,50 km - Fungsional : 56 km Panjang Jalan yang dibangun (km) -Efektif 140 km - Fungsional : 169 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif : 88,30 km - Fungsional : 100 km Panjang Jalan yang ditingkatkan (km) - Efektif 65,17 km - Fungsional 45,32 km Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	20	1	10	3	1
1	3	40	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan Provinsi	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Balai peralatan dan perbekalan (KM) Tahun	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	1	10	3	1	
1	3	41		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Persentase terpeliharanya infrastruktur SDA yang beroperasi			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	3	1	
1	3	41	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Panjang / luas jaringan DI yang telah dibangun terpelihara	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Panjang / luas jaringan DI yang telah dibangun terpelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	45	1	2	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	41	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Panjang / luas jaringan DI yang telah dibangun terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang / luas jaringan DI yang telah dibangun terpelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	53	1	2	3	1	
1	3	41	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa yang telah dibangun	Panjang / Luas D R yang berfungsi optimal yang dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang / luas jaringan DI yang telah dibangun terpelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	53	1	2	3	1	
1	3	41	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air lainnya	Jumlah waduk/embung/situ serta bangunan penampung lainnya yang optimal terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49	1	2	3	1	
1	3	41	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sarpras yang dibangun	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Panjang Sarpras yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50	1	2	3	1	
1	3	41	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sarpras yang dibangun	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Panjang Sarpras yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51	1	2	3	1	
1	3	41	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sarpras yang dibangun	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Sarpras yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	54	1	2	3	1	
1	3	41	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sarpras Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sarpras yang dibangun	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Sarpras yang dibangun Jumlah sarana pengendalian banjir yang optimal terpelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	59	1	2	3	1	
1	3	41	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	Jumlah sarana pengendalian banjir yang optimal terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Sarpras yang dibangun Jumlah sarana pengendalian banjir yang optimal terpelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	59	1	2	3	1	
1	3	17		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Persentase pengurangan daya rusak air pada tahun berkenan			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	17	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	3	1
1	3	17	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	3	1
1	3	17	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	3	1
1	3	17	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah I	panjang sarpas yang dibangun	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang sarpras yang dibangun panjang / luas jaringan DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	1	2	3	1
1	3	17	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Wilayah II	panjang sarpas yang dibangun	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang sarpras yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	1	2	3	1
1	3	17	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai	Panjang sungai yang di normalisasi	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang di normalisasi Panjang / luas DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46	1	2	3	1
1	3	42		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	1	
1	3	42	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	jumlah dokumen / laporan yang dikeluarkan	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen / laporan yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	3	1
1	3	42	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Bid.SDA	Jumlah Dokumen /laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	63	1	2	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	42		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	3	1	
1	3	42	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Bid.SDA	Jumlah Dokumen /laporan yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	2	3	1	
1	3	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi fungsional dalam kondisi baik			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	3	1	
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	3	1	
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	2	3	1	
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	2	3	1	
1	3	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen / laporan yang dikeluarkan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	2	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	24	10		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang / luas DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	2	3	1
1	3	24	10		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang / luas DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	2	3	1
1	3	24	10		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang / luas DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	1	2	3	1
1	3	24	10		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang / luas DI yang dibangun	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang di normalisasi Panjang / luas DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	46	1	2	3	1
1	3	24	18		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Baru	panjang / luas jaringan DI yang dibangun	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang sarpras yang dibangun panjang / luas jaringan DI yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan air baku untuk mendukung universal akses pada tahun berkenan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	1	2	3	1
1	3	16			Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	6	3	1
1	3	16	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	6	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	16	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	6	3	1	
1	3	16	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	6	3	1	
1	3	16	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	6	3	1	
1	3	16	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	6	3	1	
1	3	16	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1357,64 ha menjadi 0 ha	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	6	3	1	
1	3	16	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1357,64 ha menjadi 0 ha	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang /Luas Daerah Yang terbebas dari banjir	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	6	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	16	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokument Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	6	3	1	
1	3	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat jabatan fungsional teknis pada tahun berkenaan			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	11	3	1	
1	3	5	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembinaan Teknik Sumber Daya Aparatur Bidang ke PU an	JUmlah pegawai yang dibina	Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	JUmlah pegawai yang dibina	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	11	3	1	
1	3	38		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan			Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	ersentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	12	3	1	
1	3	38	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	ersentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	12	3	1	
1	3	38	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	ersentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	2	12	3	1	
1	3	38	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	ersentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	12	3	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	38		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	12	3	1
1	3	38	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	4	12	3	1
1	3	38	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	12	3	1
1	3	38	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	4	12	3	1
1	3	39		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase kegiatan bidang ke-PU-an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	12	3	1
1	3	39	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	12	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	3	39	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan tahun berkenaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	12	3	1
1	3	37		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh 1367,64 ha menjadi 0% Proposal rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	8	3	1
1	3	37	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Persentase pencapaian pemeliharaan sarpra masyarakat tahun berkenan	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang memiliki Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	8	3	1
1	3	37	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Bid.Cipta Karya	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan (Rispan, Sanitasi, dan Gorong - Gorong)	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Dokumen Pembangunan, Dokumen Pengawasan, dan Regulasi Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	8	3	1
1	3	37	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Bid.Cipta Karya	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan (Rispan, Sanitasi, dan Gorong - Gorong)	Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	8	3	1
1	3	37	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Perencanaan dan pengawasan Bid.Cipta Karya	Jumlah dokumen/laporan yang dikeluarkan (Rispan, Sanitasi, dan Gorong - Gorong)	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Arsitek yang diperpanjang Lisensinya	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	1	8	3	1
1	3	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	8	3	1
1	3	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	8	3	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	3	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	8	3	1	
1	3	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Identifikasi Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Bangunan Gedung Cagar Budaya	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	8	3	1	
1	3	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rumah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang memiliki Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun dan direhab	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	8	3	1	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	5	1	
1	5	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	5	1	
1	5	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	5	1	
1	5	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	5	1	
1	5	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	1	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	3	1	5	1
1	5	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK selama 1 tahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	5	1
1	5	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	5	1
1	5	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	5	1
1	5	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	5	1
1	5	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pelayanan administrasi perkkantoran	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkkantoran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	5	1
1	5	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	5	1
1	5	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi apatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi apatur	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	5	1
1	5	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi apatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi apatur	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	5	1
1	5	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	5	1
1	5	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	5	1
1	5	5	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pendidikan dan pelatihan formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	5	1
1	5	25		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian penata usaha keuangan, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kesbangpol Tersusunnya rencana satuan kerja perangkat daerah (SKPD), DPA SKPD, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA SKPD Terlaksananya koordinasi dan rakor sinkronisasi program/kegiatan jajaran kesbangpol kab/kota se provinsi jambi			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	5	1
1	5	25	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan realisasi Program Kesbang dan Politik Provinsi Jambi	Tersusunnya rencana satuan kerja perangkat daerah (SKPD), DPA SKPD, LAKIP, LKPJ, LPPD, Renstra SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya rencana satuan kerja perangkat daerah (SKPD), DPA SKPD, LAKIP, LKPJ, LPPD, Renstra SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	5	1
1	5	25	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Terlaksananya koordinasi dan rakor sinkronisasi program/kegiatan jajaran kesbangpol kab/kota se Provinsi Jambi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan rakor sinkronisasi program/kegiatan jajaran kesbangpol kab/kota se Provinsi Jambi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	Indeks aspek hak-hak politik			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	3	1	8
1	5	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Politik Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	3	1	8
1	5	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada Terselenggaranya rakor bidang politik 2021 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	3	1	8
1	5	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring pelaksanaan pemilukadanya Jumlah Program Kegiatan Bidang Partisipasi Politik yang dievaluasi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan/ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	3	1	8
1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Politik Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	3	1	8
1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada Terselenggaranya rakor bidang politik 2021 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	3	1	8
1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring pelaksanaan pemilukadanya Jumlah Program Kegiatan Bidang Partisipasi Politik yang dievaluasi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan/ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	3	1	8
1	5	30		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	indeks Institusi demokrasi			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di provinsi jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Politik Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	3	1	8
1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di provinsi jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di provinsi jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada Terselenggaranya rakor bidang politik 2021 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	3	1	8
1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di provinsi jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di provinsi jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring pelaksanaan pemilukadanya Jumlah Program Kegiatan Bidang Partisipasi Politik yang dievaluasi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	3	1	8
1	5	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di provinsi jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan/ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Politik Persentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	3	1	8
1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilukada Terselenggaranya rakor bidang politik 2021 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	3	1	8
1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di provinsi jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	3	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring pelaksanaan pemilukadanya Jumlah Program Kegiatan Bidang Partisipasi Politik yang dievaluasi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	3	1	8	
1	5	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di provinsi jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah dokumen yang dilaksanakan/ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Indeks aspek hak-hak politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks aspek hak-hak politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	3	1	8	
1	5	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	2	1	8	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauaran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	2	1	8	
1	5	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauaran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	2	1	8	
1	5	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Nilai Kondusif, aman dan terkendali antar Etnis di Provinsi Jambi Persentase para Pengajar yang mendapatkan kegiatan penguatan pendidikan wawasan Kebangsaan Persentase Peserta yang mendapat sosialisasi kesadaran Bela Negara bagi generasi Muda	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	2	1	8	
1	5	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pemenuhan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauaran Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	2	1	8	
1	5	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	2	1	8	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	2	1	8
1	5	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	2	1	8
1	5	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Nilai Kondusif, aman dan terkendali antar Etnis di Provinsi Jambi Persentase para Pengajar yang mendapatkan kegiatan penguatan pendidikan wawasan Kebangsaan Persentase Peserta yang mendapat sosialisasi kesadaran Bela Negara bagi generasi Muda	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	2	1	8
1	5	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pemenuhan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	2	1	8
1	5	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	2	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	2	1	8	
1	5	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	2	1	8	
1	5	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Nilai Kondusif, aman dan terkendali antar Etnis di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	2	1	8	
1	5	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pemenuhan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	2	1	8	
1	5	27	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	2	1	8	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	27	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Rencana Aksi Inde Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	2	1	8
1	5	27	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Rencana Aksi Inde Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	2	1	8
1	5	27	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Rencana Aksi Inde Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Nilai Kondusif, aman dan terkendali antar Etnis di Provinsi Jambi Persentase para Pengajar yang mendapatkan kegiatan penguatan pendidikan wawasan Kebangsaan Persentase Peserta yang mendapat sosialisasi kesadaran Bela Negara bagi generasi Muda	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	2	1	8
1	5	27	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Rencana Aksi Inde Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pemenuhan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	2	1	8
1	5	27	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan Rencana Aksi Inde Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	2	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	1	1	8
1	5	30		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	indeks Institusi demokrasi			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	4	1	8
1	5	30	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalannya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	4	1	8
1	5	30	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalannya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	4	1	8
1	5	30	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalannya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	4	1	8
1	5	30	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalannya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	4	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	4	1	8
1	5	30	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	4	1	8
1	5	30	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	4	1	8
1	5	30	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	4	1	8
1	5	30	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	4	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	30	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di provinsi jambi Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	4	1	8
1	5	29		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	Indeks aspek hak-hak politik			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	2	1	8
1	5	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Manjaga Ketertiban dan Keamanan	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	6	1	8
1	5	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya Pembiinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	6	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	6	1	8	
1	5	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	6	1	8	
1	5	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Persentase Penurunan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	6	1	8	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	6	1	8
1	5	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	6	1	8
1	5	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	6	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	6	1	8
1	5	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	6	1	8
1	5	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Persentase Penurunan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	6	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU)	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	6	1	8
1	5	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU)	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	6	1	8
1	5	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantauan orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	6	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantauan orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	6	1	8	
1	5	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantauan orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	6	1	8	
1	5	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantauan orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Persentase Penurunan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	6	1	8	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantauan orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	6	1	8
1	5	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemantauan orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	6	1	8
1	5	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Pemetaan potensi Konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	6	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Pemetaan potensi Konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	6	1	8	
1	5	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Pemetaan potensi Konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	6	1	8	
1	5	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Pemetaan potensi Konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Persentase Penurunan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	6	1	8	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Pemetaan potensi Konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Terlaksananya penanganan konflik oleh tim terpadu (TIMDU) Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing,peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	6	1	8
1	5	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemantauan dan Pemetaan potensi Konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang diberikan atasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	6	1	8
1	5	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Manjaga Ketertiban dan Keamanan	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	2	1	8
1	5	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	6	1	8
1	5	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks aspek kebebasan sipil			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	5	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	27	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat	Meningkatnya kerukuna umat beragama di Provinsi Jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	5	1	8
1	5	27	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat	Meningkatnya kerukuna umat beragama di Provinsi Jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Bahan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	5	1	8
1	5	27	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat	Meningkatnya kerukuna umat beragama di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi Menurunnya persentase penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	5	1	8
1	5	27	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat	Meningkatnya kerukuna umat beragama di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dengan jajaran Kesbangpol Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan penyalahgunaan narkotika di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	5	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	27	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat	Meningkatnya kerukuna umat beragama di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan FKUB	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	5	1	8
1	5	27	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat	Meningkatnya kerukuna umat beragama di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya kepada atasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	5	1	8
1	5	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Manjaga Ketertiban dan Keamanan	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	5	1	8
1	5	28	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	1	5	1	8
1	5	28	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Bahan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2	1	5	1	8

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	28	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi Menurunnya persentase penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3	1	5	1	8
1	5	28	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dengan jajaran Kesbangpol Provinsi Jambi Terlaksananya pemantauan penyalahgunaan narkotika di provinsi Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4	1	5	1	8
1	5	28	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan FKUB	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	1	5	1	8
1	5	28	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di provinsi Jambi	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya kepada atasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Indeks aspek kebebasan sipil	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Indeks aspek kebebasan sipil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	1	5	1	8
1	5	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Manjaga Ketertiban dan Keamanan	Nilai rencana aksi daerah(RAD) penanganan konflik			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	indeks Institusi demokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Institusi demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		1	4	1	8

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	5	1	
1	5	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	5	1	
1	5	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	5	1	
1	5	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	5	1
1	5	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	5	1
1	5	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat penerangan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat penerangan kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	5	1
1	5	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	5	1
1	5	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	5	1
1	5	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	5	1	
1	5	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	23	3	1	5	1	
1	5	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	5	1	
1	5	2	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan mebeleur	Mebeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	26	3	1	5	1	
1	5	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung tempat kerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung tempat kerja	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	5	1	
1	5	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	2	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33	3	1	5	1
1	5	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	5	1
1	5	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	5	1
1	5	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Keseragaman pakaian dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	1	5	1
1	5	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Keseragaman pakaian dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	4	1	5	1
1	5	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	5	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan sumber daya aparatur Satpol PP	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan sumber daya aparatur Satpol PP	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	5	1
1	5	5	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemahaman peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pakaian dinas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	4	1	5	1
1	5	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Administrasi bahan verifikasi	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	2	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan hasil pemeriksaan	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan tahunan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan keuangan bulanan/semesteran	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis dan realisasi anggaran	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	2	1	5	1
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan tahunan	Administrasi Keuangan	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	5	1	
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen renstra dan renja perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	5	1	
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen RKA dan DPA perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	5	1	
1	5	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan realisasi perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	5	1	
1	5	6	39	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen bahan evaluasi perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	5	1	
1	5	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	15	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesiapsiagaan SDM Satpol PP dan Satlinmas Kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme Pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan HAM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	2	5	1
1	5	15	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Kesamaptaaan	Peningkatan kemampuan SDM Satpol PP	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesiapsiagaan SDM Satpol PP dan Satlinmas Kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme Pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan HAM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	2	5	1
1	5	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Profesionalitas PPNS	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	2	5	1
1	5	16	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Fasilitasi legalitas dan peningkatan profesional Satpol PP dan PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Fasilitasi legalitas dan peningkatan profesional Satpol PP dan PPNS	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Profesionalitas PPNS	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	2	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	5	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	5	1	
1	5	16	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah	Pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Jambi, Pengawasan Pejabat Daerah dan tamu serta patroli wilayah dalam rangka pemeliharaan trantibum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum, pengamanan aset dan patroli wilayah Pengendalian aksi demonstrasi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	5	1	
1	5	16	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengamanan Unjuk Rasa	Pengendalian unjuk rasa	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum, pengamanan aset dan patroli wilayah Pengendalian aksi demonstrasi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	5	1	
1	5	16		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	5	1	
1	5	16	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya	Pengawasan, penegakan dan penertiban Perda dan Perkada	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penegakan Perda dan Perkada Kerjasama lintas sektoral	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	2	5	1	
1	5	16	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kerjasama dalam Penegakan Prodak Hukum Daerah	Kerjasama lintas sektoral	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penegakan Perda dan Perkada Kerjasama lintas sektoral	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	2	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	16	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan pengawasan dan penertiban PNS/Honoror	Peningkatan kemampuan SDM Satpol PP Provinsi Jambi	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penegakan Perda dan Perkada Kerjasama lintas sektoral	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	2	5	1
1	5	31		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Kelembagaan dan Organisasi	Penataan kelembagaan dan organisasi			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	5	1
1	5	31	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja	Sinkronisasi program kegiatan Satpol PP	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Pengelolaan data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	5	1
1	5	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pemetaan daerah rawan kebakaran	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	5	1
1	5	23	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Penyediaan peta rawan kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Pengelolaan data dan informasi kebakaran		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pemetaan daerah rawan kebakaran	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	5	1
1	5	23	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Pengelolaan data dan informasi kebakaran		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pemetaan daerah rawan kebakaran	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	23	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Peningkatan layanan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Layanan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pemetaan daerah rawan kebakaran	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	5	1
1	5	23	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur yang handal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran Pelatihan petugas kebakaran dan penyelamatan	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Pemetaan daerah rawan kebakaran	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	4	5	1
1	5	19		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	5	1
1	5	19	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Cakupan petugas satuan perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan petugas satuan perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	5	1
1	5	19	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kegiatan Rakor Teknis Linmas Satpol PP	Terwujudnya kerjasama dalam mewujudkan perlindungan masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	5	19	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Deteksi Dini Bencana Alam dan Potensi Terorisme	Kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesiapsiagaan SDM Satpol PP dan Satlinmas Kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme Pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan HAM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	5	1
1	5	19	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan kemampuan dan pengetahuan anggota Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesiapsiagaan SDM Satpol PP dan Satlinmas Kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme Pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan HAM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	5	1
1	5	19	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan HAM	Terciptanya pemahaman anggota Satlinmas dalam perlindungan HAM	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesiapsiagaan SDM Satpol PP dan Satlinmas Kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam melakukan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme Pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan HAM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	5	1

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	6	1	
1	6	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	6	1	
1	6	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan Surat menyurat	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	6	1	
1	6	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	6	1	
1	6	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelolaan keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	6	1	
1	6	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	6	1	
1	6	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	6	1	
1	6	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	6	1	
1	6	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	6	1	
1	6	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	16	3	1	6	1	
1	6	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	6	1	
1	6	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	6	1	
1	6	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	2	5	1	
1	6	1	23	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	2	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan Capil			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dafduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	12	2	
1	6	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kependudukan	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dafduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	12	2	
1	6	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dafduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	12	2	
1	6	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran kependudukan	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provins	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dafduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	12	2	
1	6	27	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran kependudukan	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dafduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	12	2	
1	6	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan Capil			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian Capil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	12	2	
1	6	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian Capil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	12	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah dokumen Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian Capil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	12	2	
1	6	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian Capil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	12	2	
1	6	27	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian Capil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	3	12	2	
1	6	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan Capil			Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Admnduk kab/kota yang tertata	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi	Jumlah Tata cara P3EP admnduk	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Admnduk kab/kota yang tertata	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Admnduk kab/kota yang tertata	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	12	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan Capil			Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase fasilitasi layanan bidang capil kab/kota	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi penyelenggaraan urusan adminduk	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen Penyelenggaraan Data Kependudukan	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	4	12	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan sistem adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	4	12	2	
1	6	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan Capil			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	4	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	4	12	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase penyelenggaraan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase capaian PIAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	3	4	12	2	
1	6	27		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan Capil			Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Dokumen Data Kependudukan Provinsi	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	12	2	
1	6	27	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengelola data kependudukan dan capil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Data Profil Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	5	12	2	
1	6	23		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	6	6	1	
1	6	15		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	5	6	1	
1	6	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Bagi Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan	Kegiatan Pemberdayaan KUBE Pengembangan bagi Fakir Miskin Pesisir dan daerah tertinggal	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melakukan verivali data FM	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	5	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	15	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Bagi Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan	Kegiatan Pemberdayaan KUBE Pengembangan bagi Fakir Miskin Pesisir dan daerah tertinggal	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	5	6	1
1	6	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Bagi Fakir Miskin di Daerah Pedesaan dan Daerah Tertinggal	Kegiatan Pemberdayaan KUBE Pengembangan bagi Fakir Miskin Perdesaan	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melakukan verivali data FM	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	5	6	1
1	6	15	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Daerah Pedesaan dan Daerah Tertinggal	Kegiatan Pemberdayaan KUBE Pengembangan bagi Fakir Miskin Perdesaan	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	5	6	1
1	6	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan	Kegiatan Pemberdayaan KUBE Pengembangan bagi Fakir Miskin Perkotaan	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melakukan verivali data FM	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	5	6	1
1	6	15	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan	Kegiatan Pemberdayaan KUBE Pengembangan bagi Fakir Miskin Perkotaan	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	5	6	1
1	6	21		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	7	6	1
1	6	21	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	Mewujudkan esensi kesetiakawanan sosial	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang akan di rehabilitasi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	7	6	1
1	6	21	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	Mewujudkan esensi kesetiakawanan sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang akan di Pemeliharaan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	7	6	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	21	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	Mewujudkan esensi kesetiakawanan sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah petugas Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	7	6	1	
1	6	21		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	6	1	
1	6	21	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	Meningkatkan peran lembaga sosial guna mendorong pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	2	2	6	1	
1	6	21	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	Meningkatkan peran lembaga sosial guna mendorong pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dokumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	2	6	1	
1	6	21	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	Meningkatkan peran orsos guna mendorong pembedayaan lembaga sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dokumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	2	6	1	
1	6	21	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Peksos yang diptimalkan dalam penyelenggaraan kessos	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dokumen Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	2	6	1	
1	6	21	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Peksos yang diptimalkan dalam penyelenggaraan kessos	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	2	2	6	1	
1	6	21	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan program yang efektif	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	2	2	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	21		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	6	1	
1	6	21	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dunia usaha dalam mendukung program CSR	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Pengasuhan	jumlah Pengasuhan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Penyediaan Makanan	Jumlah Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang disediakan bagi WBS	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Jumlah Paket Kesehatan yang diadakan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Dokumentasi Kependudukan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Keluarga yang di telusuri	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	2	4	6	1	
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	2	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah Pemulasaran (20 org)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	2	4	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Sosialisasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	5	6	1	
1	6	24	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat pelayanan	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Dokumen Pengangkatan Anak antar WNI	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Sosialisasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	5	6	1	
1	6	24	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembinaan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat pelayanan	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Dokumen Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Sosialisasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	5	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	6	6	1	
1	6	24	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Tanggap Darurat	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Penyediaan Permakananan	Jumlah Permakananan/buffer stock	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	6	6	1	
1	6	24	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Tanggap Darurat	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	6	6	1	
1	6	24	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Tanggap Darurat	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	6	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Tanggap Darurat	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Sosialisasi tentang Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	6	6	1	
1	6	24	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Tanggap Darurat	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	jummlsh Sosialisasi layananan Dukungan Psikososial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	6	6	1	
1	6	24	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah lokasi tanggap bencana yang dipersiapkan	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	6	6	1	
1	6	24	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah lokasi tanggap bencana yang dipersiapkan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Sosialisasi tentang Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	6	6	1	
1	6	24	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah lokasi tanggap bencana yang dipersiapkan	Pelayanan Dukungan Psikososial	jummlsh Sosialisasi layananan Dukungan Psikososial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	6	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara KTK yang dilayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	3	6	1	
1	6	24	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan PMBS) yang dipulangkan ke daerah asal	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Dokumen Penyusunan Kajian Resiko mitigasi Bencana Provinsi	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen Pemetaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	24	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan PMBS) yang dipulangkan ke daerah asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dipulangkan Ke Kabupaten/Kota Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara KTK yang dilayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	6	1
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen Pemetaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	3	5	1
1	6	24	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan PMBS) yang dipulangkan ke daerah asal	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Dokumen Penyusunan Kajian Resiko mitigasi Bencana Provinsi	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen Pemetaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	5	1
1	6	24	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan PMBS) yang dipulangkan ke daerah asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dipulangkan Ke Kabupaten/Kota Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara KTK yang dilayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	3	6	1
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	3	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial (Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan PMBS) yang dipulangkan ke daerah asal	Penanganan Pascabencana	Dokumen Penanganan Pascabencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	dokumen sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	3	5	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi WBS (30 jiwa)	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang disediakan bagi WBS	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Jumlah Perbekalan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	4	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran Surat Nikah dan/atau Identitas Anak	Jumlah Dokumentasi Kependudukan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	4	6	1	
1	6	24	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Gepeng dalam Pant	Jumlah Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam pant	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah WBS yang dipulangkan ke daerah asal	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	4	4	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu untuk klien	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Sosialisasi Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penelusuran layananan bagi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	1	4	6	1	
1	6	24	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental dalam Pant	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah layananan Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	1	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pemberdayaan,Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	Jumlah PACA yang memperoleh pemberdayaan	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Sosialisasi Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	1	4	6	1	
1	6	24	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pemberdayaan,Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	Jumlah PACA yang memperoleh pemberdayaan	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	1	4	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi WBS	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang disediakan bagi WBS	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Fasilitas yang mudah diakses	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah Paket Kesehatan yang diadakan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	3	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang dilaksanakan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Ketrampilan yang diberikan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Dokumentasi Kependudukan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Keluarga yang di telusuri	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	4	6	1	
1	6	24	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar dalam Panti	Jumlah lansia terlantar yang memerlukan perlindungan	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaran (20 org)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	4	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	2	6	1	
1	6	24	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan KOMDA Lansia Provinsi Jambi	Jumlah Komite yang menyelenggarakan kessos bagi Lansia	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dokumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provins	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	2	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	5	6	1	
1	6	24	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial (PBI-Jamkes)	Jumlah FM yang diverifikasi	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melakukan verivali data FM	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data FM Cakupan Daerah Provinsi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan bencana di provinsi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	5	6	1	
1	6	24		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pembinaan, Perlindungan, Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		5	4	6	1	
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Panti	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	5	4	6	1	
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Panti	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	5	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Dokumen Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	5	4	6	1	
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	5	4	6	1	
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	jumlah dokumen Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	5	4	6	1	
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	jumlah dokumen Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	5	4	6	1	
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	jumlah dokumen Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	5	4	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran Surat Nikah dan/atau Identitas Anak	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran Surat Nikah dan/atau Identitas Anak	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	5	4	6	1
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	5	4	6	1
1	6	24	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Eks Tuna Sosial dalam Pant	Jumlah wanita penyandang Eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	Pemulangan ke Daerah Asal	jumlah Pemulangan ke Daerah Asal	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	Jumlah Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pant	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	5	4	6	1
1	6	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	6	1
1	6	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	6	1
1	6	2	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	3	1	6	1
1	6	2	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	6	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	2	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	6	1	
1	6	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	27	3	1	6	1	
1	6	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	28	3	1	6	1	
1	6	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	6	1	
1	6	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	3	1	6	1	
1	6	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	30	3	1	6	1	
1	6	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	6	1	
1	6	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	32	3	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	1	6	1	
1	6	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	34	3	1	6	1	
1	6	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	35	3	1	6	1	
1	6	2	28	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	36	3	1	6	1	
1	6	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	37	3	1	6	1	
1	6	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	38	3	1	6	1	
1	6	2	42	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	39	3	1	6	1	
1	6	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Baju Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	6	1	
1	6	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Baju Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	4	1	6	1	
1	6	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Korpri	Baju Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	4	1	6	1	
1	6	3	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan Pakaian Batik Jambi		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	4	1	6	1	
1	6	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	6	1	
1	6	5	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	4	1	6	1	
1	6	5	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		Pendidikan dan Pelatihan Formal	DOKUMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	6	1	
1	6	5	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	4	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	5	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti bintek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DOKUMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	6	1	
1	6	5	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Fasilitasi Jabatan Fungsional, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		Pendidikan dan Pelatihan Formal	DOKUMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	6	1	
1	6	5	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Fasilitasi Jabatan Fungsional, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	4	1	6	1	
1	6	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	1	6	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Dokumen Rencana Kerja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	1	1	6	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyusunan Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	1	1	6	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	10	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	1	1	6	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	1	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	5	1	1	6	1	
1	6	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	6	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	1	6	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	2	1	6	1	
1	6	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	6	1	
1	6	2	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	DOKUMEN PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	4	1	6	1	
1	6	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	6	1	
1	6	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelolaan keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelolaan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan?/emester	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	6	1
1	6	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelolaan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	6	1

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan /Jasa Perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	6	1	
1	6	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	5	1	
1	6	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	6	1	
1	6	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	6	1	
1	6	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dengan Lancar	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dengan Lancar	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	6	1	
1	6	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	6	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat - alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat - alat tulis kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	6	1	
1	6	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk administrasi kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk administrasi kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	6	1	
1	6	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen pengadaan alat listrik dan pemasangan instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen pengadaan alat listrik dan pemasangan instalasi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	6	1	
1	6	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ buletin	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ buletin	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	5	1	
1	6	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	5	1	
1	6	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	5	1	
1	6	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Jumlah Peserta/Aparatur BPBD yang mengikuti Rakor yang terlatih dalam			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	4	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	32		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Pasca Bencana	Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	3	5	1
1	6	32	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosek di Wilayah Pasca Bencana	Tersosialisasinya pemulihan dan peningkatan sektor sosial ekonomi di wilayah pascabencana	Penanganan Pascabencana	Tersosialisasinya pemulihan dan peningkatan sektor sosial ekonomi di wilayah pascabencana Terkordinasi pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana Terciptanya aparatur yang handal dalam pengkajian kebutuhan pascabencana Buku monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR di wilayah pasca bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	3	5	1
1	6	32	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Fisik di Wilayah Pasca Bencana	Terkordinasi pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana	Penanganan Pascabencana	Tersosialisasinya pemulihan dan peningkatan sektor sosial ekonomi di wilayah pascabencana Terkordinasi pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana Terciptanya aparatur yang handal dalam pengkajian kebutuhan pascabencana Buku monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR di wilayah pasca bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	3	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	32	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Bintek Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Terciptanya aparatur yang handal dalam pengkajian kebutuhan pascabencana	Penanganan Pascabencana	Tersosialisasinya pemulihan dan peningkatan sektor sosial ekonomi di wilayah pascabencana Terkordinasi pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana Terciptanya aparatur yang handal dalam pengkajian kebutuhan pascabencana Buku monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR di wilayah pasca bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	3	5	1
1	6	32	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rehab Rekon Wilayah Pascabencana di Provinsi Jambi	Buku monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR di wilayah pasca bencana	Penanganan Pascabencana	Tersosialisasinya pemulihan dan peningkatan sektor sosial ekonomi di wilayah pascabencana Terkordinasi pemulihan dan peningkatan bidang fisik di wilayah pasca bencana Terciptanya aparatur yang handal dalam pengkajian kebutuhan pascabencana Buku monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR di wilayah pasca bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	2	3	5	1
1	6	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan /Jasa Perkantoran			Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	5	1
1	6	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	1	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	3	1	6	1	
1	6	1	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Terlaksananya Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	1	6	1	
1	6	1	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dengan Lancar	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Dengan Lancar	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	7	3	1	6	1	
1	6	1	8	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	3	1	6	1	
1	6	1	10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat - alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat - alat tulis kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	10	3	1	6	1	
1	6	1	11	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk administrasi kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan untuk administrasi kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	11	3	1	6	1	
1	6	1	12	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen pengadaan alat listrik dan pemasangan instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen pengadaan alat listrik dan pemasangan instalasi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	12	3	1	6	1	
1	6	1	15	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ buletin	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ buletin	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	15	3	1	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	1	17	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	17	3	1	5	1
1	6	1	18	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	18	3	1	5	1
1	6	2		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sasaran Prasarana Perkantoran			Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	1	5	1
1	6	2	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	21	3	1	5	1
1	6	2	9	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	25	3	1	5	1
1	6	2	22	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor BPBD Provinsi Jambi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor BPBD Provinsi Jambi	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	29	3	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	6	2	24	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	31	3	1	5	1
1	6	2	26	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung BPBD Provinsi Jambi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung BPBD Provinsi Jambi	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	33	3	1	5	1
1	6	2	43	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	40	3	1	5	1
1	6	2	44	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	Administrasi Umum	aaaa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	41	3	1	5	1
1	6	3		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai Kantor			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	5	1
1	6	3	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	1	5	1

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	5		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur BPBD yang dilatih dalam diklat			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	1	5	1	
1	6	5	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningktan SDM Bagi Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningktan SDM Bagi Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	9	4	1	5	1	
1	6	6		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja BPBD			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	1	5	1	
1	6	6	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kegiatan BPBD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kegiatan BPBD	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	aaaa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	1	5	1	
1	6	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Jumlah Peserta/Aparatur BPBD yang mengikuti Rakor yang terlatih dalam			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	3	5	1	
1	6	28	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Se- Provinsi Jambi	Tersosialisasinya Program Kegiatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersosialisasinya Program Kegiatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi Terlaksananya kegiatan pengembangan SIM data kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	3	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Jumlah Peserta/Aparatur BPBD yang mengikuti Rakor yang terlatih dalam			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	3	5	1	
1	6	28	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Terselenggaranya Kegiatan latihan gabungan penyelamatan evaluasi dan penanganan pengungsi	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terselenggaranya Kegiatan latihan gabungan penyelamatan evaluasi dan penanganan pengungsi	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	3	3	3	5	1	
1	6	28	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terselenggaranya kegiatan pengerahan personil ke lokasi bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	3	5	1	
1	6	28		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Jumlah Peserta/Aparatur BPBD yang mengikuti Rakor yang terlatih dalam			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	3	5	1	
1	6	28	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan BinteK Pemantapan TRC (Tim Reaksi Cepat)	Terselenggaranya Kegiatan Pemantapan TRC (Tim Reaksi Cepat)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Pemantapan TRC (Tim Reaksi Cepat) Terlatihnya SDM pengelolaan peralatan logistik penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	2	3	5	1	
1	6	28	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan BinteK Pengelolaan Peralatan dan Logistik PB	Terlatihnya SDM pengelolaan peralatan logistik penanggulangan bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Pemantapan TRC (Tim Reaksi Cepat) Terlatihnya SDM pengelolaan peralatan logistik penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	8	2	3	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	29		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Pra Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemerintah dalam Menghadapi Resiko Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	5	1	
1	6	29	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pemberdayaan Desa Tangguh	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan masyarakat/ Desa Tangguh bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan masyarakat/ Desa Tangguh bencana Terbentuknya Sekolah Siaga Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	3	5	1	
1	6	29	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya pemberdayaan relawan penanggulangan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terselenggaranya pemberdayaan relawan penanggulangan bencana Terkonsolidasinya hubungan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	5	1	
1	6	29	3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Konsolidasi dan Kemitraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Dunia Usaha	Terkonsolidasinya hubungan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terselenggaranya pemberdayaan relawan penanggulangan bencana Terkonsolidasinya hubungan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	5	1	
1	6	29	4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pengaktifaan Posko Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Posko Penanggulangan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terbentuknya Posko Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	29	5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Terbentuknya Sekolah Siaga Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan masyarakat/ Desa Tangguh bencana Terbentuknya Sekolah Siaga Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	6	2	3	5	1	
1	6	29	6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya rapat teknis kesiapsiagaan bagi aparatur peerintah dan masyarakat	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya rapat teknis kesiapsiagaan bagi aparatur peerintah dan masyarakat Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	3	5	1	
1	6	29	7	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana	Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya rapat teknis kesiapsiagaan bagi aparatur peerintah dan masyarakat Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1	2	3	5	1	
1	6	29		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Pra Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemerintah dalam Menghadapi Resiko Bencana			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		1	3	5	1	
1	6	30		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Saat Bencana	Jumlah Daerah dan Korban Bencana yang tertangani			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		4	3	5	1	
1	6	30	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Peningkatan pengembangan SIM Data Kebencanaan	Terlaksananya kegiatan pengembangan SIM data kebencanaan	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersosialisasinya Program Kegiatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jambi Terlaksananya kegiatan pengembangan SIM data kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	4	3	5	1	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	6	30		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Saat Bencana	Jumlah Daerah dan Korban Bencana yang tertangani			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	3	5	1	
1	6	30	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Pengerahan Personil ke Lokasi Bencana	Terselenggaranya kegiatan pengerahan personil ke lokasi bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terselenggaranya kegiatan pengerahan personil ke lokasi bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2	3	3	5	1	
1	6	31		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		3	3	5	1	
1	6	31	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi logistik untuk daerah rawan bencana	Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya fasilitasi logistik untuk daerah rawan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	3	3	5	1	
1	6	31		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR		2	3	5	1	
1	6	31	2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Peralatan	Terlaksananya fasilitasi peralatan untuk daerah rawan bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya fasilitasi peralatan untuk daerah rawan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	4	2	3	5	1	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	6	7	2	
2	1	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan yang diberikan			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	6	7	2	
2	1	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan yang diberikan			Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	7	2	
2	1	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	7	2	
2	1	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah administrasi pengelolaan keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah administrasi pengelolaan keuangan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	7	2	
2	1	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	7	2	
2	1	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang disediakan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	7	2	
2	1	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penggandaan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	7	2	
2	1	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	7	2	
2	1	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makan -minum rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan -minum rapat	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	7	2	
2	1	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	7	2	
2	1	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan prasarana yang disediakan			Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	7	2	
2	1	2	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah jabatan kepala dinas yang di bangun	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rumah jabatan kepala dinas yang di bangun Jumlah gedung kantor yang direhap	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	7	2	
2	1	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 eselon 4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 eselon 4	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	7	2	
2	1	2	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	2	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	3	1	7	2	
2	1	2	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	7	2	
2	1	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah peralatan yang di rawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang di rawat	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	7	2	
2	1	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	7	2	
2	1	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dirawat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang dirawat	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	7	2	
2	1	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhap	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rumah jabatan kepala dinas yang di bangun Jumlah gedung kantor yang direhap	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin PNS			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin PNS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	7	2	
2	1	3	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian PDH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin PNS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	7	2	
2	1	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Penigkatan SDM			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin PNS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	7	2	
2	1	5	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah PNS Yang mengikuti bimtek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS Yang mengikuti bimtek Peningkatan Pembinaan Jasmani dan Rohani	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin PNS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	7	2	
2	1	5	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pembinaan Jasmani Dan Rohani Aparatur	Peningkatan Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS Yang mengikuti bimtek Peningkatan Pembinaan Jasmani dan Rohani	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Disiplin PNS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	7	2	
2	1	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan			Administrasi Keuangan	Persentase Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	6	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyusunan Laporan Rutin Program,Laporan Perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan laporan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Administrasi Keuangan	Persentase Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	7	2	
2	1	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	7	2	
2	1	6	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyusunan Laporan Rutin Program,Laporan Perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan laporan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Laporan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	7	2	
2	1	6	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyusunan Laporan Rutin Program,Laporan Perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan laporan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Laporan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	7	2	
2	1	6	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyusunan Laporan Rutin Program,Laporan Perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan laporan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan yang diberikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	7	2	
2	1	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Mobile Training Unit/MTU)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas jumlah calon peserta magang yang diseleksi Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi (PBK)	jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas jumlah calon peserta magang yang diseleksi Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pelatihan kewirausahaan produktif	Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas jumlah calon peserta magang yang diseleksi Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas jumlah calon peserta magang yang diseleksi Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pemagangan dalam dan luar negeri dan seleksi	jumlah calon peserta magang yang diseleksi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas jumlah calon peserta magang yang diseleksi Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang ke luar negeri	Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas jumlah calon peserta magang yang diseleksi Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	7	2
2	1	15	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	7	2
2	1	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	3	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	15	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	sertifikasi kompetensi bagi lulusan Lembaga Pelatihan (BLK dan LPKS)	Jumlah instruktur,peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah instruktur,peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	3	7	2
2	1	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan			Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	7	2
2	1	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan Padat Karya Infrastruktur	Jumlah WUB yang dibentuk	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah WUB yang dibentuk jumlah masyarakat yang menggunakan TTG	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	7	2
2	1	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah Dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi Jumlah Peserta yang melakukan Rakornis	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	16	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal	Jumlah Dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah Dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi Jumlah Peserta yang melakukan Rakornis	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	7	2
2	1	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penempatan tenaga kerja	jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah Dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi Jumlah Peserta yang melakukan Rakornis	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	7	2
2	1	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)	jumlah masyarakat yang menggunakan TTG	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah WUB yang dibentuk jumlah masyarakat yang menggunakan TTG	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	16	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	rakornis program penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah Peserta yang melakukan Rakornis	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal))	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah Dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi Jumlah Peserta yang melakukan Rakornis	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	7	2	
2	1	16	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	pendayagunaan tenaga kerja sarjana (TKS)	Jumlah TKS Yang didayagunakan	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah TKS Yang didayagunakan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	7	2	
2	1	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4	4	7	2
2	1	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia	jumlah CTKI Yang diberikan penyuluhan	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah CTKI Yang diberikan penyuluhan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1		4	4	7	2
2	1	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1	6	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	17	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Sosialisasi K3 dan Penilaian Penghargaan K3		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	jumlah permasalahan yang diselesaikan Jumlah surat menyurat yang dikelola Jumlah peserta yang diberikan pelatihan ahli K3 Umum jumlah titik pengujian	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	6	7	2	
2	1	17	23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengawasan Pekerja Anak	Jumlah Anak yang di awasi di lingkungan Perusahaan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Anak yang di awasi di lingkungan Perusahaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	7	2	
2	1	17	25	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Per Undang-Undangan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	6	7	2	
2	1	17	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penegakan Hukum/Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Anak yang di awasi di lingkungan Perusahaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	7	2	
2	1	17	30	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum	Jumlah peserta yang diberikan pelatihan ahli K3 Umum	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	jumlah permasalahan yang diselesaikan Jumlah surat menyurat yang dikelola Jumlah peserta yang diberikan pelatihan ahli K3 Umum jumlah titik pengujian	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	6	7	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	17	31	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengujian Lingkungan Kerja	jumlah titik pengujian	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	jumlah permasalahan yang diselesaikan Jumlah surat menyurat yang dikelola Jumlah peserta yang diberikan pelatihan ahli K3 Umum jumlah titik pengujian	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	6	7	2
2	1	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	5	7	2
2	1	17	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penetapan UMP Tahunan	Jumlah peserta yang melakukan pembahasan UMP	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah peserta yang melakukan pembahasan UMP	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	5	7	2
2	1	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	5	7	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	1	17	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit	jumlah lembaga kerja tripartit	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	jumlah lembaga kerja tripartit	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	5	7	2
2	1	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	7	2
2	1	17	29	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Pembinaan Hubungan Industrial, UMP dan BPJS di Perusahaan di Kab/Kota		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma - Norma Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	7	2
3	8	15		Urusan Pilihan	Transmigrasi	-				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	32	3
3	8	15		Urusan Pilihan	Transmigrasi	-				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	32	3
3	8	15		Urusan Pilihan	Transmigrasi	-				Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	32	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	32	3	
2	1	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	penanganan permasalahan lokasi transmigrasi	jumlah permasalahan yang diselesaikan	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	jumlah permasalahan yang diselesaikan Jumlah lokasi trasmnigrasi Jumlah dokumen hasil monitoring	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	32	3	
2	1	18	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	monitoring pembangunan pemukiman dan STP dan pendaftaran dan seleksi TPS	Jumlah lokasi trasmnigrasi	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	jumlah permasalahan yang diselesaikan Jumlah lokasi trasmnigrasi Jumlah dokumen hasil monitoring	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	32	3	
2	1	18	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Monev Program dan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan pembangunan wilayah Trasmigrasi	Jumlah dokumen hasil monitoring	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	jumlah permasalahan yang diselesaikan Jumlah lokasi trasmnigrasi Jumlah dokumen hasil monitoring	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	32	3	
2	1	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	32	3	
2	1	18	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	publikasi melalui informasi potensi lokasi dan kerjasama antar daerah	jumlah publikasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah publikasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	32	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	1	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi Penempatan			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	32	3	
2	1	18	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	penyiapan areal transmigrasi	Jumlah calon lokasi yang dicadangkan	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah calon lokasi yang dicadangkan	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	2	32	3	
2	1	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Pelaporan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Pelaporan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	7	2	
2	1	6	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Penyediaan Data Bidang Nakertrans dalam rangka Pemenuhan SIPD	Data- Data Nakertrans terpenuhi	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Data- Data Nakertrans terpenuhi	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Pelaporan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Pelaporan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	7	2	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	14	2	
2	2	19	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Kampung KB	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kampung KB	Pemetaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kampung KB	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	14	2	
2	2	19	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Buku Data Kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	2	14	2	
2	2	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	4	14	2	
2	2	19	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Kampung KB	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kampung KB	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kampung KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	4	14	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)			Pengembangan Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	14	2	
2	2	19	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi BKR	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta yang mengikut sosialisasi BKR	Pengembangan Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	1	3	14	2	
2	2	19	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Momentum Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah peserta yang mengikuti HARGANAS	Pengembangan Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	14	2	
2	2	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	14	2	
2	2	19	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Workshop Pendidikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pendidikan Program KKBPK	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pendidikan Program KKBPK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	14	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	19	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Advokasi Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	1	2	14	2	
2	2	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang telah diberi bimtek RPJMDES dan Pengelolaan Keuangan (%)			Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	13	2	

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
2		2	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2		
							Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa															
							Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota															
							Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan			Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi															
							Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa															
							Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa															
							Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen															
							Jumlah peserta pembinaan peserta rakor															
							persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa															
							Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS															
							Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu															

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan Pemberdayaan Nilai Nilai Kegotongroyongan, Adat daerah dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pemberdayaan nilai nilai kegotongroyongan , adat daerah, dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	13	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2		2	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2		2	20	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2		2	20	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Pedesaan	Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2		2	20	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjandal posyandu			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2		2	20	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kapasitas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjandal posyandu				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2		2	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bimtek Penyusunan Profil Desa	Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2		2	20	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan Aparatur Pemdes dalam bidang Manajemen Pemdes	Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2		2	20	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	Jumlah peserta pembinaan peserta rakor	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjandal posyandu				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2		2	20	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa	persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	8	2	
2	2	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	8	2	
2	2	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	8	2	
2	2	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	8	2	
2	2	1	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	1	8	2	
2	2	1	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	3	1	8	2	
2	2	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	8	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan jasa kebersihan kantor	periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	8	2	
2	2	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	8	2	
2	2	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang dan cetakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang dan cetakan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	8	2	
2	2	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	8	2	
2	2	1	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	8	2	
2	2	1	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	3	1	8	2	
2	2	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	8	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	2	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah peserta rapat/tamu dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah peserta rapat/tamu dll	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	8	2
2	2	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	8	2
2	2	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	8	2
2	2	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	8	2
2	2	2	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	8	2
2	2	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	8	2
2	2	2	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeler	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeler	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	3	1	8	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	8	2	
2	2	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	8	2	
2	2	2	30	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33	3	1	8	2	
2	2	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	8	2	
2	2	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	8	2	
2	2	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	8	2	
2	2	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	8	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	2	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	8	2
2	2	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Sakip			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	8	2
2	2	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan, evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan, evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	8	2
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak lintas Kab/kota			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	8	2
2	2	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	8	2
2	2	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG Jumlah data terpilah gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	8	2
2	2	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG Jumlah data terpilah gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	8	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	16	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah data terpilah gender	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang mengikuti forum anak Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG Jumlah data terpilah gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	8	2	
2	2	16	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	8	2	
2	2	16	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bintek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah peserta bimtek PPGR dan Vokal Point di SKPD	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bimtek PPGR dan Vokal Point di SKPD	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	8	2	
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan Perempuan dan anak lintas Kab/kota			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	8	2	
2	2	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Persentase Operasional P2TP2A	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Operasional P2TP2A Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT Jumlah pelatih pendampingan KDRT	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	8	2	
2	2	16	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Operasional P2TP2A Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT Jumlah pelatih pendampingan KDRT	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	8	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	16	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah pelatih pendampingan KDRT	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Operasional P2TP2A Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT Jumlah pelatih pendampingan KDRT	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	8	2	
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan Perempuan dan anak lintas Kab/kota			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	3	8	2	
2	2	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah peserta pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	3	8	2	
2	2	16	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	8	2	
2	2	16	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan dan Pendampingan korban kekerasan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	3	8	2	
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan Perempuan dan anak lintas Kab/kota			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	8	2	
2	2	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti pengetahuan masyarakat tentang ketahan keluarga	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti pengetahuan masyarakat tentang ketahan keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	2	8	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	2	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti pengetahuan masyarakat tentang ketahan keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	2	8	2
2	2	16	23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	2	8	2
2	2	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Penurunan Desa Tertinggal di Provinsi Jambi (%) Persentase peningkatan Desa Mandiri di Provinsi Jambi (%)			Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	13	2
2	2	21	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	Kelompok Posyantek TTG di Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kelompok Posyantek TTG di Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2		2	21	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintahan desa Jumlah peserta aparaturnya desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanel posyandu		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	21	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes	Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek Pengautan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek Pengautan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	5	13	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2		2	21	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kab/kota dengan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang pengelolaan keuangan desa Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten kota Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba desa dan kelurahan di Provinsi Jambi Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintah desa Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen Jumlah peserta pembinaan peserta rakor persentase penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS Jumlah kelompok peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanal posyandu	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	13	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	2	21	7		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan kelembagaan Komda Lansia dan posyandu Lansia	Jumlah kab/Kota dalam peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah kab/Kota dalam peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu lansia dan komda lansia	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	5	13	2
2	2	21	9		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pameran Hasil Karya di Bidang Pembangunan/Jambore	Jumlah anak yang mengikuti jambore untuk pengembangan tumbuh kembang anak	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kelompok Posyantek TTG di Kecamatan Jumlah anak yang mengikuti jambore untuk pengembangan tumbuh kembang anak	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	5	13	2
2	2	16			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan Perempuan dan anak lintas Kab/kota			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	8	2
2	2	16	11		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Pendidikan Politik perempuan	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	8	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	2	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	8	2
2	2	16	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bimtek Pendidikan Politik Perempuan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	8	2
2	2	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Penurunan Desa Tertinggal di Provinsi Jambi (%) Persentase peningkatan Desa Mandiri di Provinsi Jambi (%)			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung ***)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	13	2
2	2	21	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah kelompok yang di latih	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat Bagi Ibu PKK di kampung ***)	Jumlah kelompok yang di latih	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung ***)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	7	13	2
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan Perempuan dan anak lintas Kab/kota			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	4	8	2
2	2	16	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan	Jumlah peserta yang memahami tentang pola asuh anak dalam keluarga	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang memahami tentang pola asuh anak dalam keluarga Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan KLA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	4	8	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	2	16	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan KLA	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang memahami tentang pola asuh anak dalam keluarga Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan KLA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	4	8	2
2	2	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Penurunan Desa Tertinggal di Provinsi Jambi (%) Persentase peningkatan Desa Mandiri di Provinsi Jambi (%)			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung ***)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	7	13	2
2	2	21	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan dan penguatan Sarana dan Prasarana Pamsimas	Jumlah Kab/Kota yang memberdayakan sarana dan prasarana Pamsimas	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi ***)	Jumlah Kab/Kota yang memberdayakan sarana dan prasarana Pamsimas	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung ***)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	4	7	13	2
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan Perempuan dan anak lintas Kab/kota			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	8	2
2	2	16	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	8	2
2	2	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Penurunan Desa Tertinggal di Provinsi Jambi (%) Persentase peningkatan Desa Mandiri di Provinsi Jambi (%)			Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD ***)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5	7	13	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	2	21	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Pendampingan di Pedesaan	Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS	Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah ***)	Jumlah Kab/Kota yang terbina dan mengikuti Penilaian P2WKSS	Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD ***)		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	7	13	2	
2	2	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak lintas Kab/kota			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	6	8	2	
2	2	16	21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bimtek Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	6	8	2	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Ketahanan Pangan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	9	2
2	3	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar Tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Tahun	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	9	2
2	3	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Pembayaran Rekening Tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening Tahun	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	9	2
2	3	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Tahun	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Tahun	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	9	2
2	3	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Pembayaran Jasa Kebersihan Gedung Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode Pembayaran Jasa Kebersihan Gedung Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	9	2
2	3	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Pembayaran Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Pembayaran Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	9	2
2	3	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Lsitrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Lsitrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	9	2
2	3	1	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	9	2
2	3	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	9	2
2	3	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum Peserta Rapat/Tamu/dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Peserta Rapat/Tamu/dll	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	9	2
2	3	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	9	2
2	3	2	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	3	1	9	2
2	3	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengadaan peralatan gedung kantor		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	9	2
2	3	2	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengadaan mebeleur		Pengadaan Mebeleur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	3	1	9	2
2	3	2	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengadaan Komputer		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	2	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengadaan Komputer		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	9	2
2	3	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	9	2
2	3	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	9	2
2	3	2	26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33	3	1	9	2
2	3	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	9	2
2	3	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	9	2
2	3	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	9	2
2	3	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	9	2
2	3	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pendidikan dan pelatihan formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	9	2
2	3	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	9	2
2	3	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Tahunan	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	2	1	9	2
2	3	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	9	2
2	3	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	9	2
2	3	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	2	1	9	2
2	3	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	9	2	
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan													
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah													
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras													
							Ketersediaan Energi													
							Ketersediaan Protein													
							Skor PPH Ketersediaan													
							Konsumsi Energi													
							Konsumsi Protein													
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan													
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan													
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)													
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)													
Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan																				
2	3	18	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan Database/ Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Sumber Daya Pangan	Hasil Analisis Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	9	2
2	3	18	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Pemberdayaan Cadangan Pangan Pokok dan Pangan Strategis Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	9	2
2	3	18	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Pemberdayaan Cadangan Pangan Pokok dan Pangan Strategis Pemerintah Daerah	Koordinasi Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	9	2
2	3	18	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Pemberdayaan Cadangan Pangan Pokok dan Pangan Strategis Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	9	2
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan													
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah													
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras													
							Ketersediaan Energi													
							Ketersediaan Protein													
							Skor PPH Ketersediaan													
							Konsumsi Energi													
							Konsumsi Protein													
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan													
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan													
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)													
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)													
							Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	3	18	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyusunan Database/ Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	9	2	
2	3	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Koordinasi Ketahanan Pangan	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	9	2	
2	3	18	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Hasil Analisis Ketersediaan Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	9	2	
2	3	18	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Strategis	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	9	2	
2	3	18	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Strategis	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	9	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	9	2
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan												
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah												
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras												
							Ketersediaan Energi												
							Ketersediaan Protein												
							Skor PPH Ketersediaan												
							Konsumsi Energi												
							Konsumsi Protein												
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan												
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan												
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)												
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)												
							Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Sumber Daya Pangan	Hasil Analisis Ketersediaan Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	9	2
2	3	18	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Hasil Analisis Ketersediaan Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	9	2
2	3	18	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Hasil Analisis Ketersediaan Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	9	2
2	3	18	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Strategis	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan	Pengembangan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Strategis	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	9	2	
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan													
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah													
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras													
							Ketersediaan Energi													
							Ketersediaan Protein													
							Skor PPH Ketersediaan													
							Konsumsi Energi													
							Konsumsi Protein													
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan													
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan													
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)													
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)													
Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan																				
2	3	18	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Hasil Pemantauan Harga Pangan Pokok/Strtegis pada Hari-hari Besar Keagamaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	9	2
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan												
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah												
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras												
							Ketersediaan Energi												
							Ketersediaan Protein												
							Skor PPH Ketersediaan												
							Konsumsi Energi												
							Konsumsi Protein												
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan												
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan												
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)												
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)												
							Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan												
2	3	18	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	Diketahuinya Daerah-daerah Rawan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	9	2
							Intervensi Daerah Rawan Pangan berdasarkan Data FSVA dan SKPG												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	3	18	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	Diketahuinya Daerah-daerah Rawan Pangan Intervensi Daerah Rawan Pangan berdasarkan Data FSVA dan SKPG	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	4	9	2	
2	3	18	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Hasil Analisis Ketersediaan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	9	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	9	2
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan												
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah												
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras												
							Ketersediaan Energi												
							Ketersediaan Protein												
							Skor PPH Ketersediaan												
							Konsumsi Energi												
							Konsumsi Protein												
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan												
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan												
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)												
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)												
							Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Hasil Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk Terselenggaranya Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Regional Diperolehnya Pemenang Lomba Ketahanan Pangan di Tingkat Nasional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	3	9	2
2	3	18	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader Pangan B2SA yang dilatih Terlaksananya Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Nasional dan Provinsi Tersedianya Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	3	9	2
2	3	18	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader Pangan B2SA yang dilatih Terlaksananya Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Nasional dan Provinsi Tersedianya Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader Pangan B2SA yang dilatih Terlaksananya Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Nasional dan Provinsi Tersedianya Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	3	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	9	2	
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan													
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah													
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras													
							Ketersediaan Energi													
							Ketersediaan Protein													
							Skor PPH Ketersediaan													
							Konsumsi Energi													
							Konsumsi Protein													
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan													
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan													
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)													
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)													
							Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan													
2	3	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	Hasil Analisis, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	9	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	3	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	Hasil Analisis, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	9	2	
2	3	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program	Terlaksananya Musrenbang Ketahanan Pangan dan Sinkronisasi Operasional Kegiatan Ketahanan Pangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	9	2	
2	3	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program	Terlaksananya Musrenbang Ketahanan Pangan dan Sinkronisasi Operasional Kegiatan Ketahanan Pangan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	9	2	
2	3	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program	Terlaksananya Musrenbang Ketahanan Pangan dan Sinkronisasi Operasional Kegiatan Ketahanan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	9	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	9	2	
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan													
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah													
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras													
							Ketersediaan Energi													
							Ketersediaan Protein													
							Skor PPH Ketersediaan													
							Konsumsi Energi													
							Konsumsi Protein													
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan													
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan													
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)													
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)													
Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan																				
2	3	18	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	Diketahuinya Daerah-daerah Rawan Pangan	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	9	2
							Intervensi Daerah Rawan Pangan berdasarkan Data FSVA dan SKPG													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	9	2
							Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan													
							Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah													
							Menurunnya Tingkat Konsumsi Beras													
							Ketersediaan Energi													
							Ketersediaan Protein													
							Skor PPH Ketersediaan													
							Konsumsi Energi													
							Konsumsi Protein													
							Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan													
							Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan													
							Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)													
							Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)													
							Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	3	18	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Tersedianya Bahan Penanganan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Penguatan Kelembagaan Penanganan Keamanan Pangan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	5	9	2	
2	3	18	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Tersedianya Bahan Penanganan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Penguatan Kelembagaan Penanganan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	5	9	2	
2	3	18	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Operasional Kelembagaan UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	5	9	2	
2	3	18	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Operasional Kelembagaan UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	9	2	
2	3	18	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Operasional Kelembagaan UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	5	9	2	
2	3	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	9	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	3	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	1	9	2
2	3	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	1	9	2
2	3	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	9	2
2	3	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Administrasi Keuangan Pertahun	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	9	2

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	11	2
2	5	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	11	2
2	5	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketersediaan sarana listrik, telpon dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan sarana listrik, telpon dan air	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	11	2
2	5	1	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran izin/pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran izin/pajak	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	3	1	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	5	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur yang melayani administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aparatur yang melayani administrasi keuangan	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	11	2	
2	5	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	11	2	
2	5	1	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	3	1	11	2	
2	5	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	11	2	
2	5	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	11	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	5	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untuk penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untuk penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	11	2	
2	5	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	11	2	
2	5	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman rapat dan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman rapat dan tamu	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	11	2	
2	5	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota dan ke luar Provinsi Jambi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota dan ke luar Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	11	2	
2	5	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	11	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang terealisasi	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang terealisasi	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	11	2
2	5	2	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan prlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan prlengkapan dan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	11	2
2	5	2	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Pengadaan Komputer	Jumlah Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	11	2
2	5	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan service	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan service	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	11	2
2	5	2	34	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah terehabilitasinya gedung kantor, mushola dan laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah terehabilitasinya gedung kantor, mushola dan laboratorium	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	11	2
2	5	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	11	2
2	5	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	11	2
2	5	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	11	2
2	5	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kursus, diklat dan bintek, yang diikuti aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus, diklat dan bintek, yang diikuti aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	11	2
2	5	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	11	2
2	5	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	11	2
2	5	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	11	2
2	5	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah buku renstra dan renja DLH Prov. Jambi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	11	2
2	5	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah DPA DLH Prov. Jambi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	11	2
2	5	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DLH Provinsi Jambi	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LKPJ, LKJ, LPPD, Laporan DAK)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	11	2
2	5	6	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Sinkronisasi dan Koordinasi Program Lingkungan Hidup	Jumlah rapat koordinasi bidang LH Provinsi Jambi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang LH tingkat Provinsi Jambi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	11	2
2	5	6	67	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi	Jumlah movev kegiatan bidang lingkungan hidup tingkat provinsi jambi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah movev kegiatan bidang lingkungan hidup tingkat provinsi jambi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	11	2	
2	5	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan udara Pemantauan air sungai Pemantauan air laut Pemantuan air danau	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Pemantauan kualitas air danau (2 kab/kota) Jumlah pemantauan kualitas air laut (2 kab/kota) Jumlah pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota dalam wilayah Provinsi Jambi (6 kab/kota) Jumlah Pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Provinsi Jambi (11 kab/kota) Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	11	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Pemantauan kualitas air danau (2 kab/kota) Jumlah pemantauan kualitas air laut (2 kab/kota) Jumlah pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota dalam wilayah Provinsi Jambi (6 kab/kota) Jumlah Pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Provinsi Jambi (11 kab/kota) Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaannya di Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	6	11	2
2	5	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait izin pengelolaan lingkungan	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait izin pengelolaan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
2	5	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait izin pengelolaan lingkungan	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait izin pengelolaan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	6	11	2			
2	5	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait izin pengelolaan lingkungan	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah perusahaan yang diawasi terkait izin pengelolaan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	6	11	2			
2	5	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbentuk	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbentuk	Binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi lisensi KPA	Jumlah Pemantauan kondisi rencana usaha/kegiatan	Pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Perusahaan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	6	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Terhadap Transporter dan Pengumpul B3 dan LB3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan B3 dan LB3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	11	2			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi Persentase perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Terhadap Transporter dan Pengumpul B3 dan LB3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan B3 dan LB3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	11	2
2	5	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi Persentase perusahaan yang taat dan memenuhi syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap pencemaran limbah B-3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang dilakukan pembinaan dan diawasi	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan Terhadap Transporter dan Pengumpul B3 dan LB3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peningkatan Pemahaman Tentang Pengelolaan B3 dan LB3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	5	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	11	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan jakstrada kab/kota	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Kab/Kota	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	11	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan jakstrada kab/kota	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	11	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan jakstrada kab/kota	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	11	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan jakstrada kab/kota	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	11	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan jakstrada kab/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	11	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH. Jumlah kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan jakstrada kab/kota	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat (LSM, masyarakat perusahaan) dalam rangka menjaga kelestarian LH.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Jumlah pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	11	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah penanganan pengaduan kasus LH yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai P21 dari jumlah kasus yang terjadi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	10	11	2
2	5	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase peningkatan tindak lanjut pemenuhan sanksi yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan Jumlah verifikasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH Persentase Pengawasan pemenuhan sanksi administratif terhadap kegiatan dan/atau usaha.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah penanganan pengaduan kasus LH yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai P21 dari jumlah kasus yang terjadi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	10	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pengaduan kasus lingkungan yang berhasil ditindak lanjuti	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase penyelesaian pengaduan kasus lingkungan yang berhasil ditindak lanjuti Pembinaan dan pembentukan pos pengaduan kab/kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah penanganan pengaduan kasus LH yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai P21 dari jumlah kasus yang terjadi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	10	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan di bidang LH	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan penghargaan yang diterima dalam bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	9	11	2
2	5	16	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Program Adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata di Provinsi Jambi yang dibina	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata di Provinsi Jambi yang di bina (11 kab/kota) Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jumlah event/peringatan Hari Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan di bidang LH	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan penghargaan yang diterima dalam bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	9	11	2
2	5	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penurunan emisi GRK dari limbah			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	data emisi gas rumah kaca dari sektor limbah setiap tahunnya, proklam.	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	data emisi gas rumah kaca dari sektor limbah setiap tahunnya, proklam. Pembinaan kegiatan Proklam dan Penurunan Emisi Berbasis Masyarakat	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	11	2
2	5	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penurunan emisi GRK dari limbah			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dokumen KLHS	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	11	2
2	5	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dokumen KLHS	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	11	2
2	5	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dokumen KLHS	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	11	2
2	5	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dokumen KLHS	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengembangan Study Kebijakan Lingkungan	Dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil study kebijakan bidang Lingkungan terkait RPPLH, KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jumlah Pembinaan KLHS dan Instrumen Lingkungan Lainnya	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dokumen KLHS	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	2	11	2
2	5	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penurunan emisi GRK dari limbah			Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	11	2
2	5	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penurunan emisi GRK dari limbah			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	3	11	2
2	5	17	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	Jumlah peserta sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Monitoring dan pembinaan pengendalian kebakaran di lahan gambut atau mineral oleh unit usaha/kegiatan Jumlah peserta sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan (50 org peserta)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	3	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	17	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Monitoring dan pembinaan pengendalian kebakaran di lahan gambut atau mineral oleh unit usaha/kegiatan Jumlah peserta sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan (50 org peserta)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	3	11	2
2	5	17	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Koordinasi/ Inventarisasi LAT, Karst dan Mangrove Jumlah Peserta Rapat Koordinasi/FGD Lahan Askes Terbuka, Karst Dan Mangrove	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	3	11	2
2	5	17	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	3	11	2
2	5	17	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	11	2
2	5	17	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kawasan konservasi esensial	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemulihan lahan terkontaminasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	3	3	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	24		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	11	2
2	5	24	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Jumlah pembinaan pegelolaan RTH di Provinsi Jambi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pembinaan pegelolaan RTH di Provinsi Jambi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah data pengakuan MHA dan kearifan lokal yang terverifikasi	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penyusunan Perda dan SK Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	11	2
2	5	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbentuk	Koordinasi sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hutan Adat (MHA) dan kearifan lokal yang dibina kab/kota	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah data pengakuan MHA dan kearifan lokal yang terverifikasi	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penyusunan Perda dan SK Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kapasitas MHA dan kearifan lokal	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penyusunan Perda dan SK Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	7	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbentuk	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA dan kearifan lokal	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kapasitas MHA dan kearifan lokal	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penyusunan Perda dan SK Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal di Provinsi Jambi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	7	11	2
2	5	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	11	2
2	5	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase peningkatan tindak lanjut pemenuhan sanksi yang dikeluarkan	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan tindak lanjut pemenuhan sanksi yang dikeluarkan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	11	2
2	5	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan	Persentase peningkatan tindak lanjut pemenuhan sanksi yang dikeluarkan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan tindak lanjut pemenuhan sanksi yang dikeluarkan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	11	2
2	5	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	19	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH, NSDA LH	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH, NSDA LH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	11	2
2	5	19	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH, NSDA LH	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH, NSDA LH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca Jumlah dokumen KLHS dan daya dukung daya tampung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	11	2
2	5	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data terbaru sesuai SPM LH			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	11	2
2	5	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penurunan emisi GRK dari limbah			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	11	2
2	5	17	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	Jumlah peserta sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jumlah peserta sosialisasi kebakaran lahan dan hutan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	11	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	5	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data terbaru sesuai SPM LH			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan di bidang LH	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan penghargaan yang diterima dalam bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	9	11	2
2	5	18	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jumlah pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata di Provinsi Jambi yang di bina (11 kab/kota) Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jumlah event/peringatan Hari Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan di bidang LH	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan penghargaan yang diterima dalam bidang LH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	9	11	2

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Perhubungan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		10	2	15	2
2	9	15	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen teknis perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen teknis perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	10	2	15	2
2	9	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		9	2	15	2
2	9	15	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media elektronik dan media cetak	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media elektronik dan media cetak	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	9	2	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6	2	15	2
2	9	15	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dishub	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dishub	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	6	2	15	2
2	9	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Meningkatnya pemeliharaan dan fasilitas LLAJ			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	15	2
2	9	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan	Jumlah fasilitas keselamatan Jalan di jalan provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan Jalan di jalan provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	2	15	2
2	9	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase Meningkatnya pelayanan Angkutan			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13	2	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Masukan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan transportasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Masukan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan transportasi Ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan angkutan hari-hari besar dan hari khusus	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	13	2	15	2
2	9	17	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan angkutan hari-hari besar dan hari khusus	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Masukan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan transportasi Ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan angkutan hari-hari besar dan hari khusus	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	13	2	15	2
2	9	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase Meningkatnya pelayanan Angkutan			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		7	2	15	2
2	9	17	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Disiplin awak kendaraan umum dalam berlalu lintas dan terpilihnya wakil Provinsi Jambi di tingkat nasional	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Disiplin awak kendaraan umum dalam berlalu lintas dan terpilihnya wakil Provinsi Jambi di tingkat nasional	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	7	2	15	2
2	9	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase Meningkatnya pelayanan Angkutan			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		11	3	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	17	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Terselenggaranya konsolidasi, sinergitas dan keterpaduan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terselenggaranya konsolidasi, sinergitas dan keterpaduan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	15	2
2	9	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase Meningkatnya pelayanan Angkutan			Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	3	15	2
2	9	17	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai	Pelaksanaan pembinaan dan penertiban penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan laut	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan pembinaan dan penertiban penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan laut	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	3	15	2
2	9	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase pembangunan dan prasarana perhubungan			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		8	2	15	2
2	9	18	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengembangan angkutan umum massal aglomerasi	Terselengaranya Angkutan Umum yang aman dan nyaman	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terselengaranya Angkutan Umum yang aman dan nyaman	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	8	2	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	15	2
2	9	19	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Ketertiban, kelancaraan, keselamatan LLAJ	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Ketertiban, kelancaraan, keselamatan LLAJ	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	15	2
2	9	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Jumlah Kendaraaraan yang memenuhi Persyaratan dan Kelaikan Jalan			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		8	2	15	2
2	9	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya Pengawasan dan Penertibang Angkutan Orang dan Barang di Provinsi Jambi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Penertibang Angkutan Orang dan Barang di Provinsi Jambi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	2	15	2
2	9	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	15	2
2	9	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perlengkapan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perlengkapan jasa surat menyurat	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	15	2
2	9	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran tugas Pengelola Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelancaran tugas Pengelola Keuangan SKPD	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	15	2
2	9	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan dan kerapihan kantor.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan kerapihan kantor.	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	15	2
2	9	1	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelancaran tugas-tugas operasional pelayanan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelancaran tugas-tugas operasional pelayanan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	3	1	15	2
2	9	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan alat tulis kantor	Barang-barang habis pakai keperluan kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Barang-barang habis pakai keperluan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	15	2
2	9	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang-barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang-barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan dan komponen listrik/ penerangan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan dan komponen listrik/ penerangan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	15	2
2	9	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya Bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	15	2
2	9	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya Makanan dan minuman untuk keperluan rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makanan dan minuman untuk keperluan rapat	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	15	2
2	9	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan pusat maupun daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan pusat maupun daerah	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	15	2
2	9	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	15	2
2	9	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan operasional	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	9	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Ketertiban dan kenyamanan tugas rutin	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ketertiban dan kenyamanan tugas rutin	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	15	2
2	9	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran tugas operasional sehari-hari.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran tugas operasional sehari-hari.	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	15	2
2	9	2	44	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan operasional	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan operasional	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41	3	1	15	2
2	9	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	15	2
2	9	2	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pembangunan gedung kantor	Kenyamanan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Pembangunan Gedung Terminal	Kenyamanan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	2	15	2
2	9	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningktakan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	15	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	9	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	15	2	
2	9	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	15	2	
2	9	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ diklat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	15	2	
2	9	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase Meningkatnya pelayanan Angkutan			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	2	15	2	
2	9	17	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kecepatan memperoleh data dan informasi sektor perhubungan	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Kecepatan memperoleh data dan informasi sektor perhubungan	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	15	2	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	16	2
2	10	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	16	2
2	10	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jaringan internet, jasa transponder dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jaringan internet, jasa transponder dan listrik Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	16	2
2	10	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	16	2
2	10	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu 48 Website dan 4 aplikasi Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana kerja OPD Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksannya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2		
2	10	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	16	2
2	10	1	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi ke dalam dan keluar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi ke dalam dan keluar daerah Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	16	2
2	10	1	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Kebersihan Kantor		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	16	2
2	10	11		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersediannya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersediannya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	16	2
2	10	11	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Statistik sektoral	Terpenuhinya Informasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Informasi Data Statistik Sektoral Tersediannya Rencana kerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersediannya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	16	2
2	10	11	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Statistik sektoral	Terpenuhinya Informasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Informasi Data Statistik Sektoral Tersediannya Rencana kerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersediannya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	16	2
2	10	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	16	2
2	10	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	16	2
2	10	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan kehumasan (Peralatan penunjang Drone)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	16	2
2	10	2	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya meubeler kantor	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya meubeler kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	3	1	16	2
2	10	2	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	-	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	16	2
2	10	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Kendaran dinas/operasional kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Kendaran dinas/operasional kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	16	2
2	10	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi dengan baik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	16	2
2	10	2	34	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Suasana Kantor yang nyaman dan representatif	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Suasana Kantor yang nyaman dan representatif	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN		KODE				
2	10	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	16	2	
2	10	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	16	2
2	10	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase peningkatan kapasitas sumber daya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	16	2	
2	10	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kemampuan kualitas SDM ASN	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan kualitas SDM ASN Meningkatnya kualitas teknis ASN	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	16	2
2	10	5	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Meningkatnya kualitas teknis ASN	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan kualitas SDM ASN Meningkatnya kualitas teknis ASN	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	16	2
2	10	7		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pembangunan dan pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	16	2	
2	10	7	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Indormasi dan Komunikasi	Jumlah SKPD yang tersambung fiber optik, dan fiber optik utama	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang tersambung fiber optik, dan fiber optik utama	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	16	2
2	10	8		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	10	8	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksannya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	16	2
2	10	8	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	8	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya workshop, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya workshop, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	16	2
2	10	8	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Publik	Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya workshop, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya workshop, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	1	2	16	2
2	10	8	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika		Jumlah bahan informasi pembangunan Prov. Jambi di Media Elektronik (TV lokal) jumlah informasi pembangunan Prov Jambi yang disiarkan di media elektronik nasional	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu Jumlah bahan informasi pembangunan Prov. Jambi di Media Elektronik (TV lokal) jumlah informasi pembangunan Prov Jambi yang disiarkan di media elektronik nasional	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	10	8	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika		Jumlah bahan informasi pembangunan Prov. Jambi di Media Elektronik (TV lokal) jumlah informasi pembangunan Prov Jambi yang disiarkan di media elektronik nasional	Layanan Hubungan Media	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online Jumlah bahan informasi pembangunan Prov. Jambi di Media Elektronik (TV lokal) jumlah informasi pembangunan Prov Jambi yang disiarkan di media elektronik nasional	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	2	16	2	
2	10	8	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media./ Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	1	2	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	8	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	16	2
2	10	8	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya workshop, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	8	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksannya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Pelayanan Informasi Publik	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksannya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	2	16	2
2	10	8	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan, Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Jambi	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	1	2	16	2
2	10	8	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan, Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Jambi	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online	Manajemen Komunikasi Krisis	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	1	2	16	2
2	10	8	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan, Media dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Provinsi Jambi	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Terbentuknya Forum BAKOHUMAS Provinsi Jambi. Jumlah Pengelolaan Hubungan dengan media. Siaran pers, mengelola ruang pers, konferensi pers, kunjungan pers dan liputan media. Kegiatan Supervisi Kemitraan dengan Media Terlaksananya Bimtek Jurnalistik dan konten media online	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media / Iklan layanan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	1	2	16	2
2	10	7		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pembangunan dan pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	10	7	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Teknologi Indormasi dan Komunikasi	Jumlah SKPD yang tersambung fiber optik, dan fiber optik utama	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang tersambung fiber optik, dan fiber optik utama Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	2	3	16	2	
2	10	9		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Tersedianya Aplikasi dan Website sesuai kebutuhan OPD Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	16	2	
2	10	9	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Website	48 Website dan 4 aplikasi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	48 Website dan 4 aplikasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	3	16	2	
2	10	9	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Bidang TIK	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang tersambung fiber optik, dan fiber optik utama Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	2	3	16	2	
2	10	9		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Tersedianya Aplikasi dan Website sesuai kebutuhan OPD Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain			Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	16	2	
2	10	9	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemberdayaan TIK	Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi ke seluruh OPD dan Rumah Dinas secara Berkesinambungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	16	2	
2	10	11		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	20	2	
2	10	11	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Terlaksannya Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksannya Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	20	2	
2	10	11	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Statistik sektoral	Terpenuhinya Informasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terpenuhinya Informasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	20	2	
2	10	11	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Statistik sektoral	Terpenuhinya Informasi Data Statistik Sektoral	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terpenuhinya Informasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	20	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	10	10		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program persandian untuk pengaman informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	21	2	
2	10	10	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Operasional Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	2	21	2
2	10	10	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Operasional Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	2	21	2
2	10	10	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan Informasi	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	2	21	2
2	10	10	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan Informasi	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamana informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	2	21	2
2	10	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	10	6	21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyusunan rencana kerja OPD	Tersedianya Rencana kerja OPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Informasi Data Statistik Sektoral Tersedianya Rencana kerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	16	2	
2	10	6	21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyusunan rencana kerja OPD	Tersedianya Rencana kerja OPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Informasi Data Statistik Sektoral Tersedianya Rencana kerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	16	2	
2	10	6	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Monitoring dan Evaluasi Program OPD	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja OPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	16	2	
2	10	6	27	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Rapat Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	16	2	
2	10	6	27	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Rapat Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	16	2	
2	10	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1		16	2	
2	10	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	2	1	16	2	
2	10	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	16	2	
2	10	8		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Terlaksananya Bimtek admin PPID Terlaksananya BIMTEK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terlaksananya BIMTEK penguatan sumber daya Informasi Publik Terlaksananya Penyuluhan Informasi Masyarakat Desa (INFORMADES) Tersebarluasnya Informasi Publik Melalui Media/ Iklan layanan masyarakat			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1		16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	10	8	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu 48 Website dan 4 aplikasi Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana kerja OPD Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	10	8	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jaringan internet, Jasa trasponder dan listrik Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	16	2	
2	10	8	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	16	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	8	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48 Website dan 4 aplikasi Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana kerja OPD Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksannya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2
2	10	8	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	8	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi	Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi ke dalam dan keluar daerah Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	8	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jambi	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberikan isu tertentu, isu yang menjadi top isu 48 Website dan 4 aplikasi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2
2	10	11		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.			Administrasi Umum	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	20	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	10	11	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Terlaksannnya Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksannnya Diseminasi Layanan dan Publikasi Data Statistik Sektoral	Administrasi Umum	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terhimpunnya Data Statistik Sektoral. Tersedianya Informasi Data Statistik Sektoral. Tercapainya layanan Data dan publikasi Statistik Sektoral.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	20 2
2	10	10		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program persandian untuk pengaman informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional			Administrasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	21 2
2	10	10	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan Informasi	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	Administrasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah Terwujudnya Fungsi monitoring, evaluasi , dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	21 2
2	10	9		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Tersedianya Aplikasi dan Website sesuai kebutuhan OPD Terlaksannnya Bimbingan Teknis Aplikasi dan Website Terlaksannnya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	16 2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	10	9	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemberdayaan TIK	Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, isu yang menjadi top isu 48 Website dan 4 aplikasi Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana kerja OPD Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksannya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2	
2	10	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	10	6	21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyusunan rencana kerja OPD	Tersedianya Rencana kerja OPD	Tersedianya barang cetakan Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran Informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, Isu yang menjadi top isu 48 Website dan 4 aplikasi Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenuninya undangan kegiatan Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana kerja OPD Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	10	6	27	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Rapat Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenunjnya undangan kegiatan Rapat Koordinasi	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Penyebaran informasi melalui media luar ruang Baliho sebanyak 100 buah, Spanduk sebanyak 500 buah, Backdrop sebanyak 100 buah ini dilaksanakan pada hari-hari nasional Diseminasi Informasi kebijakan media Pemda dan Non Pemda. Penyebaran Informasi melalui Media sosial Iklan layanan masyarakat berupa ucapan pada hari2 Besar Nasional dan Keagamaan yang ditayangkan di Televisi. Terlaksananya Monitoring, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data hasil pantauan konten media dari berbagai platform dalam memberitakan isu tertentu, Isu yang menjadi top isu 48 Website dan 4 aplikasi Terlaksananya Sosialisasi dan BIMTEK Domain/Sub domain Tersedianya laporan akhir tahun OPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Terpenunjnya undangan kegiatan Rapat Koordinasi Tersedianya Rencana kerja OPD Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Terlaksananya Koordinasi PPID se Provinsi Jambi. Bimbingan teknis PPID OPD Prov. Jambi dan kab/Kota se Provinsi Jambi Terlaksananya Rapat koordinasi PPID Prov. Jambi Terlaksananya PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jambi Tercapainya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan badan publik	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Koperasi dan UKM

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	17	2
2	11	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	17	2
2	11	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	17	2
2	11	1	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan gedung kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	1	17	2
2	11	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	17	2
2	11	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	17	2
2	11	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	17	2
2	11	1	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	17	2
2	11	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	17	2
2	11	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	17	2
2	11	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	17	2
2	11	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bertambahnya Aset/Barang inventaris untuk mendukung kelancaran kerja	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bertambahnya Aset/Barang inventaris untuk mendukung kelancaran kerja	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	17	2
2	11	2	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	17	2
2	11	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	17	2
2	11	2	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26	3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	2	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan komputer		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	1	17	2
2	11	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	17	2
2	11	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan 12 bulan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	17	2
2	11	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	17	2
2	11	2	41	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehab	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38	3	1	17	2
2	11	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase PNS yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	17	2
2	11	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase PNS yang disiplin	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase PNS yang disiplin	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	17	2
2	11	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	17	2
2	11	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan dan pelatihan formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	17	2
2	11	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	17	2
2	11	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Administrasi Keuangan	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Persentase peningkatan UMKM binaan			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	6	17	2	
2	11	15	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi	1. Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan gender 2. Terakomodirnya kebutuhan permodalan bagi KSP/USP koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	1. Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan gender 2. Terakomodirnya kebutuhan permodalan bagi KSP/USP koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan 1. Meningkatnya peran dan pemahaman perkoperasian bagi pembina gerakan koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	17	2	
2	11	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Persentase peningkatan UMKM binaan			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	17	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan Ekonomi Lokal	1. Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM 2. Meningkatnya kesadaran UMKM untuk mengurus izin usaha	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM 2. Meningkatnya kesadaran UMKM untuk mengurus izin usaha Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan pendapatan UMKM Meningkatnya kualitas produksi dan SDM KUMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Persentase peningkatan UMKM binaan			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	17	2
2	11	15	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK di Kab/Kota	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK di Kab/Kota Berkembangnya desain serta terciptanya diversifikasi produk Meningkatnya jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan Meningkatnya SDM dan daya saing KUMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	15	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Termonitor dan terevaluasinya kinerja KUMKM	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK di Kab/Kota Termonitor dan terevaluasinya kinerja KUMKM Berkembangnya desain serta terciptanya diversifikasi produk Meningkatnya jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan Meningkatnya SDM dan daya saing KUMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan daya Saing KUMKM	Persentase pertumbuhan UKM			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan produk Ungulan /Andalan di Provinsi Jambi	Berkembangnya desain serta terciptanya diversifikasi produk	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK di Kab/Kota Termonitor dan terevaluasinya kinerja KUMKM Berkembangnya desain serta terciptanya diversifikasi produk Meningkatnya jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan Meningkatnya SDM dan daya saing KUMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK di Kab/Kota Termonitor dan terevaluasinya kinerja KUMKM Berkembangnya desain serta terciptanya diversifikasi produk Meningkatnya jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan Meningkatnya SDM dan daya saing KUMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	16	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis KUKM	Meningkatnya SDM dan daya saing KUMKM	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak atas tanah PMK di Kab/Kota Termonitor dan terevaluasinya kinerja KUMKM Berkembangnya desain serta terciptanya diversifikasi produk Meningkatnya jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan Meningkatnya SDM dan daya saing KUMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan daya Saing KUMKM	Persentase pertumbuhan UKM			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi	Meningkatnya kualitas produksi dan SDM KUMKM	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM 2. Meningkatnya kesadaran UMKM untuk mengurus izin usaha Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan pendapatan UMKM Meningkatnya kualitas produksi dan SDM KUMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2	
2	11	16	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional,Regional dan Luar Negeri	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan pendapatan UMKM	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM 2. Meningkatnya kesadaran UMKM untuk mengurus izin usaha Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan pendapatan UMKM Meningkatnya kualitas produksi dan SDM KUMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2	
2	11	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penguataan Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	6	17	2	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	1. Meningkatnya peran dan pemahaman perkoperasian bagi pembina gerakan koperasi	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	1. Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan gender 2. Terakomodirnya kebutuhan permodalan bagi KSP/USP koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan 1. Meningkatnya peran dan pemahaman perkoperasian bagi pembina gerakan koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan UMKM binaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan UMKM binaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	17	2
2	11	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penguataan Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	17	2
2	11	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi	1. Meningkatnya peran pengurus pengelola koperasi dalam meningkatkan kinerjanya	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Meningkatnya peran pengurus pengelola koperasi dalam meningkatkan kinerjanya Jumlah koperasi dan UMKM yang dilatih	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penguataan Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	17	2
2	11	17	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Penilaian Permodalan Kualitas Aktiva Produktif Manajemen Efisiensi Likuiditas Jatidiri Koperasi Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	17	2
2	11	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kesehatan usaha simpan pinjam koperasi	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Meningkatnya kesehatan usaha simpan pinjam koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	17	2
2	11	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penguataan Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	17	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penerapan Kepatuhan Perundang-Undangan Perkoperasian	Meningkatnya kesadaran koperasi dalam memenuhi peraturan perkoperasian	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	Meningkatnya kesadaran koperasi dalam memenuhi peraturan perkoperasian	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	17	2
2	11	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Persentase peningkatan UMKM binaan			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	17	2
2	11	15	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Pengelolaan Koperasi,Usaha Mikro Kecil	Jumlah koperasi dan UMKM yang dilatih	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kompetensi SDM Koperasi	1. Meningkatkan peran pengurus pengelola koperasi dalam meningkatkan kinerjanya Jumlah koperasi dan UMKM yang dilatih	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2
2	11	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan daya Saing KUMKM	Persentase pertumbuhan UKM			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	17	2
2	11	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kompetensi SDM Koperasi	1. Meningkatkan peran pengurus pengelola koperasi dalam meningkatkan kinerjanya Jumlah koperasi dan UMKM yang dilatih	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan daya Saing KUMKM	Persentase pertumbuhan UKM			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	17	2	
2	11	16	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi HKI, produk halal kepada UMKM dan aparat	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi HKI, produk halal kepada UMKM dan aparat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	4	1	17	2	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	12	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	18	2
2	12	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	18	2
2	12	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan internet yang dibayar. Periode pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM, dan Internet	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan internet yang dibayar. Periode pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM, dan Internet	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	18	2
2	12	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan , Periode Pembayaran Jasa	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan , Periode Pembayaran Jasa	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	18	2
2	12	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	18	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	12	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	18	2	
2	12	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	18	2	
2	12	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	18	2	
2	12	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	18	2	
2	12	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan makanan dan minuman , Jumlah peserta rapat/pertemuan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan makanan dan minuman , Jumlah peserta rapat/pertemuan	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	18	2	
2	12	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti, Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti, Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	18	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	12	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	18	2
2	12	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program peningkatan disiplin aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	18	2
2	12	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	18	2
2	12	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	18	2
2	12	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat /kursus	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat /kursus	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	18	2
2	12	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	18	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	12	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	18	2
2	12	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	18	2
2	12	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	18	2
2	12	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	18	2
2	12	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	18	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	12	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	18	2
2	12	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	18	2
2	12	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	18	2
2	12	6	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Monitoring dan Evaluasi Program OPD	Periode Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Periode Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	18	2
2	12	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	18	2
2	12	6	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	18	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	12	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	18	2	
2	12	15	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Komoditi Pra FS	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Komoditi Pra FS Jumlah Dokumen Pemetaan Investasi Provinsi Jambi Jumlah Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi Tersediannya video profile peluang invvestasi Provinsi Jambi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	18	2	
2	12	15	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan)	Jumlah kemitraan strategis antara pengusaha da UMKM	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jumlah kemitraan strategis antara pengusaha da UMKM Jumlah Perjanjian Kerjasama antara OPD dan Investor Terselenggaranya rapat hsrmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	18	2	
2	12	15	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan penyusunan pemetaan investasi Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pemetaan Investasi Provinsi Jambi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Komoditi Pra FS Jumlah Dokumen Pemetaan Investasi Provinsi Jambi Jumlah Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi Tersediannya video profile peluang invvestasi Provinsi Jambi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	18	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	12	15	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Harmonisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terselenggaranya rapat hsrmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jumlah kemitraan strategis antara pengusaha da UMKM Jumlah Perjanjian Kerjasama antara OPD dan Investor Terselenggaranya rapat hsrmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	18	2	
2	12	15	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Forum Komunikasi Rencana Umum Penanaman Modal (FKRUPM) Provinsi Jambi	Jumlah kab/kota yang telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jumlah kemitraan strategis antara pengusaha da UMKM Jumlah Perjanjian Kerjasama antara OPD dan Investor Terselenggaranya rapat hsrmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	18	2	
2	12	15	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembuatan Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi	Jumlah Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Komoditi Pra FS Jumlah Dokumen Pemetaan Investasi Provinsi Jambi Jumlah Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi Tersediannya video profile peluang invvestasi Provinsi Jambi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	18	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	12	15	20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Matchmaking (kemitraan) Luar	Jumlah Perjanjian Kerjasama antara OPD dan Investor	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Jumlah kemitraan strategis antara pengusaha da UMKM Jumlah Perjanjian Kerjasama antara OPD dan Investor Terselenggaranya rapat hsrmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	18	2
2	12	15	21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembuatan Profil Peluang Investasi Provinsi Jambi	Tersediannya video profile peluang invvestasi Provinsi Jambi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Komoditi Pra FS Jumlah Dokumen Pemetaan Investasi Provinsi Jambi Jumlah Buku Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi Tersediannya video profile peluang invvestasi Provinsi Jambi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	18	2
2	12	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	18	2
2	12	15	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Rapat koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Rapat koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal Jumlah Peserta Forum komunikasi PM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	18	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
2	12	15		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	18 2
2	12	15	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri dan fasilitasi UKM	Jumlah Promosi Investasi dan Temu Usaha Luar Negeri yang diikuti	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Promosi Investasi dan Temu Usaha Luar Negeri yang diikuti	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	18 2
2	12	15	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	18 2
2	12	15	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Investasi	Jumlah Dokumen	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	18 2
2	12	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	18 2
2	12	16	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi	Jumlah rakor forum PTSP	koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah rakor forum PTSP	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	4	18 2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	12	16	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan	Jumlah perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	18	2
2	12	16	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Advokasi Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah Kasus/permasalahan /pengaduan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Kasus/permasalahan /pengaduan	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	4	18	2
2	12	16	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan percepatan penyelesaian perizinan	Jumlah Perizinan yang di terbitkan	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang di terbitkan	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	18	2
2	12	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	4	18	2
2	12	16	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Survey indeks kepuasan konsumen	Nilai kepuasan masyarakat	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Nilai kepuasan masyarakat Jumlah Mediasi konflik perusahaan	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	4	18	2
2	12	16	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Forum Mediasi Konflik Perusahaan PMA/PMDN	Jumlah Mediasi konflik perusahaan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Nilai kepuasan masyarakat Jumlah Mediasi konflik perusahaan	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	4	18	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	12	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	18	2	
2	12	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Forum Komunikasi Penanaman Modal	Jumlah Peserta Forum komunikasi PM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Rapat koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal Jumlah Peserta Forum komunikasi PM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	18	2	
2	12	16	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan pembinaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina BIMTEK dan BIMSOS	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina BIMTEK dan BIMSOS	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	5	18	2	
2	12	16	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	18	2	
2	12	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	18	2	
2	12	16	19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Fasilitasi penyusunan Kebijakan Perizinan	Jumlah Deregulasi Perizinan	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Deregulasi Perizinan	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pertumbuhan Realisasi Investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	18	2	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	19	2
2	13	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	19	2
2	13	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	19	2
2	13	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	19	2
2	13	1	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	3	1	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	19	2
2	13	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	19	2
2	13	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	19	2
2	13	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	19	2
2	13	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	19	2
2	13	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	19	2
2	13	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	19	2
2	13	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	19	2
2	13	5	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	4	1	19	2
2	13	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	19	2
2	13	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	19	2
2	13	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	19	2
2	13	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	19	2
2	13	2	42	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase keterlaksanaan rehab gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase keterlaksanaan rehab gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	3	1	19	2
2	13	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	19	2
2	13	6	26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	19	2
2	13	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan			Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	19	2
2	13	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta paskibraka yang memenuhi kriteria, berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta paskibraka yang memenuhi kriteria, berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	19	2
2	13	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Bulan Bakti Pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kepemudaan	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kepemudaan	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	16	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Mental, Semangat dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN, KPN, dan Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	19	2	
2	13	16	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jenesys	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN dalam rangka pengembangan pemuda Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program KPN dalam rangka pengembangan pemuda Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN, KPN, dan Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	19	2	
2	13	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan dan difasilitasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan jumlah data konkrit organisasi kepemudaan yang tersedia jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang diberdayakan Jumlah pemimpin organisasi kepemudaan yang telah memanfaatkan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah peserta pekan temu wicara organisasi pemuda	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	19	2
2	13	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda			Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	19	2
2	13	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP)	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda Jumlah pemuda binaan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan pengembangan wirausaha Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	17	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Karakter dan Jiwa Wirausaha Muda	Jumlah pemuda binaan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan pengembangan wirausaha	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda Jumlah pemuda binaan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan pengembangan wirausaha Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	19	2	
2	13	17	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemud	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda Jumlah pemuda binaan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan pengembangan wirausaha Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	19	2	
2	13	17	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pengembangan Wirausaha dan Pembangunan Karakter Pemuda	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda Jumlah pemuda binaan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan pengembangan wirausaha Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta kegiatan pengembangan wirausaha dan pembangunan karakter pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), dan Jenesys	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN, KPN, dan Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program PPAN, KPN, dan Jenesys dalam rangka pengembangan pemuda Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	2	19	2	
2	13	19		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Persentase peningkatan pelaku olahraga yang mendapat pelatihan dan bersertifikasi			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	3	19	2	
2	13	19	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Pelaku Olahraga	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga Jumlah Pelaku Olahraga yang telah di bina melalui pemberdayaan olahraga Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga Jumlah peserta pembinaan manajemen organisasi olahraga Jumlah data konkrit organisasi keolahragaan yang tersedia	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	3	19	2	
2	13	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	19	2	
2	13	6	26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	19	2	
2	13	16	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan dan difasilitasi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan dan difasilitasi Jumlah Peserta Rapat Teknis kepramukaan Jumlah pemimpin kepramukaan yang telah memanfaatkan pelatihan pengembangan kepemimpinan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	19	2	
2	13	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	19	2	
2	13	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP)	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	19	2	
2	13	23		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase hasil rekomendasi di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan yang terimplementasi			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	19	2	
2	13	23	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Rakor Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	23	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Koordinasi, Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan monitoring	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan monitoring	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	19	2
2	13	23	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Validasi dan Pengolahan Data Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah dokumen database kepemudaan dan keolahragaan dan sarana prasarana	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen database kepemudaan dan keolahragaan dan sarana prasarana	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	19	2
2	13	23	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program	Jumlah dokumen perencanaan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	19	2
2	13	23	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program	Jumlah dokumen perencanaan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen database kepemudaan dan keolahragaan dan sarana prasarana	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	19	2
2	13	23	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan koordinasi, monitoring dan pengendalian kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan monitoring	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan monitoring	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	19	2
2	13	23	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Rapat Evaluasi	Frekuensi pelaksanaan rapat evaluasi kepemudaan dan keolahragaan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan monitoring	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	22		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	Persentase sarana prasarana keolahragaan dalam kondisi baik			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	19	2
2	13	22	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	Jumlah Cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga Jumlah sarana dan prasarana baru yang di bangun Jumlah Venue/tempat yang di rehab	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	19	2
2	13	22	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana baru yang di bangun	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga Jumlah sarana dan prasarana baru yang di bangun Jumlah Venue/tempat yang di rehab	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	19	2
2	13	22	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Venue/tempat yang di rehab	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga Jumlah sarana dan prasarana baru yang di bangun Jumlah Venue/tempat yang di rehab	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	19	2
2	13	22		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	Persentase sarana prasarana keolahragaan dalam kondisi baik			Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	22	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Youth Center	Jumlah Gedung Youth center yang di bangun	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang disediakan/direhab/dibangun	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	19	2
2	13	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat pada event nasional (PON, PEPARNAS, POPNAS, PEPARPENAS)			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	3	19	2
2	13	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) daerah	Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	3	19	2
2	13	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) daerah	Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Wilayah (POPWIL)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2
2	13	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat POPNAS	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	20	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat PEPARPENAS	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2	
2	13	20	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Festival Olahraga Tradisional	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2
2	13	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Peringkat pada event nasional PON Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Peringkat pada event nasional PON Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Peringkat pada event nasional PON Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2
2	13	20	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka kebudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga Pelajar	Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Peringkat pada event nasional PON Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	3	19	2
2	13	20	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Prestasi	Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Peringkat POPNAS Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	3	3	19	2
2	13	24		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pengembangan Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan	Persentase organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	24	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan jumlah data konkrit organisasi kepemudaan yang tersedia jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang diberdayakan Jumlah pemimpin organisasi kepemudaan yang telah memanfaatkan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah peserta pekan temu wicara organisasi pemuda	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan dan difasilitasi Jumlah Organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan jumlah data konkrit organisasi kepemudaan yang tersedia jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang diberdayakan Jumlah pemimpin organisasi kepemudaan yang telah memanfaatkan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah peserta pekan temu wicara organisasi pemuda	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	2	19	2
2	13	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat pada event nasional (PON, PEPARNAS, POPNAS, PEPARPENAS)			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) daerah	Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2	
2	13	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Wilayah (POPWIL)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Wilayah (POPWIL)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
2	13	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat POPNAS	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAIING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2		
																					Peringkat PEPARPENAS	
									Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga													
									Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga													
									Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional													
									Peringkat POSPENAS													
									Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL													
									Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)													
									Peringkat pada event nasional PON													
							Peringkat POSPENAS															
							Peringkat pada event nasional PEPARNAS															
2	13	20	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (PEPARPEPROV)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional PEPARPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional PEPARPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAIING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	19	2		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat PEPARPENAS	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2
2	13	20	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Festival Olahraga Tradisional	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Festival Olahraga Tradisional	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2
2	13	20	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional	Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2
2	13	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Peringkat pada event nasional PON Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Peringkat pada event nasional PON Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional PEPARPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	2	3	19	2
2	13	20	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Peringkat pada event nasional PON Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	13	20	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	19	2
2	13	20	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga Prestasi	Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Peringkat POSPENAS Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Peringkat POSPENAS Peringkat pada event nasional PEPARNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																										
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																	
2	13	20	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Peringkat POSPENAS	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2													
																					Peringkat PEPARPENAS												
																					Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga												
																					Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga												
																					Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional												
																					Peringkat POSPENAS												
																					Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL												
																					Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)												
																					Peringkat pada event nasional PON												
								Peringkat POSPENAS																									
								Peringkat pada event nasional PEPARNAS																									
2	13	24		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pengembangan Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan	Persentase organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	3	19	2													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	24	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Organisasi dan SDM Pelaku Olahraga	Jumlah Pelaku Olahraga yang telah di bina melalui pemberdayaan olahraga Jumlah peserta pembinaan manajemen organisasi olahraga Jumlah data konkrit organisasi keolahragaan yang tersedia	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga Jumlah Pelaku Olahraga yang telah di bina melalui pemberdayaan olahraga Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga Jumlah peserta pembinaan manajemen organisasi olahraga Jumlah data konkrit organisasi keolahragaan yang tersedia	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	3	19	2	
2	13	24		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pengembangan Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan	Persentase organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	19	2	
2	13	24	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Jumlah Peserta Rapat Teknis kepramukaan Jumlah pemimpin kepramukaan yang telah memanfaatkan pelatihan pengembangan kepemimpinan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah lembaga kepemudaan dan kepramukaan yang diberdayakan dan difasilitasi Jumlah Peserta Rapat Teknis kepramukaan Jumlah pemimpin kepramukaan yang telah memanfaatkan pelatihan pengembangan kepemimpinan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	19	2	
2	13	24	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Monev Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan (TOK3)	Jumlah Laporan Monev Tenaga Organisasi Kepemudaan , Keolahragaan dan Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Monev Tenaga Organisasi Kepemudaan , Keolahragaan dan Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	4	19	2	
2	13	24	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan penyusunan Juklak dan Juknis Tenaga Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan (TOK3)	Jumlah Juklak dan Juknis Pengembangan Tenaga organisasi kepemudaan , keolahragaan dan kepramukaan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Juklak dan Juknis Pengembangan Tenaga organisasi kepemudaan , keolahragaan dan kepramukaan.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat pada event nasional (PON, PEPARNAS, POPNAS, PEPARPENAS)			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	3	19	2	
2	13	20	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga Pelajar	Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga Jumlah Pelaku Olahraga yang telah di bina melalui pemberdayaan olahraga Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga Jumlah peserta pembinaan manajemen organisasi olahraga Jumlah data konkrit organisasi keolahragaan yang tersedia	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	3	19	2	
2	13	20	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Pelaku Olahraga	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang telah dibina melalui pembudayaan olahraga Jumlah Pelaku Olahraga yang telah di bina melalui pemberdayaan olahraga Jumlah klub olahraga pelajar yang telah dibina dalam peningkatan prestasi olahraga Jumlah peserta pembinaan manajemen organisasi olahraga Jumlah data konkrit organisasi keolahragaan yang tersedia	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	3	19	2	
2	13	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya	Persentase peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya yang terimplementasi			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	3	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya	Persentase peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya yang terimplementasi			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	3	19	2	
2	13	21	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional Jumlah penduduk yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS) Peringkat pada event nasional PON Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional POSPENAS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	19	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	13	21	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olah Raga	Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Peringkat POSPENAS	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Peringkat POPNAS Peringkat PEPARPENAS Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga Jumlah atlet festival olahraga tradisional yang difasilitasi dalam rangka pembudayaan olahraga Jumlah atlet invitasi olahraga tradisional yang berprestasi untuk mengikuti event nasional	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keterlaksanaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	3	19	2	
								Jumlah atlet yang mengikuti PORWIL													
								Jumlah atlet berprestasi untuk mengikuti event nasional (POPNAS)													
								Peringkat pada event nasional PON													
								Peringkat POSPENAS													
								Peringkat pada event nasional PEPARNAS													

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	22	2
2	16	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	1	22	2
2	16	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening pembayaran air,listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening pembayaran air,listrik	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	22	2
2	16	1	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan operasional yang di pelihara	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	3	1	22	2
2	16	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa keuangan	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah alat-alat kebbersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat-alat kebersihan kantor	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	22	2
2	16	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	22	2
2	16	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak penggandaan	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	22	2
2	16	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	22	2
2	16	1	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	22	2
2	16	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	22	2
2	16	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	22	2
2	16	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	22	2
2	16	2	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan n gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	22	2
2	16	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	22	2
2	16	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41	3	1	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	22	2
2	16	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	22	2
2	16	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah ASN Disbudpar	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah ASN Disbudpar	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	22	2
2	16	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah ASN Disbudpar	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	jumlah ASN Disbudpar	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	4	1	22	2
2	16	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	presentase peningkatan sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	22	2
2	16	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah peserta	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah peserta	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	22	2
2	16	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	22	2
2	16	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	22	2
2	16	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	1	22	2
2	16	6	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	22	2
2	16	6	27	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Rapat Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah peserta	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah peserta	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	16	6	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi	jumlah laporan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	jumlah laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	22	2	
2	16	6	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi	jumlah laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	22	2	
3	2	15		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Presentase Peningkatan Event Pariwisata			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	26	3	
3	2	15		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Presentase Peningkatan Event Pariwisata			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	26	3	
3	2	15		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Presentase Peningkatan Event Pariwisata			Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	26	3	
3	2	15	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	jumlah akses pada website disbudpar jumlah promosi, sosialisasi dan publikasi kepariwisataan ke media informasi rakyat	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik dalam dan Luar Negeri	jumlah akses pada website disbudpar jumlah promosi, sosialisasi dan publikasi kepariwisataan ke media informasi rakyat	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	3	26	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	15	2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah stakeholder pariwisata yang berpartisipasi pada promosi kepariwisataan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan event, fasilitasidan suporting pada event dalam daerah Jumlah bahan/materi promosi kepariwisataan daerah Jumlah stakeholder pariwisata yang berpartisipasi pada promosi kepariwisataan	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	3	26	3
3	2	15	3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	26	3
3	2	15	3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri Jumlah pelaksanaan event, fasilitasidan suporting pada event dalam daerah Jumlah bahan/materi promosi kepariwisataan daerah Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	26	3
3	2	15	4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Dalam)	Jumlah pelaksanaan event, fasilitasidan suporting pada event dalam daerah Jumlah bahan/materi promosi kepariwisataan daerah	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri Jumlah pelaksanaan event, fasilitasidan suporting pada event dalam daerah Jumlah bahan/materi promosi kepariwisataan daerah Jumlah keikutsertaan dan pelaksanaan event promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	2	16		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	26	3	
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	26	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	26	3	
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	26	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	2	16		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	26	3	
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	2	26	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah akses pada website disbudpar jumlah promosi, sosialisasi dan publikasi kepariwisataan ke media informasi rakyat Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	16	2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah akses pada website disbudpar jumlah promosi, sosialisasi dan publikasi kepariwisataan ke media informasi rakyat Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	26	3
3	2	16	2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	2	26	3
3	2	17		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan Kemitraan	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	17	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah peserta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	2	2	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	17	7	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor manajemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah peserta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	2	2	26	3
3	2	17	8	Urusan Pilihan	Pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta (masyarakat/ aparatur/tokoh adat/tokoh agama/ pelaku pariwisata/ pokdarwis) pembinaan di desa wisata Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan pemberdayaan masyarakat Jumlah desa wisata Jumlah Pokdarwis Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jasa pariwisata tingkat dasar Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta (masyarakat/ aparatur/tokoh adat/tokoh agama/ pelaku pariwisata/ pokdarwis) pembinaan di desa wisata Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan pemberdayaan masyarakat Jumlah desa wisata Jumlah Pokdarwis Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jasa pariwisata tingkat dasar Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	2	2	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	2	17		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan Kemitraan	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	26	3	
3	2	17	7	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	3	2	26	3	
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	22	2	
2	16	16	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	jumlah penonton TBJ	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	jumlah penonton TBJ Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	22	2	
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	6	22	2	
2	16	16	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Jumlah Koleksi Museum signjei Jumlah Koleksi Museum Gentala Arasy	Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum signjei Jumlah Koleksi Museum Gentala Arasy Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	6	22	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	22	2
2	16	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	6	22	2
2	16	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	6	22	2
2	16	16	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pelindungan Pengembangan dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum siginjei Jumlah Koleksi Museum Gentala Arasy Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	6	22	2
2	16	16	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	16	16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy Jumlah kunjunngan ke museum MPRJ Jumlah koleksi MPRJ	Pengelolaan Museum Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	6	22	2
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	22	2
2	16	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	4	22	2
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	16	16	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Taman Budaya	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaptarnya karya budaya tak benda	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaptarnya karya budaya tak benda Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni Jumlah karya seni terdaptar pada HAKI	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	22	2	
2	16	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase peningkatan apresiasi seni			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2	2	22	2
2	16	17	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah karya seni terdaptar pada HAKI	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni Jumlah karya seni terdaptar pada HAKI Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan Jumlah tampilan kesenian didalam dan luar daerah	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	22	2	
2	16	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase peningkatan apresiasi seni			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan apresiasi seni	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase peningkatan apresiasi seni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	22	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah lomba seni (tari/musik/teater/rupa/sastra) Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan apresiasi seni	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase peningkatan apresiasi seni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	22	2
2	16	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah lomba seni (tari/musik/teater/rupa/sastra)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah lomba seni (tari/musik/teater/rupa/sastra) Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan apresiasi seni	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase peningkatan apresiasi seni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	22	2
2	16	17	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah lomba seni (tari/musik/teater/rupa/sastra)	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah lomba seni (tari/musik/teater/rupa/sastra)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan apresiasi seni	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase peningkatan apresiasi seni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	22	2
2	16	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah HAKI			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan apresiasi seni	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase peningkatan apresiasi seni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	22	2
2	16	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Membangun kemitraan/pengelolaan kebudayaan anatar daerah	jumlah organisasi seni yang dibina	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah organisasi seni yang dibina	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan apresiasi seni	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Presentase peningkatan apresiasi seni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	3	22	2
2	16	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah HAKI			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah HAKI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	16	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah HAKI			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	22	2	
2	16	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah	jumlah organisasi seni yang dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	jumlah organisasi seni yang dibina	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	2	22	2
2	16	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Diplomasi Budaya dan Misi Kesenian	Jumlah tampilan kesenian didalam dan luar daerah	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan Jumlah tampilan kesenian didalam dan luar daerah	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	22	2	
2	16	18	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan Jumlah tampilan kesenian didalam dan luar daerah	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	22	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	18	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	jumlah penonton TBJ Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan Jumlah Toko seni budaya/maestro budaya yang diberi penghargaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	2	22	2
3	2	16		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	26	3
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	2	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	16	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	26	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	2	16	2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	26	3
3	2	16	2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata di destinasi	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	26	3
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	5	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	16	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Register Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	5	22	2	
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	5	22	2	
2	16	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Peningkatan Potensi Nilai Informasi dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	5	22	2	
2	16	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	5	22	2	
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	5	22	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	16	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Peningkatan Potensi Nilai Informasi dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	2	5	22	2	
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	22	2	
2	16	16	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan ****)	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Jumlah pendataan toponim kesejarahan Jumlah peserta wisata sejarah Jumlah bahan Informasi sejarah	Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	22	2	
2	16	16	14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman ****)	Jumlah Kunjungan Museum Siginjei Jumlah kunjungan Ke Museum gentala Arasy	Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	7	22	2	
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Pengelolaan Taman Budaya ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA ****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5	7	22	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	16	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Taman Budaya	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota *****)	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda	Pengelolaan Taman Budaya *****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA *****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	5	7	22	2
2	16	16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum			Sarana Prasarana Kaistimewan Urusan Kebudayaan *****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA *****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6	7	22	2
2	16	16	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Meningkatkan Fungsi Taman Budaya	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya *****)	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda	Sarana Prasarana Kaistimewan Urusan Kebudayaan *****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA *****)	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	7	22	2
2	16	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase peningkatan apresiasi seni			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	22	2
2	16	17	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	2	22	2
2	16	17	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah karya seni hasil eksperimentasi Jumlah karya seni olahan Jumlah temu karya taman budaya se Indonesia Jumlah temu karya budaya se Sumatera Jumlah buletin seni Jumlah terdaftarnya karya budaya tak benda Jumlah terkirimnya peserta GBN Jumlah apresiasi seni Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	16	17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase peningkatan apresiasi seni			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah HAKI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	2	22	2
2	16	17	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah HAKI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	22	2
2	16	17	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah tampilan kesenian didalam dan luar daerah Jumlah karya seni terdaftar pada HAKI	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah HAKI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	3	2	22	2
2	16	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Program pengembangan kemitraanpengelolaan kekayaan budaya	Jumlah HAKI			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	22	2
2	16	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah	jumlah organisasi seni yang dibina	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	jumlah organisasi seni yang dibina	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase peningkatan retribusi kunjungan ke warisan budaya presentase peningkatan kunjungan ke Museum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	4	22	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	2	17		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan Kemitraan	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	26	3	
3	2	17	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan paket wisata unggulan dengan jenis dan standar kepariwisataan provinsi Jambi Jumlah dokumen Profil DTW unggulan berbasis Audiovisual Jumlah pengelolaan ODTW (visitor managemen) di destinasi pariwisata Jumlah ODTW unggulan baru teridentifikasi Jumlah peningkatan SDM pengelola ODTW Jumlah dokumen statistik kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	26	3	
3	2	17		Urusan Pilihan	Pariwisata	Program pengembangan Kemitraan	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	2	26	3	
3	2	17	1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Database Usaha Jasa Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase SDM pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Event Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	2	26	3	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	17	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	23	2	
2	17	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	23	2	
2	17	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	23	2	
2	17	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	23	2	
2	17	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	23	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	17	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	23	2	
2	17	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	23	2	
2	17	1	15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	23	2	
2	17	1	17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/ tamu, dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/ tamu, dll	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	23	2	
2	17	1	18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	23	2	
2	17	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	23	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	17	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	23	2	
2	17	2	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	3	1	23	2	
2	17	2	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	23	2	
2	17	2	24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	23	2	
2	17	2	28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35	3	1	23	2	
2	17	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan jumlah PNS yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	23	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	17	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	23	2	
2	17	5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	23	2	
2	17	5	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	23	2	
2	17	12		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	23	2	
2	17	12	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi bahan pustaka	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	1	2	23	2	
2	17	12	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar dan Workshop/Supervisi/Penyuluhan	Jumlah pengunjung	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	2	23	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	17	12	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah pelaksanaan pelestarian bahan pustaka	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pelaksanaan pelestarian bahan pustaka	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	23	2	
2	17	13		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	Persentase pengembangan perpustakaan			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	2	23	2	
2	17	13	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Kegiatan Pemasarakatan Minat Baca	Jumlah pelaksanaan promosi minat baca	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan promosi minat baca	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	23	2	
2	17	13		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	Persentase pengembangan perpustakaan			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	23	2	
2	17	13	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Kegiatan Standarisasi dan Akreditasi Kelembagaan Perpustakaan	Jumlah lembaga perpustakaan yang memenuhi standar	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah lembaga perpustakaan yang memenuhi standar	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	23	2	
2	17	13	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Kegiatan Pengembangan Aparatur Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang terlatih	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengelola perpustakaan yang terlatih	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	2	23	2	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	17	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan laporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	23	2
2	17	6	29	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program/Perpustakaan Dan Kearsipan Se-Provinsi Jambi	Jumlah laporan rakor	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan laporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	23	2
2	17	6	30	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Monitoring Perpustakaan Dan Kearsipan Dalam Provinsi Jambi	Jumlah laporan movev	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan laporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	1	23	2
2	17	6		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan			Administrasi Keuangan	Persentase peningkatan laporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	23	2
2	17	6	26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah barang cetakan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Keuangan	Persentase peningkatan laporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	2	1	23	2

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	25	3	
3	1	15	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	25	3	
3	1	15	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	5	25	3	
3	1	15	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	25	3	
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	5	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	15	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	5	25	3	
3	1	15	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	5	25	3	
3	1	15	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan terpadu kelautan dan perikanan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	5	25	3	
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	25	3	
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen zonasi Jumlah reservat meningkat	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah reservat meningkat	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	2	25	3
3	1	15	5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah reservat meningkat	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen zonasi Jumlah reservat meningkat	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	25	3
3	1	15	5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah reservat meningkat	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah reservat meningkat	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	25	3
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	2	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah dokumen zonasi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	2	2	25	3
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	2	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	25	3
3	1	15	4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen zonasi	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	2	25	3
3	1	15	6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan kawasan pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	2	25	3
3	1	15	6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan kawasan pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	2	25	3
3	1	15	6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan kawasan pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	25	3
3	1	15	6	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan kawasan pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen zonasi Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	2	25	3
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	15	5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah reservat meningkat	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah reservat meningkat Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	25	3
3	1	15		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	3	25	3
3	1	15	5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah reservat meningkat	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah reservat meningkat Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	25	3
3	1	15	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalasi pendung semurup kerinci	Jumlah benih ikan lokal	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah reservat meningkat Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	15	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalasi pendung semurup kerinci	Jumlah benih ikan lokal	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	3	25	3
3	1	15	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalasi thehok	Jumlah benih ikan lokal	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah reservat meningkat Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	25	3
3	1	15	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalasi thehok	Jumlah benih ikan lokal	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	3	25	3
3	1	20		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	25	3	
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	25	3	
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	4	25	3	
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	25	3	
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	4	25	3	
3	1	20	16	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	25	3	
3	1	20	16	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	1	20	16	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	4	25 3
3	1	20		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5	4	25 3
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	5	4	25 3
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	5	4	25 3
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	5	4	25 3
3	1	20	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	5	4	25 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	4	25	3
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	5	4	25	3
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	5	4	25	3
3	1	20	16	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	5	4	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	20	16	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	5	4	25	3
3	1	20		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	4	25	3
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	4	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	4	25	3
3	1	20		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya			Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasiya Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	4	25	3
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasiya Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	4	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasiya Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	4	25	3
3	1	20		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan budidaya	Produktivitas perikanan budidaya			Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	4	25	3
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	4	25	3
3	1	20	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas perikanan budidaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	4	25	3
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan sarana perikanan tangkap	Jumlah alat tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah reservat meningkat Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	25	3
3	1	21	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan sarana perikanan tangkap	Jumlah alat tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	25	3
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	3	25	3
3	1	21	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan sarana perikanan tangkap	Jumlah alat tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah reservat meningkat Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	25	3
3	1	21	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan sarana perikanan tangkap	Jumlah alat tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan lokal Jumlah benih ikan lokal Jumlah alat tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	3	25	3	
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah produksi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	3	25	3	
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah produksi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	3	25	3	
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah produksi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	3	25	3	
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	3	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah produksi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	3	25	3
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah produksi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	3	25	3
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah produksi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	25	3
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah produksi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	25	3
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		9	3	25	3
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah produksi	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	9	3	25	3
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah produksi	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	9	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		10	3	25	3
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah produksi	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	10	3	25	3
3	1	21	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan usaha penangkapan ikan	Jumlah produksi	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah produksi	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	10	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	25	3
3	1	21	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pemberdayaan nelayan	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	7	3	25 3
3	1	21	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pemberdayaan nelayan	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	3	25 3
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pemberdayaan nelayan	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	8	3	25	3
3	1	21	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pemberdayaan nelayan	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah bimtek perikanan tangkap	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut Sungai danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	8	3	25	3
3	1	21		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan tangkap			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		6	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	3	25	3
3	1	21	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	3	25	3
3	1	21	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	6	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesyahbandaran pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal	Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	3	25	3
3	1	21	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesyahbandaran pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal	Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	3	25	3
3	1	21	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Kesyahbandaran pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal	Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	6	3	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	21	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pengelolaan instalasi PPI Nipah Panjang	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	3	25	3
3	1	21	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pengelolaan instalasi PPI Nipah Panjang	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	3	25	3
3	1	21	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan pengelolaan instalasi PPI Nipah Panjang	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal Persentase peningkatan kapal yang taat administrasi kesyahbandaran Persentase peningkatan kapal yang mendarat di PPI Nipah Panjang	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produktivitas perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	6	3	25	3
3	1	23		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi ikan perkapita			Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	23	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	Jumlah dokumen informasi pasar	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	25	3
3	1	23	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	Jumlah dokumen informasi pasar	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	25	3
3	1	23	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	Jumlah dokumen informasi pasar	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	25	3
3	1	23	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	23	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	25	3
3	1	23	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	25	3
3	1	23	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Promosi dan publikasi kelautan dan perikanan	Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	25	3
3	1	23	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Promosi dan publikasi kelautan dan perikanan	Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	23	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Promosi dan publikasi kelautan dan perikanan	Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	25	3
3	1	23	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalsi ikan hias telanaipura	Jumlah benih ikan hias	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publiikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	25	3
3	1	23	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalsi ikan hias telanaipura	Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	25	3
3	1	23	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan instalsi ikan hias telanaipura	Jumlah benih ikan hias	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan Jumlah benih ikan hias	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	23		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi ikan perkapita			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	6	25	3	
3	1	23	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	Jumlah dokumen informasi pasar	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	6	25	3	
3	1	23	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	Jumlah dokumen informasi pasar	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	6	25	3	
3	1	23	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pemasaran hasil perikanan	Jumlah dokumen informasi pasar	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	6	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	23	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	6	25	3
3	1	23	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	6	25	3
3	1	23	3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi pasar Jumlah produksi UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	6	25	3
3	1	23		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi ikan perkapita			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	6	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	23	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pelayanan dan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan di UPTD PMHP	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	25	3	
3	1	23	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pelayanan dan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan di UPTD PMHP	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	25	3	
3	1	23	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penerapan mutu hasil perikanan di UPTD PMHP	Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	25	3	
3	1	23	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penerapan mutu hasil perikanan di UPTD PMHP	Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	23	11	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan mutu	Jumlah dokumen SKP	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	25	3
3	1	23	11	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan mutu	Jumlah dokumen SKP	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	25	3
3	1	23	12	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan produk kelautan dan perikanan	Jumlah ragam produk	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	25	3
3	1	23	12	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan produk kelautan dan perikanan	Jumlah ragam produk	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan Jumlah uji coba teknologi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan Jumlah dokumen SKP Jumlah ragam produk	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Konsumsi ikan perkapita	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan perkapita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	1	1		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	25	3	
3	1	1	1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	25	3	
3	1	1	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	1	25	3	
3	1	1	7	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (orang)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (orang)	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	1	25	3	
3	1	1	8	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	25	3	
3	1	1	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	25	3	
3	1	1	11	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	25	3	
3	1	1	12	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	25	3	
3	1	1	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	25	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	1	17	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan makan dan minum (bulan)	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan makan dan minum (bulan)	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	25	3
3	1	1	18	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	25	3
3	1	2		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	25	3
3	1	2	9	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	25	3
3	1	2	10	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur komputer, laptop, printer, UPS, Gigastore	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	3	1	25	3
3	1	2	11	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan komputer	jumlah pengadaan komputer, laptop, printer, UPS, Gigastore	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan komputer, laptop, printer, UPS, Gigastore	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	25	3
3	1	2	22	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	3	1	25	3
3	1	2	24	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31	3	1	25	3
3	1	2	26	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33	3	1	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	2	41	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab sedang/berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab sedang/berat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38	3	1	25	3
3	1	2	42	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	25	3
3	1	3		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase PNS yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	25	3
3	1	3	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	1	25	3
3	1	5		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	25	3
3	1	5	1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	1	25	3
3	1	5	2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	4	1	25	3
3	1	5	15	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penatausahaan kepegawaian	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kepegawaian	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	4	1	25	3
3	1	5		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi			Administrasi Keuangan	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	5	16	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penatausahaan kearsipan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kearsipan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kearsipan	Administrasi Keuangan	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	2	1	25	3
3	1	6		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Administrasi Keuangan	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	25	3
3	1	6	1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	2	1	25	3
3	1	6	34	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Inventarisasi dan penertiban aset	Jumlah dokumen aset yang diinventaris	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen aset yang diinventaris	Administrasi Keuangan	Persentase sumberdaya aparatur berkompetensi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	1	25	3
3	1	6		Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	25	3
3	1	6	1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	1	25	3
3	1	6	31	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik	Jumlah laporan data statistik perikanan yang tersedia	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan data statistik perikanan yang tersedia	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	1	25	3
3	1	6	32	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Rancangan penyusunan program, anggaran dan sinkronisasi program SKPD	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	1	25	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	1	6	32	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Rancangan penyusunan program, anggaran dan sinkronisasi program SKPD	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	1	25	3
3	1	6	33	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan program kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev pelaksanaan program kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	25	3

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	1		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	27	3
3	3	1	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa surat menyurat	meningkatkan kelancaran administrasi surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lamanya Penyediaan Surat-Menyurat	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	27	3
3	3	1	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi dan kinerja kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	1	27	3
3	3	1	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya Administrasi dan kinerja kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lamanya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	1	27	3
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	1	27	3
3	3	1	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lamanya Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lamanya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	27	3
3	3	1	10	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan alat tulis kantor	Lamanya Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1	11	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lamanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lamanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	27	3	
3	3	1	12	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banyaknya Pengadaan Komponen Alat listrik (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	27	3	
3	3	1	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lamanya Penyediaan Jasa Surat Kabar/ Majalah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Kantor	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	27	3	
3	3	1	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan makanan dan minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Penunjang Seluruh Kegiatan Operasional, Rapat Terbatas dan Rapat Koordinasi	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	27	3	
3	3	1	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi mengikuti rakor dan konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	27	3	
3	3	8		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan dan pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	7	27	3	
3	3	8	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan diklat peningkatan kompetensi dan SDM pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang dikembangkan kompetensinya	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan dan pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	7	27	3	
3	3	8	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan diklat peningkatan kompetensi dan SDM pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang dikembangkan kompetensinya	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan dan pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	7	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	8	4	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh		Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang dikembangkan kompetensinya	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	7	27	3	
3	3	8	4	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh		Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang dikembangkan kompetensinya	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	7	27	3	
3	3	8		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	7	27	3	
3	3	8	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Petani (rembug Madya KTNA) untuk 35 orang 21 Lembaga Terlaksananya koordinasi pembinaan pendampingan pengawalan kegiatan (12 bulan)	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan koorporasi petani yang terbentuk atau dikembangkan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	7	27	3	
3	3	8	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Petani (rembug Madya KTNA) untuk 35 orang 21 Lembaga Terlaksananya koordinasi pembinaan pendampingan pengawalan kegiatan (12 bulan)	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang di dampingi pengembangannya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	7	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	8	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Petani (rembug Madya KTNA) untuk 35 orang 21 Lembaga Terlaksananya koordinasi pembinaan pendampingan pengawalan kegiatan (12 bulan)	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Jumlah koorporasi petani yang di nilai kelayakan standarisasi manajemen	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	7	27	3	
3	3	8	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Petani (rembug Madya KTNA) untuk 35 orang 21 Lembaga Terlaksananya koordinasi pembinaan pendampingan pengawalan kegiatan (12 bulan)	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang di fasilitasi penyelenggaraan sekolah lapang	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	7	27	3	
3	3	8	5	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan	Terlaksananya pertemuan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan 1 Dokumen Terlaksananya pembinaan dan pendampingan penyuluhan	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang di dampingi pengembangannya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	7	27	3	
3	3	8	5	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan	Terlaksananya pertemuan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan 1 Dokumen Terlaksananya pembinaan dan pendampingan penyuluhan	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Jumlah koorporasi petani yang di nilai kelayakan standarisasi manajemen	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	7	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	8	5	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyuluhan	Terlaksananya pertemuan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan 1 Dokumen Terlaksananya pembinaan dan pendampingan penyuluhan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang di fasilitasi penyelenggaraan sekolah lapang	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	7	27	3	
3	3	8		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	7	27	3	
3	3	8	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Tani	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Petani (rembug Madya KTNB) untuk 35 orang 21 Lembaga Terlaksananya koordinasi pembinaan pendampingan pengawasan kegiatan (12 bulan)	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah penyuluh dan petani yang di berdayakan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	7	27	3	
3	3	8	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penyebaran Informasi dan Teknologi Penyuluhan	Tersedianya data dan Informasi teknologi penyelenggaraan penyuluhan	Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah informasi teknologi, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang desiminasi	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	7	27	3	
3	3	8	4	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah penyuluh dan petani yang di berdayakan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	7	27	3	
3	3	12		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	6	27	3	
3	3	12	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan, Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Survailen Sertifikasi Organik Jumlah Fasilitas Hak Paten Merek Produk Hasil Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	12	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan, Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Survailen Sertifikasi Organik Jumlah Fasilitas Hak Paten Merek Produk Hasil Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	27	3	
3	3	18		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatnya Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	27	3	
3	3	18	20	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Tingkat Petani	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Serapan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di di Provinsi Jambi Jumlah Pengadaan Alsintan Mendukung Ketahanan Pangan Jumlah Fasilitas Peralatan Bengkel Alsintan UPJA Jumlah Jenis Alsintan yang Diawasi Jumlah Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Alsintan/ UPJA	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatnya Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	18	21	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Meningkatnya Koordinasi dalam Pemanfaatan Alsintan antara Petugas Provinsi dengan Petugas Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Peserta Pertemuan Apresiasi Mekanik Alsintan UPJA/ Workshop Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Terselurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatnya Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3	
3	3	18		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian			Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27	3	
3	3	18	22	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM)	Meningkatnya Kemampuan Petani dalam Memanfaatkan Jaringan Irigasi dan Drainase pada Usaha taninya	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Peningkatan P3A dan GP3A yang diapresiasi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	3	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	18	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Perluasan Areal dan Pengembangan Lahan Pertanian	Terlaksanya Pendampingan dan Pembinaan Cetak Sawah	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung														
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)														
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura														
						Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura														
						Jumlah Prasarana Pasar Tani														
						Jumlah pengendalian inflasi cabai merah														
						Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi														
						Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU)														
						Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher)														
						Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	18	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Perluasan Areal dan Pengembangan Lahan Pertanian	Terlaksanya Pendampingan dan Pembinaan Cetak Sawah	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Peningkatan Jalan Usaha Tani yang Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Peningkatan dan penambahan pembuatan Jalan untuk peningkatan Produktivitas di UPTD Balai Pembibitan Ternak (BIBD Sungai Gelam) Tercapainya PAD Kebun Binatang	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	3	27	3
3	3	21		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Persentase penurunan angka kematian Hewan			Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan angka kematian Hewan Ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	27	3
3	3	21	6	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	- Jumlah Ternak yang Dilayani	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Pelayanan Kesehatan hewan (Peningkatan fungsi klinik hewan) Turunnya angka Kematian ternak	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan angka kematian Hewan Ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	27	3
3	3	21	6	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	- Jumlah Ternak yang Dilayani	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Mempertahankan Status Bebas brucellosis	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan angka kematian Hewan Ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	3	21	6	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	- Jumlah Ternak yang Dilayani	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Terlayannya Kesehatan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan angka kematian Hewan Ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	4	27 3
3	3	22		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (kambing)			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	2	27 3
3	3	22	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Peternakan di BIBD Sungai Gelam	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengolahan Pakan Ternak Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Ransum Jumlah Produksi Benih/Bibit Ternak melalui Inseminasi Buatan Optimalisasi Peningkatan Standarisasi dan kapasitas laboratorium IB di UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagai Penghasil Semen Beku Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak dengan memaksimalkan Pengolahan Lahan dan Sumberdaya Pendukung Lainnya	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	2	27 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	22	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Balai Perbibitan Ternak	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Penguatan Pakan Tambahan (Kosentrat untuk Indukan Hypofungsi) Jumlah Peningkatan Kualitas Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan (Pengujian Sampel Pakan) Jumlah Pengembangan dan Pembudidayaan HPT Unggul di UPTD Balai Pembibitan Ternak Terpenuhinya pakan satwa di Kebun Binatang Jambi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	2	27	3	
3	3	22	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Balai Perbibitan Ternak	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pakan Terlaksananya Kegiatan Seminar Nasional Pakan Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fungsional Pengawas Mutu Pakan Pengembangan kapasitas petugas pengawas mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak melalui pelatihan dan bimtek lainnya	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	2	27	3	
3	3	22		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (kambing)			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		7	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	22	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Balai Perbibitan Ternak	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak (Sapi Jantan) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Sapi Betina) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Kambing Jantan) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Kambing Betina) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Ayam) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Itik) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Kelinci) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	7	2	27	3
3	3	22	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Balai Perbibitan Ternak	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Pakan Ternak Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	22	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Perbibitan dan Produksi Ternak	- Pengembangan ternak Ruminansia - Pengadaan ternak - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak (Sapi Jantan) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Sapi Betina) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Kambing Jantan) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Kambing Betina) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Ayam) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Itik) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Tersedianya Benih/Bibit Ternak (Kelinci) yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	7	2	27	3
3	3	22	10	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Pakan Ternak	- Terlaksananya pengembangan dan pengawasan pakan ternak (kab/kota) - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Pakan Ternak Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	24		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Meningkatnya indek Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		6	2	27	3	
3	3	24	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Promosi produk peternakan	Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Mempertahankan mutu dan khasiat obat	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	2	27	3	
3	3	24	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Permodalan, Investasi dan Penguatan Kelembagaan Peternak	Terfasilitasi kelompok tani ternak yang mendapat permodalan	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	2	27	3	
3	3	26		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat cemaran produk hasil peternakan			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang masuk dan keluar provinsi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	4	27	3	
3	3	26	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Fungsi Kesmavet	- Jumlah Sampel PAH yang diperiksa (sampel) - Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Kesrawan (unit) - Pengawan dan pendampingan pemotongan ternak (kegiatan)	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Adanya Peta Penyakit Hewan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang masuk dan keluar provinsi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	4	27	3	
3	3	26	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Fungsi Kesmavet	- Jumlah Sampel PAH yang diperiksa (sampel) - Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Kesrawan (unit) - Pengawan dan pendampingan pemotongan ternak (kegiatan)	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah buku informasi penyakit hewan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang masuk dan keluar provinsi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	4	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	3	26	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Fungsi Kesmavet	- Jumlah Sampel PAH yang diperiksa (sampel) - Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Kesrawan (unit) - Pengawan dan pendampingan pemotongan ternak (kegiatan)	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Adanya petugas cek point	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang masuk dan keluar provinsi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	4	27 3
3	3	28		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Peningkatan Akreditasi Laboratorium			Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Akreditasi Laboratorium	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	4	27 3
3	3	28	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet	- Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium (pelatihan petugas Laboratorium) - Sarana dan Prasarana Laboratorium (paket) - Pembinaan Lab. Tipe c (kab/Kota)	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pengujian sample terakreditasi Peningkatan Akreditasi Laboratorium	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Akreditasi Laboratorium	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	4	27 3
3	3	19		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura			Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi	Luasan Pengembangan Kawasan Pangan Terpadu (Ha) Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Luasan Denfarm Padi Jajar Legowo Luasan Denfarm Padi Hemat Benih Jumlah Dokumentasi Kajian Strategis Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
									Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung											
									Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)											
									Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura											
									Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura											
									Jumlah Prasarana Pasar Tani											
									Jumlah pengendalian inflasi cabai merah											
									Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi											
									Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU)											
									Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher)											
									Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi	Luasan Pengembangan Kawasan Pangan Terpadu (Ha) Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Luasan Denfarm Padi Jajar Legowo Luasan Denfarm Padi Hemat Benih Jumlah Dokumentasi Kajian Strategis Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung	Luasan Pengembangan Jagung (Ha) Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung (Bulan) Frekuensi Pertemuan Evaluasi Peningkatan Produksi Jagung (Kali)	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung														
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)														
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura														
						Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura														
						Jumlah Prasarana Pasar Tani														
						Jumlah pengendalian inflasi cabai merah														
						Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi														
						Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (RMU)														
						Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (Power Thresher)														
						Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung	Luasan Pengembangan Jagung (Ha) Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung (Bulan) Frekuensi Pertemuan Evaluasi Peningkatan Produksi Jagung (Kali)	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi	Persentase penyediaan benih padi unggul bersertifikat dan tersedianya benih padi unggul bersertifikat di BBI untuk memenuhi kebutuhan benih	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
						Koordinasi, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan penguatan kelembagaan perbenihan padi	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung													
							Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)													
							Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura													
							Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura													
							Jumlah Prasarana Pasar Tani													
							Jumlah pengendalian inflasi cabai merah													
							Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi													
							Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (RMU)													
							Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (Power Thresher)													
							Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi	Persentase penyediaan benih padi unggul bersertifikat dan tersedianya benih padi unggul bersertifikat di BBI untuk memenuhi kebutuhan benih Koordinasi, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan penguatan kelembagaan perbenihan padi	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura	Jumlah Kabupaten Pengembangan Sayuran Organik (Kentang) di Petani	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura Jumlah Prasarana Pasar Tani Jumlah pengendalian inflasi cabai merah Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU) Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher) Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
3	3	19	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura	Jumlah Kabupaten Pengembangan Sayuran Organik (Kentang) di Petani	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura		Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura Jumlah Prasarana Pasar Tani Jumlah pengendalian inflasi cabai merah Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (RMU) Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (Power Thresher) Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura		Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	19	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija	Penyediaan benih palawija unggul bersertifikat dan tersedianya benih padi unggul bersertifikat di BBI Palawija untuk memenuhi kebutuhan benih	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
									Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung											
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)														
						Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura														
						Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura														
						Jumlah Prasarana Pasar Tani														
						Jumlah pengendalian inflasi cabai merah														
						Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi														
						Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (RMU)														
						Jumlah Fasilitasi Sarana Pasca Panen (Power Thresher)														
						Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	19	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija	Penyediaan benih palawija unggul bersertifikat dan tersedianya benih padi unggul bersertifikat di BBI Palawija untuk memenuhi kebutuhan benih	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	21	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro	Penyediaan Benih Kentang Unggul Bersertifikat, dan Tersedianya Benih Kentang Unggul Bersertifikat di BBI Kentang Kayu Aro untuk memenuhi Kebutuhan Benih	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura Jumlah Prasarana Pasar Tani Jumlah pengendalian inflasi cabai merah Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU) Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher) Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	21	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro	Penyediaan Benih Kentang Unggul Bersertifikat, dan Tersedianya Benih Kentang Unggul Bersertifikat di BBI Kentang Kayu Aro untuk memenuhi Kebutuhan Benih	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3
3	3	19	45	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase penggunaan benih TPH unggul bersertifikat dan tersedianya benih TPH unggul bersertifikat di penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	46	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias		Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
							Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung													
							Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)													
							Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura													
							Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura													
							Jumlah Prasarana Pasar Tani													
							Jumlah pengendalian inflasi cabai merah													
							Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi													
							Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU)													
							Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher)													
							Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura													
3	3	19	46	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	19	46	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Pertanian Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Laboratorium Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	1	3	27	3	
3	3	19	46	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias		Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	47	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura			Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura Jumlah Prasarana Pasar Tani Jumlah pengendalian inflasi cabai merah Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU) Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher) Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
3	3	19	47	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	70	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pasca Panen Hortikultura		Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3		3	19	72	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kacang Kacangan dan Umbi umbian	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3
						Luasan Pengembangan Kedelai di Petani (Ha)	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung													
					Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura													
					Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hortikultura	Jumlah Prasarana Pasar Tani	Jumlah pengendalian inflasi cabai merah													
					Frekuensi Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Petani/Petugas Peningkatan Produksi Kedelai (Kali)	Jumlah Bantuan Kemasan Beras Lokal Jambi	Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (RMU)													
						Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen (Power Thresher)	Jumlah Sertifikasi Organik Produk Hortikultura													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	72	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kacang Kacangan dan Umbi umbian	Luasan Pengembangan Kedelai di Petani (Ha) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota) Frekuensi Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Petani/Petugas Peningkatan Produksi Kedelai (Kali)	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3
3	3	19	74	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pasca Panen Tanaman Pangan	Terlaksananya Pembinaan penanganan pasca panen Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kedelai) ke Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Survey Susut Hasil	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	27	3	
3	3	1	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Rancangan Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	Koordinasi, Pembinaan , Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Perencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Rancangan Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	Koordinasi, Pembinaan , Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Perencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	1	27	3	
3	3	1	29	Urusan Pilihan	Pertanian	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan	Frekuensi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi. Lamanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kegiatan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1	29	Urusan Pilihan	Pertanian	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan	Frekuensi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi. Lamanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan SKPD Terselenggarannya kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian. Jumlah dokumen data statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Terselenggarannya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	1	27	3	
3	3	1	29	Urusan Pilihan	Pertanian	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan	Frekuensi Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi. Lamanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD. Lamanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1	30	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Frekuensi Pertemuan petugas data statistik pertanian Jumlah dokumen data statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan SKPD Terselenggarannya kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian. Jumlah dokumen data statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Terselenggarannya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	1	27	3	
3	3	1	30	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Frekuensi Pertemuan petugas data statistik pertanian Jumlah dokumen data statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD. Lamanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	2		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	27	3	
3	3	2	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor pada UPTD Dinas TPHP Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	27	3	
3	3	2	5	Urusan Pilihan	Pertanian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 3	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20	3	1	27	3	
3	3	2	5	Urusan Pilihan	Pertanian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21	3	1	27	3	
3	3	2	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	27	3	
3	3	2	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14	3	1	27	3	
3	3	2	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22	3	1	27	3	
3	3	2	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24	3	1	27	3	
3	3	2	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	2	10	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan maubeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Perlengkapan Mebeleur Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	3	1	27	3
3	3	2	11	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan Komputer	Tersedianya Peralatan Produksi Pertanian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	27	3
3	3	2	11	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan Komputer	Tersedianya Peralatan Produksi Pertanian	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	27	3
3	3	2	13	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan peralatan gedung kantor (Dana Alokasi Khusus)	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	27	3
3	3	2	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan mebeleur (Dana Alokasi Khusus)		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Perlengkapan Mebeleur Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	3	1	27	3
3	3	2	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan Komputer (Dana Alokasi Khusus)		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	27	3
3	3	2	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan Komputer (Dana Alokasi Khusus)		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	27	3
3	3	2	22	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	3	1	27	3
3	3	2	22	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	3	1	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lamanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Lamanya Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	3	1	27	3	
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lamanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lamanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31	3	1	27	3	
3	3	2	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	3	1	27	3	
3	3	2	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33	3	1	27	3	
3	3	2	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34	3	1	27	3	
3	3	2	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35	3	1	27	3	
3	3	2	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	36	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pengadaan krehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pengadaan krehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	2	48	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan/ renovasi gedung kantor (Dana Alokasi Khusus)	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	27	3	
3	3	3		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan disiplin aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	27	3	
3	3	3	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Stel)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	1	27	3	
3	3	3	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Stel)	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	1	27	3	
3	3	1		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	27	3	
3	3	1	31	Urusan Pilihan	Pertanian	Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian	Frekuensi Pelaksanaan Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian Jumlah Dokumen Database Kepegawaian Jumlah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan kepada Seluruh ASN	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	4	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	3	1	31	Urusan Pilihan	Pertanian	Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian	Frekuensi Pelaksanaan Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian Jumlah Dokumen Database Kepegawaian Jumlah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi Pelaksanaan Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian Jumlah Dokumen Database Kepegawaian Jumlah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	4	1	27 3
3	3	5		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	27 3
3	3	5	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Pendidikan dan pelatihan formal	Lamanya mengikuti kursus/pelatihan pelatihan (Tahun)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lamanya mengikuti kursus/pelatihan pelatihan (Tahun)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur dan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	1	27 3
3	3	6		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	27 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	6	38	Urusan Pilihan	Pertanian	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan SKPD Terselenggarannya kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian. Jumlah dokumen data statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Terselenggarannya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pebangunan Peternakan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	1	27	3	
3	3	6	38	Urusan Pilihan	Pertanian	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD. Lamanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara RKPD, KUA, PPA, RAPBD dan Perda APBD Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Bahan Administrasi untuk Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari SKPD	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	2	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	2	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	2	1	27	3
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lamanya Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	2	1	27	3
3	3	12		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27	3
3	3	12	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan, Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	3	12	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan, Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian		Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27 3
3	3	12	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan, Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Publikasi Produk Hasil Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	27 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	12	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan, Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura		Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3	
3	3	12		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Layak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	4	27	3	
3	3	12	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan, Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura		Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kompetensi Petugas Penilai Persyaratan Teknis	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Layak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian Hewan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	4	27	3	
3	3	12		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	7	27	3	
3	3	12	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan, Daya Saing dan Mutu Produk Hortikultura		Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah informasi teknologi, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang desiminasi	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	7	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	2		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27	3	
3	3	2	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor pada UPTD Dinas TPHP Provinsi Jambi	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Pertanian Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Laboratorium Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	1	3	27	3	
3	3	2	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor pada UPTD Dinas TPHP Provinsi Jambi	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Pertanian Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPTD Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	1	3	27	3	
3	3	2	22	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Pertanian Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Laboratorium Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	1	3	27	3	
3	3	2	48	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan/ renovasi gedung kantor (Dana Alokasi Khusus)	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Pertanian Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Laboratorium Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	1	3	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	2	48	Urusan Pilihan	Pertanian	Pembangunan/ renovasi gedung kantor (Dana Alokasi Khusus)	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPTD Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	1	3	27	3	
3	3	19		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura			Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	27	3	
3	3	19	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi	Persentase penyediaan benih padi unggul bersertifikat dan tersedianya benih padi unggul bersertifikat di BBI untuk memenuhi kebutuhan benih Koordinasi, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan penguatan kelembagaan perbenihan padi	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Tanaman Pangan Tersedianya benih sumber padi Tersedianya benih sumber palawija Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih padi dan palawija Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih TP	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Hortikultura Tersedianya benih sumber hortikultura buah-buahan Tersedianya benih sumber hortikultura sayur-sayuran Tersedianya benih sumber florikultura Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Hortikultura, Taman Anggrek dan BBI Kentang Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI/BBU Hortikultura Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih hortikultura	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	19	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija	Penyediaan benih palawija unggul bersertifikat dan tersedianya benih padi unggul bersertifikat di BBI Palawija untuk memenuhi kebutuhan benih	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Tanaman Pangan Tersedianya benih sumber padi Tersedianya benih sumber palawija Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih padi dan palawija Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih TP	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	19	21	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro	Penyediaan Benih Kentang Unggul Bersertifikat, dan Tersedianya Benih Kentang Unggul Bersertifikat di BBI Kentang Kayu Aro untuk memenuhi Kebutuhan Benih	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Hortikultura Tersedianya benih sumber hortikultura buah-buahan Tersedianya benih sumber hortikultura sayur-sayuran Tersedianya benih sumber florikultura Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Hortikultura, Taman Anggrek dan BBI Kentang Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI/BBU Hortikultura Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih hortikultura	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	2	27	3	
3	3	19	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih/ Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Hortikultura Tersedianya benih sumber hortikultura buah-buahan Tersedianya benih sumber hortikultura sayur-sayuran Tersedianya benih sumber florikultura Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Hortikultura, Taman Anggrek dan BBI Kentang Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI/BBU Hortikultura Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih hortikultura	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Tanaman Pangan Tersedianya benih sumber padi Tersedianya benih sumber palawija Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih padi dan palawija Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih TP	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	45	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase penggunaan benih TPH unggul bersertifikat dan tersedianya benih TPH unggul bersertifikat di penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Hortikultura Tersedianya benih sumber hortikultura buah-buahan Tersedianya benih sumber hortikultura sayur-sayuran Tersedianya benih sumber florikultura Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Hortikultura, Taman Anggrek dan BBI Kentang Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI/BBU Hortikultura Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih hortikultura	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	19	45	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase penggunaan benih TPH unggul bersertifikat dan tersedianya benih TPH unggul bersertifikat di penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan dan Pengujian Benih/ Bibit Tanaman Pangan Tersedianya benih sumber padi Tersedianya benih sumber palawija Tersedianya sarana dan prasarana pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, pendampingan penangkar benih padi dan palawija Terlaksananya Pembinaan, pendampingan dan pengawalan pada BBI Padi dan BBI Palawija Terlaksananya Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih TP	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhinya Kebutuhan Benih Bermutu Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jambi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	27	3	
3	3	19		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatkan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatkan Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	19	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi	Luasan Pengembangan Kawasan Pangan Terpadu (Ha) Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Luasan Denfarm Padi Jajar Legowo Luasan Denfarm Padi Hemat Benih Jumlah Dokumentasi Kajian Strategis Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Peserta Pertemuan Apresiasi Mekanik Alsintan UPJA/ Workshop Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatnya Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3	
3	3	19	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung	Luasan Pengembangan Jagung (Ha) Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung (Bulan) Frekuensi Pertemuan Evaluasi Peningkatan Produksi Jagung (Kali)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Peserta Pertemuan Apresiasi Mekanik Alsintan UPJA/ Workshop Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatnya Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura	Jumlah Kabupaten Pengembangan Sayuran Organik (Kentang) di Petani	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Peserta Pertemuan Apresiasi Mekanik Alsintan UPJA/ Workshop Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatkan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatkan Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3
3	3	19	47	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Peserta Pertemuan Apresiasi Mekanik Alsintan UPJA/ Workshop Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatkan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatkan Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	19	72	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kacang Kacangan dan Umbi umbian	Luasan Pengembangan Kedelai di Petani (Ha) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota) Frekuensi Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Petani/Petugas Peningkatan Produksi Kedelai (Kali)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Peserta Pertemuan Apresiasi Mekanik Alsintan UPJA/ Workshop Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Alsintan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1). Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); 2). Tersalurnya Pupuk Bersubsidi; 3) Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi dalam Mendukung Produksi Pertanian; 4) Meningkatnya Luasan Areal Pertanian.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3	
3	3	19		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Peningkatan persentase penguatan pengamanan tanaman dari gangguan OPT Peningkatan persentase pengamanan tanaman dari gangguan DPI Penurunan Persentase antisipasi serangan OPT tertentu Peningkatan Persentase Pertanian Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	19	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati	Jumlah penerapan PHT berbasis agens hayati	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Penurunan luas areal tanam dari gangguan OPT	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Peningkatan persentase penguatan pengamanan tanaman dari gangguan OPT Peningkatan persentase pengamanan tanaman dari gangguan DPI Penurunan Persentase antisipasi serangan OPT tertentu Peningkatan Persentase Pertanian Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	27	3
3	3	19	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati	Jumlah penerapan PHT berbasis agens hayati	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Penurunan luas areal tanam terkena DPI (banjir/Keringan)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Peningkatan persentase penguatan pengamanan tanaman dari gangguan OPT Peningkatan persentase pengamanan tanaman dari gangguan DPI Penurunan Persentase antisipasi serangan OPT tertentu Peningkatan Persentase Pertanian Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	5	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	3	19	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati	Jumlah penerapan PHT berbasis agens hayati	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Penurunan luas pembakaran jerami di lahan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Peningkatan persentase penguatan pengamanan tanaman dari gangguan OPT Peningkatan persentase pengamanan tanaman dari gangguan DPI Penurunan Persentase antisipasi serangan OPT tertentu Peningkatan Persentase Pertanian Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	27 3
3	3	19	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati	Jumlah penerapan PHT berbasis agens hayati	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penurunan luas lahan pasca bencana	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Peningkatan persentase penguatan pengamanan tanaman dari gangguan OPT Peningkatan persentase pengamanan tanaman dari gangguan DPI Penurunan Persentase antisipasi serangan OPT tertentu Peningkatan Persentase Pertanian Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	5	27 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	19	43	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPAH	Jumlah kelembagaan POS IPAH	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Penurunan luas areal tanam dari gangguan OPT	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Peningkatan persentase penguatan pengamanan tanaman dari gangguan OPT Peningkatan persentase pengamanan tanaman dari gangguan DPI Penurunan Persentase antisipasi serangan OPT tertentu Peningkatan Persentase Pertanian Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	27	3	
3	3	19		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	7	27	3	
3	3	19	45	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase penggunaan benih TPH unggul bersertifikat dan tersedianya benih TPH unggul bersertifikat di penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan koorporasi petani yang terbentuk atau dikembangkan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	7	27	3	
3	3	19	45	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase penggunaan benih TPH unggul bersertifikat dan tersedianya benih TPH unggul bersertifikat di penangkar untuk memenuhi kebutuhan benih	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang di dampingi pengembangannya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terwujudnya jumlah petani dan petugas terlatih dan terampil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	7	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	28		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Peningkatan Akreditasi Laboratorium			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	2	27	3	
3	3	28	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan	- Jumlah Spesimen Keswan dan Kesmavet (spesimen) - Jumlah Pemeriksaan sampel Keswan dan kesmavet - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Penguatan Pakan Tambahan (Kosentrat untuk Indukan Hypofungsi) Jumlah Peningkatan Kualitas Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan (Pengujian Sampel Pakan) Jumlah Pengembangan dan Pembudidayaan HPT Unggul di UPTD Balai Pembibitan Ternak Terpenuhinya pakan satwa di Kebun Binatang Jambi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	2	27	3	
3	3	28	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan	- Jumlah Spesimen Keswan dan Kesmavet (spesimen) - Jumlah Pemeriksaan sampel Keswan dan kesmavet - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pakan Terlaksananya Kegiatan Seminar Nasional Pakan Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fungsional Pengawas Mutu Pakan Pengembangan kapasitas petugas pengawas mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak melalui pelatihan dan bimtek lainnya	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Pakan Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	3	28		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Peningkatan Akreditasi Laboratorium			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		6	2	27 3
3	3	28	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan	- Jumlah Spesimen Keswan dan Kesmavet (spesimen) - Jumlah Pemeriksaan sampel Keswan dan kesmavet - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Mempertahankan mutu dan khasiat obat	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	2	27 3
3	3	29		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah pengunjung			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	3	27 3
3	3	29	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	- Persentase Angka Kematian Satwa (%) - Pemeliharaan Satwa di Kebun Binatang (ekor)	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	- Pemeliharaan Satwa di Kebun Binatang Persentase Jumlah Kematian Hewan di Kebun Binatang	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	27 3
3	3	28		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Peningkatan Akreditasi Laboratorium			Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Akreditasi Laboratorium	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	6	27 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	28	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan	- Jumlah Spesimen Keswan dan Kesmavet (spesimen) - Jumlah Pemeriksaan sampel Keswan dan kesmavet - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Terakreditasi	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Akreditasi Laboratorium	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	27	3
3	3	28	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Monitoring, Surveilans dan Pemeriksaan	- Jumlah Spesimen Keswan dan Kesmavet (spesimen) - Jumlah Pemeriksaan sampel Keswan dan kesmavet - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan, pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi (Kab/Kota)	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Terpenuhinya Laboratorium yang Layak	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Akreditasi Laboratorium	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	27	3
3	3	29		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah pengunjung			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	27	3
3	3	29	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Kebun Binatang	- Tersedianya Sarana dan Prasarana (unit) - Terlaksananya operasional kebun binatang (tahun)	Penilaian Kultivar SDG Hewan	- Tersedianya Sarana dan Prasarana operasional kebun binatang	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	2	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	29		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah pengunjung			Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27	3	
3	3	29	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengembangan Pelayanan Pengunjung dan Ketatausahaan	- Terlaksananya operasional kebun binatang (tahun) - Tersedianya Sarana dan Prasarana (unit)	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Promosi Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah Promosi Luar Daerah yang terlaksana Jumlah Pasar Tani yang terlaksana Jumlah peserta pertemuan teknis pengolahan hasil dan perbaikan kemasan dan pelabelan Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen hortikultura Jumlah peserta pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian, Jalan Usaha Tani dan Komoditas Pertanian dalam Satu Kawasan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya efesiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Perkebunan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	27	3	
3	3	1	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya kegiatan Administrasi surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	27	3	
3	3	1	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	1	27	3	
3	3	1	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	1	27	3	
3	3	1	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	27	3	
3	3	1	10	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Operasional Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	27	3	
3	3	1	12	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat - alat listrik berupa lampu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	27	3	
3	3	1	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	1	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman Dinas	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minuman Dinas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16	3	1	27	3	
3	3	1	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman Dinas	Penyediaan Makanan dan Minuman		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	27	3	
3	3	1	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kelancaran dan koordinasi Dinas	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	27	3	
3	3	2		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	27	3	
3	3	2	5	Urusan Pilihan	Pertanian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21	3	1	27	3	
3	3	2	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23	3	1	27	3	
3	3	2	10	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebelair kantor	Pengadaan Mebeleur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	3	1	27	3	
3	3	2	11	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan Komputer	jumlah komputer yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	27	3	
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	3	1	27	3	
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	3	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31	3	1	27	3	
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	40	3	1	27	3	
3	3	2	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41	3	1	27	3	
3	3	2	26	Urusan Pilihan	Pertanian	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelhara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38	3	1	27	3	
3	3	2	42	Urusan Pilihan	Pertanian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	3		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	27	3	
3	3	3	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	1	27	3	
3	3	3	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Korpri		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	4	1	27	3	
3	3	3	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian PDH	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	4	1	27	3	
3	3	5		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	27	3	
3	3	5	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	1	27	3	
3	3	6		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	27	3	
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	1	27	3	
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	1	27	3	
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	1	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	1	27	3
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	2	1	27	3
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	2	1	27	3
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	2	1	27	3
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	2	1	27	3
3	3	6	37	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	laporan keuangan dan aset	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	2	1	27	3
3	3	6		Urusan Pilihan	Pertanian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	27	3
3	3	6	47	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan rencana kerja SKPD	Renstra, DPA, DPA-P, LAKIP, RENJA, Laporan Tahunan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	RKA,DPA, RENJA,RENSTRA, RKT, TAPKIN	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	1	27	3
3	3	6	47	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan rencana kerja SKPD	Renstra, DPA, DPA-P, LAKIP, RENJA, Laporan Tahunan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	1	27	3
3	3	6	47	Urusan Pilihan	Pertanian	Penyusunan rencana kerja SKPD	Renstra, DPA, DPA-P, LAKIP, RENJA, Laporan Tahunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	1	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	27	3	
3	3	23	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan dan Pelaporan	Tersedianyan Data Statistik Perkebunan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	1	27	3	
3	3	23	28	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan dan Pelaporan	Tersedianyan Data Statistik Perkebunan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	27	3	
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	27	3	
3	3	23	5	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Pengawasan Peredaran, Penyimpanan Pupuk dan Pestisida	Terlaksananya pembinaan pengawasan pupuk pestisida dan sosialisasi penerapan teknologi perkebunan	Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	27	3	
3	3	23	9	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemberdayaan Pelaku Perbenihan Tanaman Perkebunan	Terwujudnya pemberdayaan pelaku perbenihan tanaman perkebunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	27	3	
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	6	27	3	
3	3	23	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO	Terbinanya Perusahaan dan Proses sertifikasi kebun kelapa sawit dan swadaya sesuai Prinsip ISPO	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	23	18	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO	Terbinanya Perusahaan dan Proses sertifikasi kebun kelapa sawit dan swadaya sesuai Prinsip ISPO	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	27	3	
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27	3	
3	3	23	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi/TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan	Terbangunnya TAM dan optimasi Lahan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	3	27	3	
3	3	23	6	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan/Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	3	27	3	
3	3	23	16	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Road Map Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Jambi	Tersedianya Buku Roadmap komoditi Tanaman Kopi dan Drone Peta tematik	Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian		Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	27	3	
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	27	3	
3	3	23	7	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kopi Rakyat	Luas areal kopi rakyat bertambah	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	8	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembibitan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengadaan kecambah 40.000 butir dan pemeliharaan pre nursery	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	10	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan/Peremajaan/Replanting Kelapa Sawit	Terlaksananya Replanting kelapa sawit	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	23	12	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemeliharaan Kebun Entres	Tersedianya Kebun Entres Yang baik	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	13	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Pinang	Terpeliharanya Kebun Entres Pinang	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau	Pertemuan Rekonsiliasi benih saprodi, Uji Mutilokasi Tembakau	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	17	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam	Terlaksananya Percontohan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	20	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam	Terlaksananya Pendapatan Petani Kelapa melalui Peremajaan Tanaman Kelapa	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	21	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Tanaman Lada untuk Peningkatan Pendapatan Petani Karet	terbangunya kebun lada	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	25	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Mutu Benih Perkebunan		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	2	27	3	
3	3	23	26	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Mutu Benih Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	
3	3	23	29	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Rakyat	Terbangunnya Kebun Karet	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	23	30	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Rempah dan Penyegar Komoditi Perkebunan	Meningkatnya Peredaran dan Penggunaan Benih Unggul Komoditi Perkebunan	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	2	27	3
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	27	3
3	3	23	24	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Bimbingan Teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agen Hayati bagi Petani Provinsi jambi	Terkendalinya Serangan OPT Perkebunan	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	2	27	3
3	3	25		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	NTUP Perkebunan			Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	27	3
3	3	25	1	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengawasan Tata Niaga TBS dan Bokar	Terlaksananya Penetapan Harga TBS dan Pembinaan Bokar	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3
3	3	25	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB)	Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Modal UPPB)	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3
3	3	25	4	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Penataan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	1	3	27	3
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	3	23	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Terlaksananya fasilitas / mediasi kasus GUP dan konflik perkebunan	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	27	3
3	3	23	3	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB	terbangunnya demplot PLTB di 2 kab	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	27	3
3	3	23	4	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Perncegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun	Terlaksananya pertemuan koordinasi kebakaran lahan dan kebun	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	27	3
3	3	23	23	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UUPTD dan LH	Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	27	3
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	7	27	3
3	3	23	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan Perkebunan	Terselenggaranya Sosialisasi Teknologi Perkebunan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	7	27	3
3	3	23	15	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau	Pertemuan Rekonsiliasi benih saprodi, Uji Mutilokasi Tembakau	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	7	27	3
3	3	23	19	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	7	27	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	3	23	22	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Lembaga Petani dan Pelaku Usaha Komoditi Perkebunan	Terselenggaranya Sosialisasi Teknologi Perkebunan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	7	27	3	
3	3	23		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	7	27	3	
3	3	23	14	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Teknologi Pembangunan Perkebunan	Terselenggaranya Sosialisasi Teknologi Perkebunan	Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	7	27	3	
3	3	25		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	NTUP Perkebunan			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	6	27	3	
3	3	25		Urusan Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	NTUP Perkebunan			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	7	27	3	
3	3	25	2	Urusan Pilihan	Pertanian	Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar		Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	7	27	3	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Kehutanan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi			Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																											
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE															
3	4	1	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kantor Terkait Penerangan, Komunikasi dan Air	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase Pemenuhan Fasilitas Kantor Terkait Penerangan, Komunikasi dan Air	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	8	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																						
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE														
3	4	1	10	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3										
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III																					
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun																					
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX																					
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII																					
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV																					
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)																					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	4	1	11	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun	Administrasi Umum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	12	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
									Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII											
									Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)											
3	4	1	13	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	15	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	17	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII													
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	18	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII											
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	56	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	57	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	58	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	59	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3		4	1	60	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3		4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																	
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																								
3		4	1	61	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3																		
							Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I				Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III													Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	62	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
3		4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	63	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3		4	1	64	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																					
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE										
3		4	1	65	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur		Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3				
									Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)																	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	66	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas Kehutanan dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3		4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	28	3
							Persentase Kenyamanan Kerja Lingkungan Kantor													
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII														
						Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor Dinas Dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)		Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas dalam Setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	1	67	Urusan Pilihan	Kehutanan	Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam setahun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP Kerinci Unit I Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Persentase pelaksanaan kegiatan rutin di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	28	3
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		7	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	15	9	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Persentase kontribusi daerah sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase kontribusi daerah sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	3	28	3	
3	4	15	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batnghari	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase kontribusi daerah sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	3	28	3	
3	4	15	21	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	7	3	28	3	
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	28	3	
3	4	15	5	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	5	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	13	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendallandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	14	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	15	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	16	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	17	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	18	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP UnitIX Tebo Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	19	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendallandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batnghari	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	21	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	22	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3
3	4	1		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi			Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	1	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Tertib Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tertib Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Persentase SDM bidang penatausahaan keuangan dan aset yang terampil	Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	1	28	3	
3	4	1		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	28	3	
3	4	2		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Disiplin aparatur			Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	28	3	
3	4	2	5	Urusan Pilihan	Kehutanan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21	3	1	28	3	
3	4	2	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23	3	1	28	3	
3	4	2	22	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase Pemenuhan Sarana Kerja (Gedung Bangunan)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana Kerja (Gedung Bangunan)	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	3	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	2	24	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase Pemenuhan Operasional Kendaraan Roda 2, 3 dan 4 dalam Setahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Operasional Kendaraan Roda 2, 3 dan 4 dalam Setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31	3	1	28	3	
3	4	2	28	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor dalam setahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor dalam setahun	Administrasi Umum	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35	3	1	28	3	
3	4	3		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Disiplin aparatur sesuai standar daerah			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Disiplin aparatur sesuai standar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	28	3	
3	4	3	2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Keseragaman Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Keseragaman Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Disiplin aparatur sesuai standar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	1	28	3	
3	4	5		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM yang Berkualitas			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Disiplin aparatur sesuai standar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	28	3	
3	4	5	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kehutanan yang berkualitas	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kehutanan yang berkualitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Disiplin aparatur sesuai standar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	1	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	6		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penilai SAKIP/Laporan Kinerja Dinas Kehutanan menuju nilai A			Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	28	3	
3	4	6	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaporan dan Penganggaran	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Pelaporan dan Penganggaran	Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	2	1	28	3	
3	4	6		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penilai SAKIP/Laporan Kinerja Dinas Kehutanan menuju nilai A			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	28	3	
3	4	6	39	Urusan Pilihan	Kehutanan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	1	28	3	
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengembangan Hutan Tanaman	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	8	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	15	14	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3	
3	4	15	14	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	3	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	15	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	16	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	17	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	18	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP UnitIX Tebo Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	19	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNB Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batnghari	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBP Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	22	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNBPN Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBPN Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBPN Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBPN Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3
3	4	15	22	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	3	3	28	3
3	4	15	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase penyebarluasan informasi dibidang kehutanan Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	3	28	3
3	4	15	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan laporan pengawasan HTI Persentase monitoring dan pembinaan pada pemegang ijin serta capaian penerimaan PNBPN Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBPN Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBPN Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNBPN Persentase monitoring, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi sektor kehutanan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	28	3
3	4	15	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	3	28	3
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	16	2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	Persentase penyebarluasan informasi dibidang kehutanan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	3	28	3
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		6	3	28	3
3	4	15	12	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Identifikasi potensi HHBK / Fasilitasi permohonan Izin HHBK	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Identifikasi potensi HHBK / Fasilitasi permohonan Izin HHBK Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	6	3	28	3
3	4	15	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batnghari	Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Identifikasi potensi HHBK / Fasilitasi permohonan Izin HHBK Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	6	3	28	3
3	4	15	21	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Identifikasi potensi HHBK / Fasilitasi permohonan Izin HHBK Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	6	3	28	3
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	3	28	3
3	4	17	8	Urusan Pilihan	Kehutanan	Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	Laporan hasil evaluasi ijin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Laporan hasil evaluasi ijin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	3	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	10	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase penyebarluasan informasi dibidang kehutanan Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	3	28	3
3	4	17	10	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase peningkatan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	3	28	3
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	28	3
3	4	17	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	9	Urusan Pilihan	Kehutanan	Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	Pendataan dan Sosialisasi Konflik	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pendataan dan Sosialisasi Konflik	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	28	3
							Jumlah pemegang ijin Perhutanan Sosial yang meningkat akses kelola kawasan hutan													
							Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan													
							Persentase monitoring, pembinaan, pengendaliandan fasilitasi sektor kehutanan													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan													
							Persentase optimalisasi pemanfaatan potensi hasil hutan													
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	15	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH.KPHL		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3	
3	4	15	13	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	28	3
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		6	3	28	3
3	4	16	4	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit I Kerinci	Persentase pengelolaan kawasan hutan	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	3	28	3
3	4	16	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	3	28	3
3	4	16	8	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	3	28	3
3	4	16	14	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	3	28	3
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	28	3
3	4	17	3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	5	3	28	3
3	4	17	3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	30	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Terkendalinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3
3	4	17	34	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Kerinci	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	35	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	28	3
3	4	17	36	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTd KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3
3	4	17	37	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	38	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	28	3
3	4	17	38	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3
3	4	17	38	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	39	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	5	3	28	3
3	4	17	40	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	17	41	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3
3	4	17	41	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	5	3	28	3
3	4	17	42	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	5	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	17	43	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Terkendalinya pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara cepat Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	28	3	
3	4	17	44	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	28	3	
3	4	17	44	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	5	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	18		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penurunan luas lahan kritis			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan luas lahan kritis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	6	28	3	
3	4	18	6	Urusan Pilihan	Kehutanan	Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dokumen Pengelolaan DAS Provinsi Jambi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Dokumen Pengelolaan DAS Provinsi Jambi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan luas lahan kritis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	6	28	3	
3	4	18	19	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan luas lahan kritis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	28	3	
3	4	18		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penurunan luas lahan kritis			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	3	28	3	
3	4	18	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan	Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	4	3	28	3	
3	4	18	5	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	18	5	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3
3	4	18	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	3	28	3
3	4	18	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	4	3	28	3
3	4	18	21	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	18	22	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	4	3	28	3	
3	4	18	22	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	4	3	28	3	
3	4	18	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	3	28	3	
3	4	18	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	4	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	18	23	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3
3	4	18	24	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	18	25	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3
3	4	18	26	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	4	3	28	3
3	4	18	26	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	4	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	18	27	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3
3	4	18	28	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasn Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3
3	4	18	29	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	4	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																		
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE										
3	4	18	30	Urusan Pilihan	Kehutanan	Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD TAHURA	Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, UPTD dan KTH	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	3	28	3						
							Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha									Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha										
							Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha									Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha										
							Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha									Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha										
							Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha									Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha										
							Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha									Persentase pemeliharaan Tahun I seluas 5 Ha										
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	3	28	3						
3	4	17	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	4	3	28	3						
3	4	17	41	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	3	28	3						
3	4	18		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penurunan luas lahan kritis			Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		9	3	28	3						
3	4	18	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan	Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	9	3	28	3						

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	18	1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pembuatan Bibit/benih Tanaman Kehutanan	Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Persentase Penyediaan Bibit Berkualitas	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Penurunan luas lahan kritis	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	9	3	28	3	
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	28	3	
3	4	17	45	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD TAHURA	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan	Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase pengembangan pengelolaan TAHURA	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	28	3	
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	4	28	3	
3	4	17	11	Urusan Pilihan	Kehutanan	Konservasi Kawasan Esensial (Bernilai Ekosistem Penting) dan Keanekaragaman Hayati	Dokumen identifikasi kawasan esensial di Provinsi Jambi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dokumen identifikasi kawasan esensial di Provinsi Jambi Persentase optimalisasi pengelolaan hutan kenali	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	4	28	3	
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	4	28	3	
3	4	17	11	Urusan Pilihan	Kehutanan	Konservasi Kawasan Esensial (Bernilai Ekosistem Penting) dan Keanekaragaman Hayati	Dokumen identifikasi kawasan esensial di Provinsi Jambi	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Dokumen identifikasi kawasan esensial di Provinsi Jambi	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	3	4	28	3	
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	16	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	28	3	
3	4	16	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan Persentase pemantauan, monitoring dan rencana kerja dalam pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	28	3	
3	4	16	11	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	28	3	
3	4	16	12	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase pemantauan, monitoring dan rencana kerja dalam pengelolaan kawasan hutan	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan Persentase pemantauan, monitoring dan rencana kerja dalam pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	28	3	
3	4	16	14	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan hutan Persentase pemantauan, monitoring dan rencana kerja dalam pengelolaan kawasan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	28	3	
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	16	1		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH, KPHL	Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3
3	4	16	5		Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase pengelolaan kawasan hutan	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	16	6	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3	
3	4	16	7	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	16	9	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3
3	4	16	13	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase pembinaan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan Persentase pengelolaan kawasan hutan yang difasilitasi Persentase pengembangan potensi pengelolaan hutan Persentase pengelolaan kawasan hutan Persentase monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan Persentase peningkatan perluasan akses dan informasi	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	3	28	3
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	28	3
3	4	16	15	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di UPTD TAHURA	Persentase pengembangan pengelolaan TAHURA	Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Persentase kawasan hutan yang dimonitor dan dijaga dari kerusakan Persentase pengembangan pengelolaan TAHURA	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	28	3
3	4	16	15	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di UPTD TAHURA	Persentase pengembangan pengelolaan TAHURA	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	Persentase pengembangan pengelolaan TAHURA	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	1	4	28	3
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		7	3	28	3
3	4	16	10	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan hutan	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase kontribusi daerah sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Persentase optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan PNPB Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	3	28	3
3	4	17		Urusan Pilihan	Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	28	3
3	4	5		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM yang Berkualitas			Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	28	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	4	5	20	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Aset	Persentase SDM bidang penatausahaan keuangan dan aset yang terampil	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tertib Administasi dan Pengelolaan Keuangan Persentase SDM bidang penatausahaan keuangan dan aset yang terampil	Administrasi Keuangan	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	1	28	3	
3	4	15		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	28	3	
3	4	16		Urusan Pilihan	Kehutanan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan yang lestari			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	4	28	3	
3	4	16	16	Urusan Pilihan	Kehutanan	Kegiatan Pengelolaan Hutan Kenali	Persentase optimalisasi pengelolaan hutan kenali	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Dokumen identifikasi kawasan esensial di Provinsi Jambi Persentase optimalisasi pengelolaan hutan kenali	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	4	28	3	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	29	3	
3	5	1	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	1	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	1	29	3	
3	5	1	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	1	29	3	
3	5	1	7	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	1	8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	29	3	
3	5	1	10	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	29	3	
3	5	1	11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	1	12	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	29	3	
3	5	1	15	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	29	3	
3	5	1	17	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	1	18	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	29	3	
3	5	6		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	29	3	
3	5	6	28	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah kota/kab lokasi monev	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akhir kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	6	42	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyusunan Program Tahunan	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak jumlah kabupaten/kota peserta rakortek jumlah jenis peta GIS dicetak jumlah jenis buku/sarana infomasi dicetak	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	1	29	3	
3	5	6	42	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyusunan Program Tahunan	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak jumlah kabupaten/kota peserta rakortek jumlah jenis peta GIS dicetak jumlah jenis buku/sarana infomasi dicetak	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	1	29	3	
3	5	6	42	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyusunan Program Tahunan	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak jumlah kabupaten/kota peserta rakortek jumlah jenis peta GIS dicetak jumlah jenis buku/sarana infomasi dicetak	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	6	42	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Penyusunan Program Tahunan	Jumlah jenis laporan tahunan yang dicetak jumlah kabupaten/kota peserta rakortek jumlah jenis peta GIS dicetak jumlah jenis buku/sarana infomasi dicetak	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan akhir kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	1	29	3	
3	5	2		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	29	3	
3	5	2	5	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21	3	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	2	9	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana kantor Jumlah jenis pengadaan komputer	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	29	3
3	5	2	10	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis pengadaan mebeleur	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	3	1	29	3
3	5	2	11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengadaan Komputer	Jumlah jenis pengadaan komputer	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana kantor Jumlah jenis pengadaan komputer	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	5	2	22	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	3	1	29 3
3	5	2	24	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31	3	1	29 3
3	5	2	26	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33	3	1	29 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	2	42	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	29	3	
3	5	3		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	29	3	
3	5	3	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	5		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	29	3	
3	5	5	4	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	1	29	3	
3	5	5	4	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	4	1	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	5	4	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	4	1	29	3	
3	5	18		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Energi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)			Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	5	29	3	
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	5	29	3	
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan pelatihan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	5	29	3	
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi jumlah laporan akhir kegiatan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	5	29	3	
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	4	5	29	3	
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif Konservasi Energi	Jumlah pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi jumlah laporan akhir kegiatan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	4	5	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah bimbingan teknis konservasi energi	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	4	5	29	3	
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan akhir kegiatan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	persentase pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	4	5	29	3	
3	5	18		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Energi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	persentase penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	29	3	
3	5	18	11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitalisasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	jumlah laporan akkhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	persentase penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	18	11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitalisasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	persentase penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	5	29	3
3	5	18	12	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Koordinasi dan Pembinaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan pengusahaan EBT	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	persentase penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	29	3
3	5	18		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Energi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitaliasasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	29	3
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitaliasasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	29	3
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitaliasasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	6	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	18			Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Energi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)			Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	persentase penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	5	29	3
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitalisasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	persentase penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	5	29	3
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitalisasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi perizinan laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	persentase penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	5	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	18	11	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitalisasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	persentase penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	5	29	3
3	5	18	12	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Koordinasi dan Pembinaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan pengusahaan EBT	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	persentase penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	5	29	3
3	5	18		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Energi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitaliasasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	jumlah sarana peyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	6	6	29	3
3	5	18	11		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Jumlah PLTMH yang dibangun/direhab/direvitalisasi Jumlah PLTS yang dibangun/direhab/direvitalisasi jumlah dokumen yang disusun Jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah PLTMH yang direhab/revitalisasi jumlah PLTS yang direhab/revitaliasasi jumlah biogas dan digeser yang dibangun jumlah dokumen disusun	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	6	6	29	3
3	5	19			Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	3	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	19	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	3	29	3
3	5	19	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	3	3	29	3
3	5	19	3		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	3	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	3	29	3
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	3	29	3
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral logam dan batubara	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	3	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	19	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral logam dan batubara	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	3	29	3
3	5	19	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral logam dan batubara	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	3	29	3
3	5	19	2		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	persentase penatausahaan IUP mineral logam dan batubara	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	3	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	persentase penatausahaan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	persentase penatausahaan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	4	3	29	3
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bersama pemegang Izin Pertambangan rakyat (IPR)	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	persentase penatausahaan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5	4	3	29	3
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	persentase penatausahaan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	3	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	persentase penatausahaan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	3	29	3	
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam Batubara Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	persentase penatausahaan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	3	29	3	
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	persentase penatausahaan IUPOPK untuk pengolahan dan pemurnian	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	persentase penatausahaan IUPOPK untuk pengolahan dan pemurnian	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	5	3	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	persentase penatausahaan IUPOPK untuk pengolahan dan pemurnian	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	3	29	3	
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama	persentase penatausahaan IUPOPK untuk pengolahan dan pemurnian	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	3	29	3	
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	3	29	3		
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	6	3	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	3	29	3	
3	5	19	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	3	29	3	
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	persentase penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		7	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	persentase penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	7	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	jumlah surat keputusan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	persentase penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	7	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	persentase penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	7	3	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan Oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	persentase penerbitan izin sementara untuk penjualan mineral atau batubara yang tergal bagi pemegang IUP eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		11	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan Oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	persentase penerbitan izin sementara untuk penjualan mineral atau batubara yang tergal bagi pemegang IUP eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	11	3	29	3	
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penerbitan IUPOPK untuk pengangkutan dan penjualan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		8	3	29	3	
3	5	19	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah frekuensi permohonan izin yang diverifikasi kelengkapan	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penerbitan IUPOPK untuk pengangkutan dan penjualan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	8	3	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya	persentase persetujuan perubahan saham, direksi adn komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		10	3	29	3	
3	5	19	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi pemegang IUP diawasi dan dibina	Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya	persentase persetujuan perubahan saham, direksi adn komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	10	3	29	3	
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	persentase penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	29	3	
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data WIUP mineral bukan logam dan batuan	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	persentase penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	29	3	
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan Jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	persentase penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	19		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise			Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahnya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penerbitan IUP OP untuk penjualan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9	3	29	3
3	5	19	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan	Jumlah Frekuensi permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahnya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase penerbitan IUP OP untuk penjualan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1		9	3	29	3
3	5	20		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Penyelidikan,Pembinaan,Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Luas kawasan konservasi geologi dan air tanah			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1	2	29	3
3	5	20	6	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Geologi Lingkungan dan Pengelolaan Konservasi Air Tanah	jumlah laporan akhir kegiatan geopark merangin jumlah laporan akhir kegiatan penyelidikan geologi teknik jumlah laporan akhir kegiatan konservasi air tanah dan geologi lingkungan jumlah laporan akhir pemetaan zona konservasi dan produksi air tanah jumlah sumur pantau yang dibangun jumlah jenis dokumen/laporan/kajian kawasan lindung geologi	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2		1	2	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	20	6	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Geologi Lingkungan dan Pengelolaan Konservasi Air Tanah	Jumlah laporan akhir kegiatan geopark merangin jumlah laporan akhir kegiatan penyelidikan geologi teknik jumlah laporan akhir kegiatan konservasi air tanah dan geologi lingkungan jumlah laporan akhir pemetaan zona konservasi dan produksi air tanah jumlah sumur pantau yang dibangun jumlah jenis dokumen/laporan/kajian kawasan lindung geologi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	29	3
3	5	20	7	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi Sumber Daya Geologi ,Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi	Jumlah sumur bor air tanah yang dibangun jumlah dokumen kajian dan percontohan peningkatan nilai tambah bahan galian jumlah laporan akhir kegiatan identifikasi sumberdaya geologi jumlah jenis peta sumber daya geologi dibuat jumlah laporan akhir kegiatan identifikasi daerah/desa sulit air jumlah laporan akhir pemetaan potensi air tanah jumlah FGD sumberdaya geologi dilaksanakan jumlah jenis dokumen/laporan/informasi Hidrologi jumlah sosialisasi bencana geologi dilaksanakan jumlah alat early warning system yang dipasang jumlah laporan akhir kegiatan mitigasi bencana geologi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah peta zona konservasi air tanah pada CAT jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah laporan akhir kegiatan sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologi	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	20		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Penyelidikan,Pembinaan,Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Luas kawasan konservasi geologi dan air tanah			Penatausahaan Izin Pengeboran Izin Penggalian Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin pengeboran, izin pengendalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	29	3	
3	5	20	8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi,Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan air tanah jumlah laporan akhir inventarisasi air tanah jumlah sosialisasi air tanah dilaksanakan	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran Izin Penggalian Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pengeboran Izin Penggalian Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin pengeboran, izin pengendalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	2	29	3	
3	5	20	8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi,Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan air tanah jumlah laporan akhir inventarisasi air tanah jumlah sosialisasi air tanah dilaksanakan	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran Izin Penggalian Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Pengeboran Izin Penggalian Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin pengeboran, izin pengendalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	2	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	20	8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi,Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan air tanah jumlah laporan akhir inventarisasi air tanah jumlah sosialisasi air tanah dilaksanakan	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran Penggalian Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Penatausahaan Izin Pengeboran Izin Penggalian Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin pengeboran, izin pengendalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	2	29	3
3	5	20		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Penyelidikan,Pembinaan,Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Luas kawasan konservasi geologi dan air tanah			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan NPAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	20	7	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi Sumber Daya Geologi ,Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi	Jumlah sumur bor air tanah yang dibangun jumlah dokumen kajian dan percontohan peningkatan nilai tambah bahan galian jumlah laporan akhir kegiatan identifikasi sumberdaya geologi jumlah jenis peta sumber daya geologi dibuat jumlah laporan akhir kegiatan identifikasi daerah/desa sulit air jumlah laporan akhir pemetaan potensi air tanah jumlah FGD sumberdaya geologi dilaksanakan jumlah jenis dokumen/laporan/informasi Hidrologi jumlah sosialisasi bencana geologi dilaksanakan jumlah alat early warning system yang dipasang jumlah laporan akhir kegiatan mitigasi bencana geologi	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	jumlah data nilai perolehan air tanah (NPAT) jumlah laporan akhir kegiatan Jumlah laporan akhir kegiatan sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan NPAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	2	29	3	
3	5	20	8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi,Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan air tanah jumlah laporan akhir inventarisasi air tanah jumlah sosialisasi air tanah dilaksanakan	Penghitungan Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan NPAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	2	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	20	8	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Identifikasi,Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan air tanah jumlah laporan akhir inventarisasi air tanah jumlah sosialisasi air tanah dilaksanakan	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan air tanah	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	persentase penetapan NPAT dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah Tingkat ketersediaan data sumberdaya dan potensi bencana geologi Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat pengusahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	29	3
3	5	21		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		6	6	29	3
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	6	6	29	3
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	6	6	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	6	6	29	3
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	6	6	29	3
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	6	6	29	3
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	jumlah sarana peyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	6	6	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	21	1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	panjang jaringan ditangani Jumlah LPJU tenaga surya dipasang jumlah trafo dipasang jumlah desa belum berlistrik sasaran pemetaan jumlah dokumen RUKD	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	jumlah laporan akhir kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	persentase penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	6	6	29	3
3	5	21		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)			Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan serta penyewaan tenaga listrik	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	6	29	3
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan serta penyewaan tenaga listrik	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	29	3
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan serta penyewaan tenaga listrik	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	29	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	21	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan jumlah penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi (SLO) jumlah inspeksi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan serta penyewaan tenaga listrik	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	29	3	
3	5	21		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	29	3	
3	5	21	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan jumlah penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi (SLO) jumlah inspeksi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	persentase penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	21		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)			Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	3	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	3	6	29	3	
3	5	21	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan jumlah penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi (SLO) jumlah inspeksi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	21	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan jumlah penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi (SLO) jumlah inspeksi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	3	6	29	3	
3	5	21		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)			Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	persentase penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	persentase penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	5	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	persentase penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	5	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	21	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan jumlah penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi (SLO) jumlah inspeksi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	jumlah laporan akhir kegiatan	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	persentase penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	5	6	29	3	
3	5	21		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)			Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan, rencana usaha penyediaan dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan, rencana usaha penyediaan dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	6	29	3	
3	5	21	2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pengusahaan Ketenagalistrikan	jumlah kab/kota sasaran	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan, rencana usaha penyediaan dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	6	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	5	21	3	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan jumlah penerbitan nomor registrasi dan sertifikat laik operasi (SLO) jumlah inspeksi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	jumlah laporan akhir kegiatan	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	persentase persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan, rencana usaha penyediaan dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan panjang jaringan (JTM/JTR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	4	6	29	3	
3	5	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	29	3	
3	5	1		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	29	3	
3	5	18		Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Pengembangan Energi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)			Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	5	29	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah akhir kegiatan	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	5	29	3
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah akhir kegiatan	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	5	29	3
3	5	18	13	Urusan Pilihan	Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemanfaatan dan Efisiensi Energi	Jumlah laporan akhir kegiatan jumlah laporan akhir kegiatan Mitigas GRK	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah akhir kegiatan	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemanfaatan EBT (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Peningkatan pemanfaatan EBT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	5	29	3

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	15		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	6	30	3	
3	6	15	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawasi di pasaran	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawali di pasaran Periode pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	6	30	3	
3	6	15	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawasi di pasaran	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawali di pasaran	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	6	30	3	
3	6	15	6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Monitoring barang yang kadaluarsa di pasaran	Periode pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawali di pasaran Periode pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa di pasaran	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	6	30	3	
3	7	1		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	31	3	
3	7	1	1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat kerluar pertahun	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	1	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	1	2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM dan internet	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	1	31	3	
3	7	1	7	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	3	1	31	3	
3	7	1	8	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8	3	1	31	3	
3	7	1	10	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	3	1	31	3	
3	7	1	11	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	3	1	31	3	
3	7	1	12	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12	3	1	31	3	
3	7	1	13	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan komputer	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13	3	1	31	3	
3	7	1	15	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Periode pengelolaan perpustakaan Disperindag	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan - Periode pengelolaan perpustakaan perindag	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15	3	1	31	3	
3	7	1	17	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/pertemuan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/pertemuan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17	3	1	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	1	18	Urusan Pilihan	Perindustrian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	18	3	1	31	3	
3	7	2		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur			Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	1	31	3	
3	7	2	5	Urusan Pilihan	Perindustrian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21	3	1	31	3	
3	7	2	9	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan komputer	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	31	3	
3	7	2	10	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan meubeler	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan peralatan meubeler	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	3	1	31	3	
3	7	2	11	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan peralatan komputer	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan komputer	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	3	1	31	3	
3	7	2	24	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31	3	1	31	3	
3	7	2	28	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35	3	1	31	3	
3	7	2	30	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35	3	1	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	2	42	Urusan Pilihan	Perindustrian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39	3	1	31	3	
3	7	3		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	31	3	
3	7	3	2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	4	1	31	3	
3	7	5		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	31	3	
3	7	5	1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis yan diikuti	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis yan diikuti	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9	4	1	31	3	
3	7	6		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	1	31	3	
3	7	6	1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah laporan relisasi capaian kinerja program dan kegiatan - Jumlah aparatur perencanaan yan ditingkatkan kompetensinya	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah laporan relisasi capaian kinerja program dan kegiatan - Jumlah aparatur perencanaan yan ditingkatkan kompetensinya	Administrasi Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	2	1	31	3	
3	7	6	45	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyusunan laporan keuangan neraca aset		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Administrasi Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7	2	1	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	6		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	31	3	
3	7	6	33	Urusan Pilihan	Perindustrian	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SKPD		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	1	31	3	
3	7	6	47	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penyusunan rencana kerja SKPD		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	1	31	3	
3	7	6		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD Nilai SAKIP			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUJ IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	31	3	
3	7	6	49	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengembangan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	Jumah dokumen hasil pendataan IKM se Provinsi Jambi	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUJ IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	31	3	
3	7	16		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan usaha IKM Persentase peningkatan tenaga kerja IKM			Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	31	3	
3	7	16	9	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penguatan kelembagaan industri kecil	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	7	16	9	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penguatan kelembagaan industri kecil	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	31	3
3	7	16	9	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penguatan kelembagaan industri kecil	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelathan peningkatan mutu produk berbasis teknologi Jumlah produk industri berbasis teknologi yang dtingkatkan mutunya Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	31	3
3	7	16	9	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penguatan kelembagaan industri kecil	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil Jumlah peraltan/mesin yang diberikan kepada peaku IMB Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	2	31	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	16		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan usaha IKM Persentase peningkatan tenaga kerja IKM			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	31	3	
3	7	16	10	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengembangan rumah tenun Jambi	Jumlah perajin tenun yang dibina dan dikembangkan Periode fasilitasi sarana dan prasarana rumah tenun	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah perajin tenun yang dibina dan dikembangkan Periode fasilitas sarana dan prasarana rumah tenun Jumlah GKM - IKM fasilitator berprestasi provinsi jambi yan terpilih mewakili di tingkat nasional	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	3	31	3	
3	7	16	15	Urusan Pilihan	Perindustrian	Konveksi gugus kendali mutu tingkat provinsi	Jumlah GKM - IKM fasilitator berprestasi provinsi jambi yan terpilih mewakili di tingkat nasional	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah perajin tenun yang dibina dan dikembangkan Periode fasilitas sarana dan prasarana rumah tenun Jumlah GKM - IKM fasilitator berprestasi provinsi jambi yan terpilih mewakili di tingkat nasional	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	3	31	3	
3	7	16		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan usaha IKM Persentase peningkatan tenaga kerja IKM			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	31	3	
3	7	16	11	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pendataan IKM se Provinsi Jambi	Jumah dokumen hasil pendataan IKM se Provinsi Jambi Jumlah lokasi pendataan IKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumah dokumen hasil pendataan IKM se Provinsi Jambi	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	16	11	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pendataan IKM se Provinsi Jambi	Jumah dokumen hasil pendataan IKM se Provinsi Jambi Jumlah lokasi pendataan IKM	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan IKM se Provinsi Jambi	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUJ IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan SKPD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	31	3	
3	7	17		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase peningkatan SDM IMByang mendapat pelatihan teknologi indstri			Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	31	3	
3	7	17	5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengembangan teknologi industri tepat guna	Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	7	17	6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pelatihan peningkatan mutu produk industri berbasis teknologi	Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan peningkatan mutu produk berbasis teknologi Jumlah produk industri berbasis teknologi yang dtingkatkan mutunya Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan peningkatan mutu produk berbasis teknologi Jumlah produk industri berbasis teknologi yang dtingkatkan mutunya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	31	3
3	7	21		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri agro dan kimia	Persentase peningkatan industri agro dan kimia Persentase peningkatan tenaga kerja Industri Agro dan Kimia			Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	31	3
3	7	21	2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar	Jumlah peralatan/mesin/pelatihan yang diberikan kepada pelaku IMB	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil Jumlah peraltan/mesin yang diberikan kepada peaku IMB Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	2	31	3
3	7	21	2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Penguatan kelembagaan industri menengah dan besar	Jumlah peralatan/mesin/pelatihan yang diberikan kepada pelaku IMB	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peraltan/mesin yang diberikan kepada peaku IMB	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	2	31	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	21	3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Peningkatan SDM industri menengah dan besar	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	2	31	3	
3	7	21	3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Peningkatan SDM industri menengah dan besar	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelathan peningkatan mutu produk berbasis teknologi Jumlah produk industri berbasis teknologi yang dtingkatkan mutunya Jumlah pelaku IMB yang mendapat pelatihan teknis dibidang teknologi industri Jumlah pengembangan mesin teknologi tepat guna Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	2	31	3	
3	7	21	3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Peningkatan SDM industri menengah dan besar	Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bantuan peralatan/mesin yang diberikan kepada industr kecil Jumlah peraltan/mesin yang diberikan kepada peaku IMB Jumlah pelaku usaha IMB dan aparat yang mengikti diklat/bimtek industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	2	31	3	
3	7	21	9	Urusan Pilihan	Perindustrian	Sosialisasi dan Evaluasi RIPIP	Jumlah sosialisasi dan evaluasi RPIP dan RPIK	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah sosialisasi dan evaluasi RIPIP provinsi jambi	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6	1	2	31	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	21		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri agro dan kimia	Persentase peningkatan industri agro dan kimia Persentase peningkatan tenaga kerja Industri Agro dan Kimia			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	31	3	
3	7	21	1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengawasan teknis pengembangan industri menengah dan besar	Jumlah prusahaan indsutri menengah dan besar yang diawai perkembangannya	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah prusahaan indsutri menengah dan besar yang diawai perkembangannya	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	3	31	3	
3	7	21	1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengawasan teknis pengembangan industri menengah dan besar	Jumlah prusahaan indsutri menengah dan besar yang diawai perkembangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI IPUI IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Jumlah prusahaan indsutri menengah dan besar yang diawai perkembangannya	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase penngkatan usaha IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penngkatan usaha IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	31	3	
3	6	15		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	6	30	3	
3	6	15	5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengembangan dan pembinaan badan penyelesaian sengketa konsumen	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Jumlah lokasi pembinaan BPSK	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	- Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen - Jumlah lokasi pembinaan BPSK Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	15	5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengembangan dan pembinaan badan penyelesaian sengketa konsumen	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Jumlah lokasi pembinaan BPSK	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	- Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen - Jumlah lokasi pembinaan BPSK	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	6	30	3	
3	6	15	5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengembangan dan pembinaan badan penyelesaian sengketa konsumen	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen Jumlah lokasi pembinaan BPSK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	- Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen - Jumlah lokasi pembinaan BPSK	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	6	30	3	
3	6	15	7	Urusan Pilihan	Perdagangan	Sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	- Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen - Jumlah lokasi pembinaan BPSK Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	6	30	3	
3	6	15		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen			Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	2	30	3	
3	6	15	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawasi di pasaran	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawali di pasaran	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	2	30	3	
3	6	15	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawasi di pasaran	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawali di pasaran Periode identifikasi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	30	3	
3	6	15	9	Urusan Pilihan	Perdagangan	Identifikasi tertib niaga	Periode identifikasi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya Jumlah data pelaku usaha	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah produk barang ber-SNI wajib dan barang strategis yang diawali di pasaran Periode identifikasi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	2	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	15		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	4	30	3
3	6	15	9	Urusan Pilihan	Perdagangan	Identifikasi tertib niaga	Periode identifikasi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya Jumlah data pelaku usaha	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Periode identiikassi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	4	30	3
3	6	15		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	15	9	Urusan Pilihan	Perdagangan	Identifikasi tertib niaga	Periode identifikasi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya Jumlah data pelaku usaha	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Periode identiikassi tertib niaga terhadap barang pokok dan barang yang diatur peredarannya	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	2	30	3
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	7	30	3
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	7	30	3
3	6	18	10	Urusan Pilihan	Perdagangan	Promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	3	7	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	18	15	Urusan Pilihan	Perdagangan	Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Dokumen hasil Prognosa Jumlah Distributor terdaftar Jumlah distributor yang mengikuti temu usaha Jumlah peserta sosialisasi Distribusi Bapok e-commerce Jumlah pemantauan Bapok di tingkat distributor dan pasar tradisional	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	- Jumlah fasilitas pendampingan pelaksanaan lelang agro - Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikasi mutu bokar Jumlah dokumen hasil pendataan sarana perdagangan dan pedagang inormal se provinsi jambi	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	3	7	30	3
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	4	30	3
3	6	18	11	Urusan Pilihan	Perdagangan	Fasilitasi pasar murah	Jumlah kebutuhan barang pokok yang disubsidi Jumlah Fasilitasi Pasar Murah	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kebutuhan barang pokok yang disubsidi	Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	4	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	18	15	Urusan Pilihan	Perdagangan	Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Dokumen hasil Prognosa Jumlah Distributor terdaftar Jumlah distributor yang mengikuti temu usaha Jumlah peserta sosialisasi Distribusi Bapak e-commerce Jumlah pemantauan Bapak di tingkat distributor dan pasar tradisional	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	4	30	3	
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	7	30	3	
3	6	22		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program pengembangan standarisasi nasional	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	6	30	3	
3	6	22	1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	2	6	30	3	
3	6	22	2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutu ekspor dan impor	Periode penambahan ruang lingkup laboratorium	Verifikasi Mutu Produk	Periode penambahan ruang lingkup laboratorium	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	6	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	22	2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutu ekspor dan impor	Periode penambahan ruang lingkup laboratorium	Pengembangan Layanansertifikasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium Jumlah sosialisasi laboratorium kalibrasi Periode penambahan ruang lingkup laboratorium	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	6	30	3
3	6	22	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Sosialisasi laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi	Jumlah sosialisasi laboratorium kalibrasi	Pengembangan Layanansertifikasi	Periode pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat laboratorium Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium Jumlah sosialisasi laboratorium kalibrasi Periode penambahan ruang lingkup laboratorium	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	2	6	30	3
3	6	22	4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	Pengembangan Layanan Pengujian	konsumen Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	30	3
3	6	22	6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Survey IKM atas pelayanan lab kalibrasi dan lab pengujian	Score IKM atas pelayanan laboratorium kalibrasi dan Lab Pengujian	Pengembangan Layanan Pengujian	konsumen Jumlah pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	2	6	30	3
3	6	22		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program pengembangan standarisasi nasional	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	6	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	22		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program pengembangan standarisasi nasional	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	30	3	
3	6	23		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Persentase kenaikan nilai ekspor Persentase penurunan nilai impor			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	30	3	
3	6	23	2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pameran perdagangan luar negeri	Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti UKM daerah yang difasilitasi mengikuti pameran ekspor	Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor - Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti Jumlah pameran industri menengah pameran industri menengah dan besar yang di ikuti Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	1	5	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	23	2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pameran perdagangan luar negeri	Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti UKM daerah yang difasilitasi mengikuti pameran ekspor	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	5	30	3	
3	6	23	2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pameran perdagangan luar negeri	Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti UKM daerah yang difasilitasi mengikuti pameran ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	5	30	3	
3	6	23	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Forum koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah	Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Peningkatan Citra Produk Ekspor	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4	1	5	30	3	
3	6	23	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Forum koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah	Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5	1	5	30	3	
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	3	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
3	6	18	8	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pengembangan pasar lelang daerah dan sistem resi gudang	Jumlah fasilitas pendampingan pelaksanaan lelang agro Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikator mutu bokar Jumlah pembinaan pasar lelang Jumlah sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri	Penataan Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah fasilitas pendampingan pelaksanaan lelang agro - Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikator mutu bokar	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	1	3	30 3
3	6	18	15	Urusan Pilihan	Perdagangan	Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Dokumen hasil Prognosa Jumlah Distributor terdaftar Jumlah distributor yang mengikuti temu usaha Jumlah peserta sosialisasi Distribusi Bapak e-commerce Jumlah pemantauan Bapak di tingkat distributor dan pasar tradisional	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	3	30 3
3	6	23		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Persentase kenaikan nilai ekspor Persentase penurunan nilai impor			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase kenaikan nilai ekspor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	2	30 3
3	6	23	3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Forum koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah	Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah pelaku ekspor yang mengikuti forum	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase kenaikan nilai ekspor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	4	2	30 3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4	1	30	3	
3	6	18	9	Urusan Pilihan	Perdagangan	Penguatan kelembagaan usaha dagang kecil dan informal	Jumlah peserta sosialisasi Kewirausahaan untuk penngkatan usaha dagang/kecil/Informal Jumlah peserta sosialisasi Haki/Produk Halal/Barcode	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10	4	1	30	3	
3	6	18	9	Urusan Pilihan	Perdagangan	Penguatan kelembagaan usaha dagang kecil dan informal	Jumlah peserta sosialisasi Kewirausahaan untuk penngkatan usaha dagang/kecil/Informal Jumlah peserta sosialisasi Haki/Produk Halal/Barcode	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11	4	1	30	3	
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	18	10	Urusan Pilihan	Perdagangan	Promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor - Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti Jumlah pameran industri menengah pameran industri menengah dan besar yang di ikuti Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	6	18	10	Urusan Pilihan	Perdagangan	Promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Pameran Dagang Lokal	- Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah perajin unit promosi yang dibina dan dikembangkan Jumlah rakor dewan kerajinan Periode fasilitasi pengembangan perajin unit promosi Jambi Jumlah festival/lomba yang diadakan Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	5	30	3	
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	2	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	18	13	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pendataan sarana perdagangan dan pedagang informal	Jumlah dokumen hasil pendataan sarana perdagangan dan pedagang inormal se provinsi jambi	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil pendataan sarana perdagangan dan pedagang inormal se provinsi jambi	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	2	30	3
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	2	30	3
3	6	18	13	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pendataan sarana perdagangan dan pedagang informal	Jumlah dokumen hasil pendataan sarana perdagangan dan pedagang inormal se provinsi jambi	Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pendataan sarana perdagangan dan pedagang inormal se provinsi jambi	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	2	30	3
3	6	18		Urusan Pilihan	Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri Persentase peningkatan sarana perdagangan (Pasar rakyat dan toko modern)			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	4	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	6	18	15	Urusan Pilihan	Perdagangan	Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Dokumen hasil Prognosa Jumlah Distributor terdaftar Jumlah distributor yang mengikuti temu usaha Jumlah peserta sosialisasi Distribusi Bapok e-commerce Jumlah pemantauan Bapok di tingkat distributor dan pasar tradisional	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	4	30	3
3	6	18	15	Urusan Pilihan	Perdagangan	Rantai pasok dan prognosa bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Dokumen hasil Prognosa Jumlah Distributor terdaftar Jumlah distributor yang mengikuti temu usaha Jumlah peserta sosialisasi Distribusi Bapok e-commerce Jumlah pemantauan Bapok di tingkat distributor dan pasar tradisional	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase IKM terhadap perlindungan konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	4	30	3
3	7	16		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan usaha IKM Persentase peningkatan tenaga kerja IKM			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	7	16	8	Urusan Pilihan	Perindustrian	Promosi indsutri kecil regional dan lokal	Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti	Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor - Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti Jumlah pameran industri menengah pameran industri menengah dan besar yang di ikuti Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	30	3

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
3	7	16	8	Urusan Pilihan	Perindustrian	Promosi indsutri kecil regional dan lokal	Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti	Pameran Dagang Lokal	- Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah perajin unit promosi yang dibina dan dikembangkan Jumlah rakor dewan kerajinan Periode fasilitasi pengembangan perajin unit promosi Jambi Jumlah festival/lomba yang diadakan Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2	1	5	30	3	
3	7	16		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan usaha IKM Persentase peningkatan tenaga kerja IKM			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		2	7	30	3	
3	7	16	12	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengembangan perajin unit promosi Jambi	Jumlah perajin unit promosi yang dibina dan dikembangkan Jumlah rakor dewan kerajinan Periode fasilitasi pengembangan perajin unit promosi Jambi Jumlah festival/lomba yang diadakan	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah perajin unit promosi yang dibina dan dikembangkan Jumlah rakor dewan kerajinan Periode fasilitasi pengembangan perajin unit promosi Jambi Jumlah festival/lomba yang diadakan	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	2	7	30	3	
3	7	16		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan usaha IKM Persentase peningkatan tenaga kerja IKM			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		3	7	30	3	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
3	7	16	13	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pengembangan desain kerajinan berbasis budaya daerah	Jumlah lomba desain motif hasil kerajinan IK batik dan peragaan busana batik hasil kerajinan IK batik Penyusunan katalog warna batik hasil kerajinan IK batik dan HAKI Jumlah pemenang desain cendramata	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah lomba desain motif hasil kerajinan IK batik dan peragaan busana batik hasil kerajinan IK batik Penyusunan katalog warna batik hasil kerajinan IK batik dan HAKI Jumlah pemenang desain cendramata	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan unit usaha perdagangan dalam negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	3	7	30	3
3	7	21		Urusan Pilihan	Perindustrian	Program pengembangan industri agro dan kimia	Persentase peningkatan industri agro dan kimia Persentase peningkatan tenaga kerja Industri Agro dan Kimia			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1	5	30	3
3	7	21	4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Partisipasi pada pameran industri menengah dan besar	Jumlah pameran industri menengah pameran industri menengah dan besar yang di ikuti Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah pameran perdagangan luar negeri yang diikuti - UKM daerah yang diasilitasi mengikuti pameran ekspor - Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran - Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias - Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran Jumlah promosi industri kecil dan kerajinan yang diikuti Jumlah pameran industri menengah pameran industri menengah dan besar yang di ikuti Jumlah pelaku usaha IMB yang difasilitasi mengikuti pameran	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jasa pengujian mutu komoditi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1	1	5	30	3

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Sekretariat DPRD

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		3	1	2	4
4	1	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar per tahun	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	2	4
4	1	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	2	3	1	2	4
4	1	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	3	1	2	4
4	1	1	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Periode penjaminan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Periode penjaminan barang milik daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	5	3	1	2	4
4	1	1	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan diperpanjang izinnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan diperpanjang izinnya	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	6	3	1	2	4
4	1	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	7	3	1	2	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	8	3	1	2	4	
4	1	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	10	3	1	2	4	
4	1	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	11	3	1	2	4	
4	1	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	12	3	1	2	4	
4	1	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	15	3	1	2	4	
4	1	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	17	3	1	2	4	
4	1	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dan Pelayanan Kegiatan Dewan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	18	3	1	2	4	
4	1	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		3	1	2	4	
4	1	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	21	3	1	2	4	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	2	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	24	3	1	2	4	
4	1	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	25	3	1	2	4	
4	1	2	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	27	3	1	2	4	
4	1	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	29	3	1	2	4	
4	1	2	27	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang terpelihara	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	34	3	1	2	4	
4	1	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	35	3	1	2	4	
4	1	2	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	37	3	1	2	4	
4	1	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	39	3	1	2	4	
4	1	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan disiplin aparatur	peningkatan disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		4	1	2	4	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	2	4	1	2	4
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian dinas Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	4	4	1	2	4
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dinas Khusus Hari- hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	5	4	1	2	4
4	1	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	peningkatan sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		4	1	2	4
4	1	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	9	4	1	2	4
4	1	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	10	4	1	2	4
4	1	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	11	4	1	2	4
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		1	3	2	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	9	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	2	1	3	2	4
4	1	9	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Periode Penetapan Tata Tertib DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	5	1	3	2	4
4	1	9	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembahasan Ranperda Inisiatif	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	4	1	3	2	4
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		5	3	2	4
4	1	9	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Reses	Jumlah Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	5	3	2	4
4	1	9	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kunker dan Peninjauan Lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam Daerah	Jumlah Kunker dan Peninjauan Lapangan	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunker dan Peninjauan Lapangan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	1	5	3	2	4
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasistas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		4	3	2	4
4	1	9	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli yang dibutuhkan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasistas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	4	4	3	2	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	9	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang dibutuhkan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasistas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	5	4	3	2	4	
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasistas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	2	4	3	2	4	
4	1	9	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Publikasi Rapat-rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang dipublikasikan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Rapat Paripurna yang dipublikasikan	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasistas DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	4	3	2	4	
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		2	2	2	4	
4	1	1	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah anggota DPRD yang dijamin kesehatannya	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dijamin kesehatannya	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	2	2	2	4	
4	1	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	1	2	2	2	4	
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		3	1	2	4	
4	1	9	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Optimalisasi Pelayanan Keprotokolan, informasi dan Kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dan Pelayanan Kegiatan Dewan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	18	3	1	2	4	
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		1	1	2	4	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	1	1	1	2	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		1	2	2	4
4	1	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	4	1	2	2	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		3	3	2	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Kebijakan Anggaran	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		2	3	2	4
4	1	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Kebijakan Anggaran	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	2	3	2	4
4	1	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Kebijakan Anggaran	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	4	2	3	2	4
4	1	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu/dll	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Kebijakan Anggaran	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	6	2	3	2	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		2	1	2	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Smesteran	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	7	2	1	2	4
4	1	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	9	2	1	2	4
4	1	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan disiplin aparatur	peningkatan disiplin Aparatur			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Layanan dan Administrasi Keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		2	2	2	4
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		4	1	2	4
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		3	3	2	4
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pembahasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	1	3	3	2	4
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	JumlahRapat Pembahasan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	2	3	3	2	4
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pembahasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	3	3	2	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pembahasan Bidang Perekonomian	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	4	3	3	2	4
4	1	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase PERDA yang diselesaikan tepat waktu Persentase PERDA inisiatif			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG		8	3	2	4
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	1	8	3	2	4
4	1	9	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	Pelaksanaan Undangan DPRD	Jumlah Pelaksanaan Undangan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG	3	8	3	2	4

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Sekretariat Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Reformasi Birokrasi				Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	4	1	4
4	1	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Reformasi Birokrasi				Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	4	1	4
4	1	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi Persentase UPTD/B Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	4	1	4
4	1	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penataan Perangkat Daerah Kab/ Kota dan Evaluasi Raperda OPD Kab/ Kota Dalam Provinsi Jambi	Persentase Fasilitasi Raperda OPD Kab/Kota yang dievaluasi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Raperda OPD Kab/Kota yang dievaluasi	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	4	1	4
4	1	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Evaluasi dan Penataan UPTD/B Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Persentase UPTD/B Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi Persentase UPTD/B Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	4	1	4
4	1	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan komponen standar pelayanan publik oleh Perangkat Daerah	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan komponen standar pelayanan publik oleh Perangkat Daerah	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	1	4	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	7	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Penataan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Raperda OPD Kab/Kota yang dievaluasi	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Fasilitasi Raperda OPD Kab/Kota yang dievaluasi	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	4	1	4
4	1	7	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Penataan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Raperda OPD Kab/Kota yang dievaluasi	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Raperda OPD Kab/Kota yang dievaluasi	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	1	4	1	4
4	1	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Peningkatan, Pelaksanaan, Pengembangan Budaya Kerja serta Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	Persentase Perangkat daerah Provinsi jambi yang menerapkan budaya kerja	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat daerah Provinsi jambi yang menerapkan budaya kerja	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	1	4	1	4
4	1	7	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS	Persentase Jumlah Peraturan Penyusunan Analisis Beban Kerja	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Jumlah Peraturan Penyusunan Analisis Beban Kerja	Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	4	1	4
4	1	7	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	4	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4
4	1	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah surat masuk/keluar per tahun	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	3	1	1	4
4	1	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang difasilitasi	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi Persentase Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang difasilitasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	1	1	4
4	1	1	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan 2. Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1. Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan 2. Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang dibayar gajinya	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang dibayar gajinya	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	3	1	1	4	
4	1	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Score IKM Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4	
4	1	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	3	1	1	4	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	3	1	1	4
									Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi											
									Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan											
									Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor											
									Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro											
									Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas											
									Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,											
4	1	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di fasilitasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di fasilitasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	12	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan bagi aparatur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan bagi aparatur Jumlah bahan bacaan bagi aparatur setiap tahun Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	15	3	1	1	4
4	1	1	16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase bahan logistik kantor yang difasilitasi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang difasilitasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	16	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi di Biro	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	18	3	1	1	4
4	1	1	36	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah bahan bacaan bagi aparatur setiap tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan bagi aparatur Jumlah bahan bacaan bagi aparatur setiap tahun Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	15	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4	
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	9	3	1	1	4	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	3	1	1	4
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	13	3	1	1	4
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan bagi aparatur Jumlah bahan bacaan bagi aparatur setiap tahun Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	15	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	17	3	1	1	4
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	3	1	1	4
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	18	3	1	1	4
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	9	3	1	1	4
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	3	1	1	4
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	13	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	17	3	1	1	4
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	36	3	1	1	4
4	1	1	43	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	44	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun Score IKM Kebersihan Kantor Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	1	1	4
4	1	1	44	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kebutuhan ATK yang di fasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	44	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	3	1	1	4
4	1	1	44	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan bagi aparatur Jumlah bahan bacaan bagi aparatur setiap tahun Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	15	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	44	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	17	3	1	1	4
4	1	1	44	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yanga difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	18	3	1	1	4
4	1	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP[			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	1	1	4
4	1	6	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Koordinasi penyusunan dan pengendalian program		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	1	1	4
4	1	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP[			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	1	1	4
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	1	1	4
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	1	1	4
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	2	1	1	4
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	9	2	1	1	4
4	1	6	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	2	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Program/Kegiatan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	1	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	1	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Persentase pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	1	1	4
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	1	1	4
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	1	1	4
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	40	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	1	1	4
4	1	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP[			Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	4	1	4
4	1	6	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembinaan, Peningkatan, Pengembangan serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Penataan Organisasi		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	4	1	4
4	1	57		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan PBJ Pemerintah	Persentase bahan rumusan bahan kebijakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang PU, Perhubungan menjadi kebijakan			Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	3	1	4
4	1	57	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	3	1	4
4	1	57	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	2	3	1	4
4	1	57	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	57	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis Tingkat kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	2	3	1	4
4	1	57	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Informasi	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Lelang yang lulus administrasi teknis Tingkat kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	3	1	4
4	1	57	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Fasilitasi Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan SDM	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monevdal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monevdal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	2	3	1	4
4	1	57	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Fasilitasi Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan SDM	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monevdal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ	Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monevdal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	2	3	1	4
4	1	57	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Layanan Pengadaan dan Pembinaan serta Kelembagaan LPSE	Tingkat kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana Tingkat kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	3	1	4
4	1	57		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan PBJ Pemerintah	Persentase bahan rumusan bahan kebijakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang PU, Perhubungan menjadi kebijakan			Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	57	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	3	1	4
4	1	57	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	3	3	1	4
4	1	57	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	3	1	4
4	1	58		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama	Persentase Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi			Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	2	1	4
4	1	58	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swasta	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	1	2	1	4
4	1	58	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	1	2	1	4
4	1	58	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kerjasama	Jumlah Usulan Kerjasama yang terevaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Usulan Kerjasama yang terevaluasi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	1	2	1	4
4	1	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan n Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,350			Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan, Rakor Camat dan Bimtek Pemekaran Kecamatan serta Penilaian Camat Teladan/Berprestasi di Provinsi Jambi	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	16	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Fasilitas Pengembangan dan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD Provinsi Jambi	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen LPPD Provinsi Jambi Jumlah Rapat Koordinasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan penanganan trantib	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	2	1	4
4	1	16	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Hubungan Antar Lembaga di Bidang Otonomi Daerah	Persentase izin perjalanan dinas dan izin perjalanan dinas luar negeri dengan alasan penting yang difasilitasi	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase izin perjalanan dinas dan izin perjalanan dinas luar negeri dengan alasan penting yang difasilitasi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	2	1	4
4	1	16	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan	1. Jumlah Rapat koordinasi pemerintahan bawahan di Kecamatan 2. Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang pemerintahan bawahan di Provinsi Jambi	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	1. Jumlah Rapat koordinasi pemerintahan bawahan di Kecamatan 2. Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang pemerintahan bawahan di Provinsi Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	2	1	4
4	1	57		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan PBJ Pemerintah	Persentase bahan rumusan bahan kebijakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang PU, Perhubungan menjadi kebijakan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	57	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Fasilitas Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan SDM	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monev dal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monev dal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupatin /kota Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	4	1	1	4
4	1	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP[			Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	3	1	4
4	1	6	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	3	1	4
4	1	6	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	3	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	6	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	3	1	4
4	1	6	69	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program APBD		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	3	3	1	4
4	1	6	69	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program APBD		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	3	3	1	4
4	1	6	69	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program APBD		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan program prioritas sesuai dengan rencana	Evaluasi Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	3	3	1	4
4	1	18		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penanganan Permasalahan Tanah dan Pembinaan Pengawasan Trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan	Persentase pengaduan masalah tanah yang ditindaklanjuti			Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	18	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sebagai Kewenangan Pemerintah Provinsi	Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah BinteK Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	18	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib	Jumlah Rapat Koordinasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan penanganan trantib	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen LPPD Provinsi Jambi Jumlah Rapat Koordinasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan penanganan trantib	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	2	1	4
4	1	18	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Jambi	Jumlah rapat koordinasi terkait urusan pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi terkait urusan pemerintahan	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	2	1	4
4	1	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		4	1	1	4
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	4	1	1	4
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	4	1	1	4
4	1	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	5	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur pada Biro PBMD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur pada Biro PBMD Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	9	4	1	1	4	
4	1	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Provinsi Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten Kota			Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		PENGELOAAN PERBATASAN	UNSUR PENUNJANG			1	2	7	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi dan Pemetaan Wilayah	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintel Pembakuan Nama Rupabumi	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintel Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama dan Pendataan Potensi Kerjasama di Wilayah Perbatasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama dan Pendataan Potensi Kerjasama di Wilayah Perbatasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyelesaian dan Penataan batas Antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyelesaian dan Penegasan Batas Antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4
4	1	19		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Persentase aset yang tercatat			Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	3	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	19	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Jambi	Tersedianya Laporan dan Dokumen Barang Milik Daerah Provinsi Jambi Include data P3D Pelimpahan Kabupaten/Kota	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan dan Dokumen Barang Milik Daerah Provinsi Jambi Include data P3D Pelimpahan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	1	3	2	5
4	1	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan dan Pengamanan Aset	Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	1	3	2	5
4	1	19	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan RKBMD dan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Terbitnya SK Gubernur Standar Satuan Harga dan SK Sekretaris Daerah tentang RKBMD dan RKPBM	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terbitnya SK Gubernur Standar Satuan Harga dan SK Sekretaris Daerah tentang RKBMD dan RKPBM	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	3	2	5
4	1	19	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	13	1	3	2	5
4	1	19	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD	Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Pemanfaatan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD Tersedianya Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	1	3	2	5
4	1	19	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penghapusan dan Pemindahtanganan	Tersedianya Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Pemanfaatan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD Tersedianya Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	1	3	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	19	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penilaian Aset	Tersedianya Dokumen Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	3	2	5
4	1	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	1	1	4
4	1	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	20	3	1	1	4
4	1	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	21	3	1	1	4
4	1	2	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1. Persentase perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang difasilitasi (biro umum) 2. Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1. Persentase perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang difasilitasi (biro umum) 2. Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	22	3	1	1	4
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	23	3	1	1	4
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	25	3	1	1	4
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	26	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	2	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	28	3	1	1	4
4	1	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	29	3	1	1	4
4	1	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	31	3	1	1	4
4	1	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang difasilitasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang difasilitasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	35	3	1	1	4
4	1	2	32	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin taman kantor Gubernur dan lingkungannya		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	3	1	1	4
4	1	2	41	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Jambi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	38	3	1	2	5
4	1	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	1	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	4	1	1	4
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Pegawai Biro PBMD yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur pada Biro PBMD Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	9	4	1	1	4
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monev dal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	4	1	1	4
4	1	21		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi				Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	4	1	4
4	1	21	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi	Jumlah Terbitan Majalah Pemprov Jambi	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Terbitan Majalah Pemprov Jambi Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	4	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	21	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi	Jumlah Terbitan Majalah Pemprov Jambi	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal) Jumlah Terbitan Majalah Pemprov Jambi	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	3	4	1	4
4	1	21	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi	Jumlah Terbitan Majalah Pemprov Jambi	Dokumentasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal) Jumlah Terbitan Majalah Pemprov Jambi	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	3	4	1	4
4	1	20		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan tamu Kepala Daerah yang difasilitasi Persentase fasilitasi kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah di Jakarta			Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	4	1	4
4	1	20	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah	Persentase pelayanan tamu Pemerintah Provinsi yang berkunjung di Provinsi Jambi	Fasilitasi Tamu	Persentase pelayanan tamu Pemerintah Provinsi yang berkunjung di Provinsi Jambi	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	3	4	1	4
4	1	20	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan	Persentase Pelayanan Administrasi Acara Kedinasan KDH/Wakil KDH/Sekretaris Daerah/Dinas Instansi	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase Pelayanan Administrasi Acara Kedinasan KDH/Wakil KDH/Sekretaris Daerah/Dinas Instansi	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	3	4	1	4
4	1	20	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan	Persentase Pelayanan Administrasi Acara Kedinasan KDH/Wakil KDH/Sekretaris Daerah/Dinas Instansi	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase Pelayanan Administrasi Acara Kedinasan KDH/Wakil KDH/Sekretaris Daerah/Dinas Instansi	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	3	4	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	4	1	4
4	1	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Bagian yang dilayani per tahun	Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Bagian yang dilayani per tahun	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	3	4	1	4
4	1	21		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	16	2
4	1	21	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Publikasi dan Informasi Komunikasi Kehumasan	Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi Jumlah Baleho terpasang Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	1	2	16	2
4	1	21	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Publikasi dan Informasi Komunikasi Kehumasan	Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Layanan Hubungan Media	Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	1	2	16	2
4	1	21	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Publikasi dan Informasi Komunikasi Kehumasan	Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah bahan informasi pembangunan Prov.Jambi dimedia elektronik (TV lokal)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	1	2	16	2
4	1	21	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Publikasi Melalui Media Dalam dan Luar Ruang serta Media Centre	Jumlah Baleho terpasang	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Baleho terpasang	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	2	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	21	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Informasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	1	2	16	2	
4	1	21	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Informasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan Rakor Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	1	2	16	2	
4	1	21		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1	1	16	2
4	1	21		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi				Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG			3	1	1	4
4	1	21	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2	
4	1	21		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi				Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3	1	16	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	21	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tabloid Pemprov Jambi,	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	16	2
4	1	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP[			Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	4	1	4
4	1	6	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Koordinasi penyusunan dan pengendalian program		Perencanaan dan Pelaporan Tugas		Pelaksanaan Administrasi Pimpinan		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	4	1	4
4	1	25		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah provinsi			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	2	1	4
4	1	25	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	25	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang - Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Peraturan Perundang - Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	3	2	1	4
4	1	24		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Advokasi Hukum dan HAM	persentase Penyelesaian kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	2	1	4
4	1	24	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	3	2	1	4
4	1	24	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	3	2	1	4
4	1	24	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Jambi	Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum Jumlah Konflik/ Sengketa Hukum yang dikaji Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	24	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4
4	1	24	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pembinaan dan Penanganan Konflik/Sengketa yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum Jumlah Konflik/ Sengketa Hukum yang dikaji Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	3	2	1	4
4	1	25		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah provinsi			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	25	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	10	4	1	1	4
4	1	23		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi			Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbup/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	18	3	1	1	4
4	1	23		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monev dal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	4	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Monitoring/Pemantauan Terhadap Tindak Lanjut Pembinaan Hasil Evaluasi Perda Kab/Kota, Perbup/Perwako dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan monev dal PBJ, Pengelolaan Sanggah dan Pengaduan dan Pengembangan SDM PBJ Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	11	4	1	1	4
4	1	23		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rapat Koordinasi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi 1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yanga difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Monitoring/Pemantauan Terhadap Tindak Lanjut Pembinaan Hasil Evaluasi Perda Kab/Kota, Perbup/Perwako dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi 1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yanga difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	23	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbup/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi 1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yanga difasilitasi (biro Umum) 2. Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Biro PBMD Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	3	2	1	4
4	1	22		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan Daerah Provinsi	persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	22	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	22	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	22	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	22	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penelitian/ Kajian Draf Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	3	2	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		3	2	1	4
4	1	26		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase rekomendasi staf ahli yang menjadi kebijakan Gubernur Jambi			Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	4	1	4
4	1	26	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	4	1	4
4	1	26	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	2	4	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	26	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	4	1	4
4	1	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP[			Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	4	1	4
4	1	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	4	1	4
4	1	6	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset		Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	2	4	1	4
4	1	19		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Persentase aset yang tercatat			Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	4	1	4
4	1	19	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan dan Pengamanan Aset	Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	4	1	4
4	1	20		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan tamu Kepala Daerah yang difasilitasi Persentase fasilitasi kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah di Jakarta			Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	4	1	4
4	1	20	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staff Ahli bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Tugas ,Wewenang dan Kewajibannya	Persentase Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajiban yang difasilitasi	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Persentase Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajiban yang difasilitasi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	2	4	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	4	1	4
4	1	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Pengelolaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	2	4	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	4	1	4
4	1	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk/keluar per tahun	Pengelolaan Persuratan dan Arsip	Jumlah surat masuk/keluar per tahun	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	9	2	4	1	4
4	1	1	23	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jambi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	4	1	4
4	1	1	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Rapat, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah KDH/WKDH		Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	4	1	4
4	1	1	39	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Rapat, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah KDH/WKDH		Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difalitasi	Pelaksanaan Administrasi Umum		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	2	4	1	4
4	1	10		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Kehidupan Umat Beragama	Persentase rekomendasiK ehidupan Umat Beragama yang diterima gubernur			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	10	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan MTQ/ STQ Nasional	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pelaksanaan MTQ/STQ	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pengelolaan Masjid Agung AL Falah, Al Dzikro dan Al Khairot Jambi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Verifikasi Rumah Ibadah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pontren	Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	2	1	4
4	1	10	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pengelolaan Masjid Agung Al Falah, Al Dzikro, Al Khairot Jambi dan Safari Ramadhan	umlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pengelolaan Masjid Agung AL Falah, Al Dzikro dan Al Khairot Jambi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pelaksanaan MTQ/STQ umlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pengelolaan Masjid Agung AL Falah, Al Dzikro dan Al Khairot Jambi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Verifikasi Rumah Ibadah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pontren	Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	10	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Haji Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penyelenggaraan Haji	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penyelenggaraan Haji Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan bagi Non-Muslim	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	2	2	1	4
4	1	10	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rumah Ibadah	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Verifikasi Rumah Ibadah	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pelaksanaan MTQ/STQ umlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pengelolaan Masjid Agung AL Falah, Al Dzikro dan Al Khairot Jambi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Verifikasi Rumah Ibadah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pontren	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	2	1	4
4	1	10	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Lintas Agama dan Persidangan Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan bagi Non-Muslim	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penyelenggaraan Haji Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan bagi Non-Muslim	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	10	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pontren	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Pengelolaan Masjid Agung AL Falah, Al Dzikro dan Al Khairot Jambi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Verifikasi Rumah Ibadah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pontren	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	2	2	1	4
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah			Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	3	2	5
4	1	1	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen pencatatan Barang Milik Daerah dan tersedianya dokumen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Jambi	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen pencatatan Barang Milik Daerah dan tersedianya dokumen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Jambi	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	3	2	5
4	1	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	2	5
4	1	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	20	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	21	3	1	1	4
4	1	2	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1. Persentase perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang difasilitasi (biro umum) 2. Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1. Persentase perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang difasilitasi (biro umum) 2. Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	22	3	1	1	4
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	23	3	1	1	4
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	25	3	1	1	4
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor di Setda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	26	3	1	1	4
4	1	2	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	28	3	1	1	4
4	1	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	29	3	1	1	4
4	1	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	31	3	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang difasilitasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang difasilitasi	Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	35	3	1	1	4
4	1	2	32	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin taman kantor Gubernur dan lingkungannya		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	3	1	1	4
4	1	2	41	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Pemerintah Provinsi Jambi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	38	3	1	2	5
4	1	11		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi bidang sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi yang diterima gubernur			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pemantauan Ketransmigrasian dan Pembinaan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	2	1	4
							Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial													
							Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan													
							Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu													
							Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana													
							Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
							Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Komda Lansia Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan											
Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah																				
Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan																				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Legiun Veteran dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	1	11	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah											
Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan																				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dampak Sosial Penyakit HIV dan AIDS Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Masalah Masalah Strategis Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan											
Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah																				
Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan																				
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	2	2	1	4
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	2	2	1	4
4	1	11	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pelestarian Serta Pengembangan Adat Melayu Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	2	1	4
4	1	11		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi bidang sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi yang diterima gubernur			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas di Setda Provinsi Jambi dan Pimpinan Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas 1. Persentase Pembayaran komunikasi yang difasilitasi 2. Persentase Pembayaran Air yang difasilitasi 3. Persentase Pembayaran Listrik ayng difasilitasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja 60,01 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	1	1	4
4	1	11	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan kinerja Biro tahunan Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Biro Jumlah Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi kegiatan Pranata Humas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kantor Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	1	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	12		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Koordinasi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan, Keluarga Berencana dan Kepemudaan	Persentase rekomendasi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaa n perempuan, keluarga berencana dan kepemudaan yang diterima gubernur			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	12	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	12	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Program Terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	12	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	12	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perempuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	2	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	1	12	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Generasi Muda / Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Hubungan Industrial	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Keluarga Berencana	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kepemudaan dan Olahraga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	12	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Veteran dan Penyandang Disabilitas											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Komunitas Adat Terpencil											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)											
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Kesehatan											
4	1	12	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	2	2	1	4
									Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor/Kegiatan terkait Pendidikan											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program pembinaan pembangunan Ekonomi di bidang penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan keuangan	Persentase rekomendasi pembangunan ekonomi bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan yang menjadi kebijakan			Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	3	1	4
4	1	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring di Bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan	Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	3	1	4
4	1	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang BUMN/BUMD	Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang BUMN/BUMD	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan Jumlah kabupaten/kota yang dibina bidang CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang BUMN/BUMD	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	1	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	1	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang BUMN/BUMD	Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang BUMN/BUMD	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ESDM, Pencegahan dan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Jambi Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumlah kabupaten/kota yang dibina bidang CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang BUMN/BUMD	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	8	1	3	1	4	
4	1	15	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring di Bidang Pengendalian Inflasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah kabupaten/kota Kota yang dibina bidang Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	3	1	4	
4	1	29		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Koperindag	Persentase rekomendasi pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan koperindag yang menjadi kebijakan			Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	3	1	4	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	29	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi di Bidang Kebudayaan, Kepariwisata dan KOPERINDAG	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang kebudayaan, pariwisata dan Koperindag	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	3	1	4
4	1	29	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina pada Event Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	2	1	3	1	4
4	1	55		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase rekomendasi pembinaan dan fasilitasi pembangunan di bidang kelautan, perikanan, ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi kebijakan			Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	55	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ketahanan pangan, penyuluhan dan Kelautan Perikanan Jumlah kabupaten/Kota yang dibina bidang pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komosi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi)	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	3	1	4
4	1	55	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Penyuluh dan Kelautan Perikanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ketahanan pangan, penyuluhan dan Kelautan Perikanan	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ketahanan pangan, penyuluhan dan Kelautan Perikanan Jumlah kabupaten/Kota yang dibina bidang pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komosi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi)	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	55	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi, Evaluasi Dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jambi	Jumlah kabupaten/Kota yang dibina bidang pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komosi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi)	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang pertanian, Peternakan dan Perkebunan Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ketahanan pangan, penyuluhan dan Kelautan Perikanan Jumlah kabupaten/Kota yang dibina bidang pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komosi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi)	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	3	1	3	1	4
4	1	54		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi bidang Sumber Daya Alam dasn Kingkungan Hidup yang menjadi kebijakan			Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	3	1	4
4	1	54	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi	Jumlah kabupaten/kota yang dibina bidang CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ESDM, Pencegahan dan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Jambi Jumlah kabupaten/kota yang dibina bidang CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	3	1	4
4	1	54	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Limbah dan Sanitasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	7	1	3	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	54	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang ESDM di Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ESDM, Pencegahan dan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Jambi	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah kabupaten/kota yang dibina bidang CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	4	1	3	1	4
4	1	54	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang ESDM di Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ESDM, Pencegahan dan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Jambi	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Bina bidang ESDM, Pencegahan dan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Jambi	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	5	1	3	1	4
4	1	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Provinsi Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten Kota			Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG		1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi dan Pemetaan Wilayah	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintel Pembakuan Nama Rupabumi	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintel Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama dan Pendataan Potensi Kerjasama di Wilayah Perbatasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama dan Pendataan Potensi Kerjasama di Wilayah Perbatasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	6	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyelesaian dan Penataan batas Antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	17	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penyelesaian dan Penegasan Batas Antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Jumlah pelaksanaan Rakor Camat tingkat Provinsi Jambi 2. Jumlah pelaksanaan Bimtek Pemekaran Kecamatan 3. Jumlah pelaksanaan penilaian Camat Teladan Tingkat Provinsi Jambi Jumlah rapat fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait tertib administrasi Pembakuan nama rupabumi 2. Jumlah Bintek Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Kab/Kota dalam Prov.Jambi	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG	1	1	2	1	4

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	2	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		3	1	1	6
4	2	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar Tahunan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Tahunan	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	1	3	1	1	6
4	2	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulanan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulanan) Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	3	1	1	6
4	2	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	3	3	1	1	6
4	2	1	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Periode Pembayaran Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Periode Pembayaran Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	5	3	1	1	6
4	2	1	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dan Diperpanjang Izinnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dan Diperpanjang Izinnya	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	6	3	1	1	6

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	2	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	7	3	1	1	6
4	2	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	8	3	1	1	6
4	2	1	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaikai	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaikai	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	9	3	1	1	6
4	2	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	10	3	1	1	6
4	2	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	11	3	1	1	6
4	2	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	12	3	1	1	6
4	2	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	15	3	1	1	6
4	2	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Peserta Rapat/Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat/Tamu	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	17	3	1	1	6

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	2	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	18	3	1	1	6	
4	2	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		3	1	1	6	
4	2	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	21	3	1	1	6	
4	2	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Komputer	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	23	3	1	1	6	
4	2	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	25	3	1	1	6	
4	2	2	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	26	3	1	1	6	
4	2	2	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengadaan Komputer	Jumlah Pengadaan Komputer	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Komputer	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	23	3	1	1	6	
4	2	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	29	3	1	1	6	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	2	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	35	3	1	1	6
4	2	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab Sedang/Berat	Administrasi Umum	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	39	3	1	1	6
4	2	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		4	1	1	6
4	2	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	4	1	1	6
4	2	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun			Administrasi Keuangan	Persentase Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		2	1	1	6
4	2	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun	Administrasi Keuangan	Persentase Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	6	2	1	1	6
4	2	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Standar Akuntansi Pemerintahan			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		2	2	1	6
4	2	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Audit Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	1	2	2	1	6

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	2	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Review Kinerja dan Keuangan	Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B" Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	2	2	1	6
4	2	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase Koordinasi Pmegawasan dengan Itjend Terkait Jumlah Pelaksanaan Gelarwasda Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	3	2	2	1	6
4	2	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase tindak lanjut BPK yang selesai Jumlah Buku Katalog dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	4	2	2	1	6
4	2	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Buku Katalog dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase tindak lanjut BPK yang selesai Jumlah Buku Katalog dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	4	2	2	1	6
4	2	7	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut BPK yang selesai	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase tindak lanjut BPK yang selesai Jumlah Buku Katalog dan Laporan Hasil Pemeriksaan Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	4	2	2	1	6

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	2	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Gelarwasda	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase Koordinasi Pmegawasan dengan Itjend Terkait Jumlah Pelaksanaan Gelarwasda Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	3	2	2	1	6	
4	2	7	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Persentase Koordinasi Pmegawasan dengan Itjend Terkait	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase Koordinasi Pmegawasan dengan Itjend Terkait Jumlah Pelaksanaan Gelarwasda Persentase kategori Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai "B"	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tingkat Penyelesaian dan Klarifikasi Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	3	2	2	1	6	
4	2	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Standar Akuntansi Pemerintahan			Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		2	3	1	6	
4	2	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus dan Klarifikasi Kasus	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus dan Klarifikasi Kasus	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	1	2	3	1	6	
4	2	7	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Laporan Perkembangan Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Asistensi dan Pendampingan	Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Laporan Perkembangan Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	2	3	1	6	
4	2	7	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Asistensi dan Pendampingan	Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Laporan Perkembangan Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	2	3	1	6	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	2	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Standar Akuntansi Pemerintahan			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		1	3	1	6
4	2	7	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Survei Penilaian Integritas	Persentase Penilaian Integritas	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	1	1	3	1	6
4	2	8		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah Pemeriksa yang Telah Lulus Mengikuti Diklat Sertifikasi			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		1	3	1	6
4	2	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Tertatnya Kelembagaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan Inspektorat Provinsi Jambi			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		1	3	1	6
4	2	9	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah APIP yang Telah Mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan30 Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	1	3	1	6
4	2	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Standar Akuntansi Pemerintahan			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		1	2	1	6
4	2	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Audit Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	1	1	2	1	6
4	2	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Review Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	2	1	2	1	6

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	2	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	3	1	2	1	6	
4	2	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Standar Akuntansi Pemerintahan	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	4	1	2	1	6	
4	2	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		1	1	1	6	
4	2	8		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah Pemeriksa yang Telah Lulus Mengikuti Diklat Sertifikasi			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN		4	1	1	6	
4	2	8	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat Persentase Peningkatan Jumlah APIP yang Telah Mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	9	4	1	1	6	
4	2	8	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Pengawasan	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Jumlah APIP yang Telah Mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan30	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat Persentase Peningkatan Jumlah APIP yang Telah Mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Sarana prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN	9	4	1	1	6	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	1	5	
4	3	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat			Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	1	5	
4	3	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah Bulan Pembayaran Rekening	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	1	5	
4	3	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase serapan anggaran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Persentase serapan anggaran	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	1	5	
4	3	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan ketersediaan ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan ATK	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	1	5
4	3	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan ketersediaan barang-barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan barang-barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	1	5
4	3	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan pemeliharaan Generator Listrik	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	1	5
4	3	1	13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	13	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	1	5
4	3	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	1	5
4	3	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah Bulan Pembayaran Rekening	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Persentase serapan anggaran	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	9	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan ATK	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan barang-barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan pemeliharaan Generator Listrik	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	13	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	14	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	16	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	26	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan perawatan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	33	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor layak operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	1	5
4	3	1	45	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	-	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	36	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah Bulan Pembayaran Rekening	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan ATK	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan barang-barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan pemeliharaan Generator Listrik	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	1	5
4	3	1	68	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	1	5
4	3	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat			Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	1	5
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	1	1	5
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	2	1	1	5
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	5	2	1	1	5
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	1	1	5
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	8	2	1	1	5
4	3	1	47	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	9	2	1	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	1	5
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	2	1	5
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase Keterwakilan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Proses Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	1	5
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Konsistensi Usulan Sesuai Kewenangan Daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	1	5
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Konsistensi Program RPJMD kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	2	1	5
4	3	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	1	5
4	3	17	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	2	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pembangunan daerah	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Konsistensi permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	6	1	2	1	5	
4	3	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pembangunan daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan elemen data SIPD Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	7	1	2	1	5	
4	3	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pembangunan daerah	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data base yang dikembangkan Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	2	1	5	
4	3	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pembangunan daerah	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	9	1	2	1	5	
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	1	5	
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	2	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase Keterwakilan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Proses Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Konsistensi Usulan Sesuai Kewenangan Daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Konsistensi Program RPJMD kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Konsistensi permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	6	1	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan elemen data SIPD Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	7	1	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data base yang dikembangkan Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	2	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Jumlah laporan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	9	1	2	1	5	
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	4	1	5	
4	3	17	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi	Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RPKD	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	4	1	5	
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	3	1	5	
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	3	1	5	
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	3	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	3	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	5	1	5
4	3	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	1	5	
4	3	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	1	1	5	
4	3	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	1	1	5	
4	3	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	1	5	
4	3	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	1	1	5	
4	3	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	1	5	
4	3	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase PNS yang menegakkan disiplin	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase PNS yang menegakkan disiplin	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	1	5	
4	3	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN Yang mengikuti peningkatan kapasitas			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	1	5
4	3	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	1	5
4	3	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	11	4	1	1	5
4	3	5	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	1	5
4	3	5	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bulan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	1	5	
4	3	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	1	5	
4	3	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan ketersediaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	1	5	
4	3	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	1	5
4	3	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	1	5
4	3	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	31	3	1	1	5
4	3	2	26	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan perawatan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan perawatan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	33	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor layak operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor layak operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	1	5
4	3	2	33	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator Listrik Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Generator Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan Jumlah bulan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan pemeliharaan Generator Listrik	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	1	5
4	3	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	1	5
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran Jumlah bulan ketersediaan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	1	5
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	1	5
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	26	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan perawatan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	33	3	1	1	5
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan peralatan gedung kantor layak operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	1	5
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	36	3	1	1	5
4	3	2	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional layak operasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	2	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional layak operasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	27	3	1	1	5	
4	3	2	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional layak operasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	31	3	1	1	5	
4	3	2	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional layak operasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan ketersediaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	41	3	1	1	5	
4	3	2	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Utilitas Kantor	Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	1	5	
4	3	2	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Utilitas Kantor	Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan gedung kantor layak mendukung pelaksanaan tupoksi Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	1	5	
4	3	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bulan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Mayarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	2	49	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang menegakkan disiplin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	1	1	5	
4	3	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	1	5	
4	3	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen pelaporan SKPD	Administrasi Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	6	2	1	1	5	
4	3	18		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang ekonomi			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		1	4	1	5	
4	3	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	4	1	5	
4	3	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	4	1	5	
4	3	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	4	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	18		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang ekonomi			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		2	4	1	5	
4	3	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	4	1	5	
4	3	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	4	1	5	
4	3	18	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen pada subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	4	1	5	
4	3	18		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang ekonomi			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		3	4	1	5	
4	3	18	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	4	1	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	18	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen pada Subbidang Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	4	1	5
4	3	18	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen pada Subbidang Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	4	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		3	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	5	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		2	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	5	1	5
4	3	17	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi Program RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	5	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		2	3	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	3	1	5
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	3	1	5
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	3	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		3	3	1	5
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	3	1	5
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	3	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RPKD	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	3	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD			Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	1	5
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	1	5
4	3	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	2	1	5
4	3	17	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah		Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	2	1	5
4	3	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD			Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG		3	2	1	5
4	3	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pembangunan daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD Jumlah laporan pembangunan daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	2	1	5
4	3	17	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah		Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	2	1	5
4	3	17	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah		Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	2	1	5
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RPKD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	2	1	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	2	1	5	
4	3	17	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Perencanaan	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun N Kedalam Perencanaan Tahun N+1	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD Jumlah laporan pembangunan daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi integrasi program RPJMD kedalam RKPD	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	2	1	5	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Keuangan Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiat's Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	2	5	
4	4	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiat's Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	2	5	
4	4	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Listrik	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiat's Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	2	5	
4	4	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiat's Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	2	5	
4	4	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiat's Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	2	5	
4	4	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	2	5	
4	4	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	2	5	
4	4	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	2	5	
4	4	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Konsumsi Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	2	5	
4	4	1	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	2	5	
4	4	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	3	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	1	38	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi	Tersedianya kebutuhan barang dan jasa milik Biro	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya kebutuhan barang dan jasa milik Biro	Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	3	2	5	
4	4	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	2	5	
4	4	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	2	5	
4	4	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	22	3	1	2	5	
4	4	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	2	5	
4	4	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	24	3	1	2	5	
4	4	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	26	3	1	2	5	
4	4	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	2	5	
4	4	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	31	3	1	2	5	
4	4	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	41	3	1	2	5	
4	4	2	30	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpenuhiya Kenyamanan Kantor	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhiya Kenyamanan Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	3	1	2	5	
4	4	2	30	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpenuhiya Kenyamanan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya Kenyamanan Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	33	3	1	2	5	
4	4	2	30	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpenuhiya Kenyamanan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhiya Kenyamanan Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	2	30	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpenuhinya Kenyamanan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpenuhinya Kenyamanan Kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	36	3	1	2	5	
4	4	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Baik	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	28	3	1	2	5	
4	4	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Baik	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Baik	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	38	3	1	2	5	
4	4	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Baik	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor Yang Baik	Administrasi Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	2	5	
4	4	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Program peningkatan disiplin aparatur	peningkatan disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	2	5	
4	4	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya Keseragaman Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya Keseragaman Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	2	5	
4	4	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	peningkatan sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	5	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Berkualitas dan Bersertifikasi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Berkualitas dan Bersertifikasi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	2	5	
4	4	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Nilai SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Persentase Peningkatan PAD			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	2	5	
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	2	5	
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	2	2	5	
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	2	5	
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	2	2	5	
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	1	2	2	5	
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	1	2	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	1	2	2	5	
4	4	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penatusahaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan	Tersedianya Kebutuhan Belanja Tidak Langsung	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya Kebutuhan Belanja Tidak Langsung	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tersusunnya Perda APBD dan Perkada APBD tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran tersusunnya KUA dan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	1	2	2	5	
4	4	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Persentase Peningkatan PAD			Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningakatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	4	2	5	
4	4	7	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	Persentase Peningkatan PAD	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningakatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	4	2	5	
4	4	7	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	Persentase Peningkatan PAD	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningakatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	4	2	5	
4	4	7	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	Persentase Peningkatan PAD	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Persentase Peningkatan PAD	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningakatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	4	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Tersedianya data potensi retribusi dan penerimaan retribusi daerah, terciptanya optimalisasi penerimaan retribusi dan pelaksanaan sosialisasi perda retribusi daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya data potensi retribusi dan penerimaan retribusi daerah, terciptanya optimalisasi penerimaan retribusi dan pelaksanaan sosialisasi perda retribusi daerah Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan penerimaan lain - lain	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	1	4	2	5	
4	4	7	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Fasilitas, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan Lain - lain Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan penerimaan lain - lain	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya data potensi retribusi dan penerimaan retribusi daerah, terciptanya optimalisasi penerimaan retribusi dan pelaksanaan sosialisasi perda retribusi daerah Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan penerimaan lain - lain	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	1	4	2	5	
4	4	7	16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah	Terwujudnya data dan informasi retribusi daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terwujudnya data dan informasi retribusi daerah Terpeliharanya sistem kesamsatan dalam Provinsi Jambi	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	4	2	5	
4	4	7	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Ke-Samsatan pada UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	Terpeliharanya sistem kesamsatan dalam Provinsi Jambi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terwujudnya data dan informasi retribusi daerah Terpeliharanya sistem kesamsatan dalam Provinsi Jambi	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	4	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bidang Penganggaran Daerah	Tersedianya peraturan penganggaran daerah		Pemeriksaan Pajak Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tersedianya peraturan penganggaran daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Barat	Tercapainya target pendapatan daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tersedianya peraturan penganggaran daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	4	7	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tanjab Timur	Tercapainya target pendapatan daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tersedianya peraturan penganggaran daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Muaro Jambi	Tercapainya target pendapatan daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tersedianya peraturan penganggaran daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Batanghari	Tercapainya target pendapatan daerah		Pemeriksaan Pajak Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tersedianya peraturan penganggaran daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												
								Tercapainya target pendapatan daerah												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	23	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Tebo	Tercapainya target pendapatan daerah		Pemeriksaan Pajak Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tersedianya peraturan penganggaran daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Bungo	Tercapainya target pendapatan daerah		Pemeriksaan Pajak Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tersedianya peraturan penganggaran daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	4	7	25	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Merangin	Tercapainya target pendapatan daerah	Pemeriksanaan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tersedianya peraturan penganggaran daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4		4	7	26	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Sarolangun	Tercapainya target pendapatan daerah		Pemeriksaan Pajak Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tersedianya peraturan penganggaran daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											
									Tercapainya target pendapatan daerah											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	4	7	27	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Keuangan Daerah Provinsi Jambi Pada Kabupaten Kerinci	Tercapainya target pendapatan daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tersedianya peraturan penganggaran daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4		4	7	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Ke-Samsatan UPTB Pengelolaan Pendapatan Dearah Kota Jambi	Tercapainya target pendapatan daerah	Pemeriksanaan Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tersedianya peraturan penganggaran daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah Tercapainya target pendapatan daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	4	2	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	29	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah	Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	4	2	5	
4	4	8		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/ kota dengan Opini WTP			Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terevaluasinya APBD Kab/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	2	5	
4	4	8	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Ranperda APBD dan Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Ranperda APBD dan Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terevaluasinya APBD Kab/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	2	2	5	
4	4	8	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Ranperda APBD dan Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Ranperda APBD dan Ranperda Perubahan APBD Kab/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terevaluasinya APBD Kab/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	2	2	5	
4	4	8	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota	terbinanya pengelolaan APBD Kab/Kota	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	terbinanya pengelolaan APBD Kab/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terevaluasinya APBD Kab/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	2	2	2	5	
4	4	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Persentase Peningkatan PAD			Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Pelayan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	2	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung	Persentase Pinglatan PAD	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji Serta Penerbitan SKPP	Persentase Pinglatan PAD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	3	2	2	5	
4	4	7	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	2	2	5	
4	4	7	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	2	2	5	
4	4	7	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	2	2	5	
4	4	7	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Persentase Administrasi Perbendaharaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	2	2	5	
4	4	7	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Kegiatan Pengelolaan Admnistrasi TUKD Belanja Langsung	Meningkatnya TUKD Belanja Langsung	Pemrosesan Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Meningkatnya TUKD Belanja Langsung	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	2	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Pengelolaan Admnistrasi TUKD Belanja Langsung	Meningkatnya TUKD Belanja Langsung	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Meningkatnya TUKD Belanja Langsung	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	2	2	5	
4	4	7	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Provinsi Jambi	Laporan DAK	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan DAK	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	2	2	5	
4	4	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Persentase Peningkatan PAD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	2	2	5	
4	4	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsai Jambi	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsai Jambi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	4	2	2	5	
4	4	7	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	12	4	2	2	5	
4	4	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah	Jumlah Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	2	2	5	
4	4	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah	Jumlah Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	2	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah	Jumlah Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kemampuan Unit Akuntansi Wilayah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	2	2	5	
4	4	7	14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Pengelolaan Akutansi Pendapatan	Persentase peningkatan PAD	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Persentase peningkatan PAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	4	2	2	5	
4	4	8		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/ kota dengan Opini WTP			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	2	2	5	
4	4	8	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kab/Kota	terbinanya pengelolaan APBD Kab/Kota	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	terbinanya pengelolaan APBD Kab/Kota	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil Audit terhadap laporan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	4	2	2	5	
4	4	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualits Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualits Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	2	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Nilai SAKIP	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualits Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	1	2	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	2	1	2	5	
4	4	6	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Nilai SAKIP	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	2	1	2	5	
4	4	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	2	5	
4	4	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat Kantor	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Surat Menyurat Kantor	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	1	2	5	
4	4	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	2	5	
4	4	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Pemindahan Tugas PNS	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	4	1	2	5	
4	4	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meniingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	2	5	

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Kepegawaian Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
4	5	21		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Olah Raga	Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional			Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG				3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	21	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional	Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	5	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Persentase data SIMPEG yang akurat			Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan Kepangkatan PNS	Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi	Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	16	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	16	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	16	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	3	5
4	5	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	15	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	3	5	
4	5	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	3	5	
4	5	15	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	3	5	
4	5	14		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	14	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	3	5
4	5	14			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian			Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																									
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE														
4	5	14	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)	Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Buku Data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan PNS Provinsi Jambi	Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik	Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat	IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian	Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3	Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi	Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional	Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka						

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	14		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian			Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG			2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	14	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS	Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	10	2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	14	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	2	3	5	

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	14		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian			Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG			3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	14	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	13		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS	Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan			Peningkatan Kapastitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG			3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	13	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
4	5	13		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS	Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan			Pembinaan ASN	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG					5	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	13	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS	Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Penegakkan Disiplin Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Pembinaan ASN	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	3	5	2	3	5
4	5	13		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS	Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	13	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian di Lingkup Pemprov Jambi Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum Kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	3	5
4	5	12			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Profesionalisasi PNS	Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3			Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS	Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test)	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Profesionalisasi PNS	Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3			Pembinaan ASN	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		5	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Pembinaan ASN	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	5	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK	Pembinaan ASN	Jumlah Laporan Kehadiran PNS Setiap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/PPPK Jumlah PNS yang Mendapat Penghargaan SLKS Jumlah Penerima Penghargaan PNS Teladan Berprestasi Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah Pemberian Pelayanan Izin Cuti PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	5	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	12		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Profesionalisasi PNS	Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3			Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG			3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Peningkatan Kapastitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	2	3	5	

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	12	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	9	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
4	5	11		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka			Pengembangan Karir ASN	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	11	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	11	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Seleksi Pejabat Administrasi	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terisi melalui seleksi terbuka/mutasi	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	10		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Penataan, Perencanaan dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi			Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG			2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	10	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK	Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	10	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan	Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	10	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Seleksi CPNS/PPPK Berbasis Sistem CAT (Computer Assited Test)	Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test)	Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	10	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Seleksi Calon Praja IPDN Secara Terbuka	Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka	Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima Tahunan dan Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	10	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak	Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak	Penyusunan Analisis Kebutuhan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test)	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah Dokumen Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/ Tenaga Kontrak Jumlah Peserta Lulus Seleksi Calon Praja IPDN secara terbuka Jumlah Peserta Lulus Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT (Computer Assisted Test) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS/PPPK Jumlah SK Mutasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala PNS Pemerintah Provinsi Jambi Jumlah SK PNS yang terselesaikan Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan Jumlah SK Penyesuaian Masa Kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	9		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Kerjasama Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan dan Kerohanian	Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional			Peningkatan Kapastitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	9	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Peningkatan Kapastitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	5	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																																		
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE																						
4	5	9	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional	Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi	Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional	Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an	Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop	Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing	Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat	IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian	Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3	Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi	Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional	Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	5	3	2	3	5
4	5	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP					Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG							2	1	3	5				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	6	59	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	2	1	3	5	
4	5	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	3	5	
4	5	6	58	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ dan LPPD BKD serta Penyusunan dan Revisi RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perencanaan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Kapastitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAAN	UNSUR PENUNJANG			3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	5	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se-Provinsi Jambi Jumlah Peserta Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional Jumlah Peserta Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an Jumlah ASN yang terfasilitasi melalui Pengembangan Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan Workshop Jumlah SK Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing Jumlah Penerbitan SK Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ KORPRI Tingkat Nasional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data SIMPEG yang akurat IKM atas Pelayanan Bidang Kepegawaian Persentase Pegawai Tamatan S2 dan S3 Persentase Peningkatan PNS yang di distribusikan dalam rangka penataan dan kebutuhan formasi Persentase Peningkatan PNS Lingkup Pemprov Jambi Penerima Penghargaan Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peringkat Prestasi Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Peringkat Prestasi Mental dan Rohani Anggota KORPRI Provinsi Jambi di Tingkat Nasional Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi daerah yang terisi melalui seleksi terbuka	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	2	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG			3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	31	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG			3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan alat tulis kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan makanan dan minuman	Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Administrasi Umum	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rentang waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rentang Waktu Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Rentang Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rentang Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Persentase pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah (Perda/Pergub,SE) bidang kepegawaian Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	3	5

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	3	5	
4	5	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	3	5	
4	5	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	4	5	
4	5	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	3	5	
4	5	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	4	5	
4	5	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	3	5	
4	5	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja % Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	4	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	3	5
4	5	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	4	5
4	5	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan alat tulis kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	3	5
4	5	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan alat tulis kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	4	5
4	5	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	3	5
4	5	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	4	5
4	5	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	3	5
4	5	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	4	5
4	5	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	4	5	
4	5	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan makanan dan minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Makanan dan Minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	3	5	
4	5	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan makanan dan minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Makanan dan Minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	4	5	
4	5	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	3	5	
4	5	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	4	5	
4	5	1	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Dokumentasi dan Publikasi	% Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja % Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	4	5	
4	5	1	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5
4	5	1	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Barang	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5
4	5	1	54	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	55	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	% Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5
4	5	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	3	5
4	5	2	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	4	5
4	5	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	3	5
4	5	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	4	5
4	5	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	4	5
4	5	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	3	5
4	5	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	4	5
4	5	2	16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penambahan/Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	4	5
4	5	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	3	5
4	5	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	4	5
4	5	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	-	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	3	5
4	5	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	4	5
4	5	2	35	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	3	5
4	5	2	35	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	4	5
4	5	2	36	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	4	5
4	5	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	3	5
4	5	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	4	5
4	5	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	3	5
4	5	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	4	5	
4	5	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	3	5	
4	5	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Aparatur Internal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	3	5	
4	5	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Aparatur Internal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	4	5	
4	5	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	3	5	
4	5	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	3	5	
4	5	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	4	5	
4	5	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	3	5	
4	5	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	4	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	1	3	5
4	5	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	1	4	5
4	5	7	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	1	4	5
4	5	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya/Workshop Pengembangan Program dan Kegiatan BPSDM	Jumlah Penyelenggaraan seminar/lokakarya/workshop pengembangan program dan kegiatan BPSDM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	4	5
4	5	20		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik			Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	4	5
4	5	20	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	2	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	20	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	2	4	5
4	5	20	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	2	4	5
4	5	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus			Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	4	5
4	5	17	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	2	4	5
4	5	17	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	4	2	2	4	5
4	5	17	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	5	2	2	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	18		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pengembangan Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren dan Teknis Inti	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	4	5
4	5	18	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	4	5
4	5	18	13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	4	5
4	5	18	14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah Penunjang	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	19		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pengembangan Kompetensi Umum dan Jabatan Fungsional	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	4	5
4	5	19	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	4	5
4	5	19	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	4	5
4	5	19	13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase peserta pengembangan kompetensi urusan pemerintahan konkuren yanglulus	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	19		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pengembangan Kompetensi Umum dan Jabatan Fungsional	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik			Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	4	5	
4	5	19	13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus jumlah peserta yang dinyatakan lulus	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	2	4	5	
4	5	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	4	5	
4	5	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	3	5	
4	5	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	4	5	
4	5	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	3	5	
4	5	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	4	5	
4	5	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja % Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	4	5
4	5	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	3	5
4	5	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan jasa kebersihan kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	4	5
4	5	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan alat tulis kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	3	5
4	5	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan alat tulis kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	4	5
4	5	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	3	5
4	5	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	4	5
4	5	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	3	5
4	5	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	3	5	
4	5	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	4	5	
4	5	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan makanan dan minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Makanan dan Minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	3	5	
4	5	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan makanan dan minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Penyediaan Makanan dan Minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	4	5	
4	5	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	3	5	
4	5	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	4	5	
4	5	1	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Dokumentasi dan Publikasi	% Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja % Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	4	5	
4	5	1	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5
4	5	1	51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Barang	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5
4	5	1	54	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	1	55	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	% Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD % Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD % Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	4	5
4	5	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	4	5
4	5	2	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	4	5
4	5	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	3	5
4	5	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	4	5
4	5	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	4	5	
4	5	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	3	5	
4	5	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	4	5	
4	5	2	16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penambahan/Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	4	5	
4	5	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak terperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	3	5	
4	5	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak terperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak terperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor terbersihkan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	4	5	
4	5	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	-	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	3	5	
4	5	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	4	5
4	5	2	35	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	3	5
4	5	2	35	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	% Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	4	5
4	5	2	36	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	4	5
4	5	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	3	5
4	5	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	Administrasi Umum	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	4	5
4	5	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	4	5
4	5	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	3	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	5	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	4	5	
4	5	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	4	5	
4	5	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Aparatur Internal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	3	5	
4	5	7	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Aparatur Internal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	4	5	
4	5	7		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	4	5	
4	5	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	3	5	
4	5	7	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	4	5	
4	5	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	3	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	5	7	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	4	5
4	5	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	1	3	5
4	5	7	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	1	4	5
4	5	7	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	1	4	5
4	5	7	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya/Workshop Pengembangan Program dan Kegiatan BPSDM	Jumlah Penyelenggaraan seminar/lokakarya/workshop pengembangan program dan kegiatan BPSDM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data manajemen layanan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	4	5

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	5	5	
4	7	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	5	5	
4	7	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	5	5	
4	7	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	5	5	
4	7	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	5	5	
4	7	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	5	5	
4	7	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	5	5	
4	7	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan penggandaan dan cetakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan penggandaan dan cetakan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	5	5	
4	7	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	5	5	
4	7	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis buku	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis buku	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	5	5	
4	7	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat/tamu	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	5	5	
4	7	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	5	5	
4	7	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	1	5	5	
4	7	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	5	5	
4	7	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor Jumlah/jenis pengadaan mebeleur	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	5	5
4	7	2	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengadaan mebeleur	Jumlah/jenis pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah/jenis pengadaan mebeleur	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	26	3	1	5	5
4	7	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	31	3	1	5	5
4	7	2	26	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	33	3	1	5	5
4	7	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	5	5
4	7	2	34	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit kantor	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	5	5
4	7	2	42	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	39	3	1	5	5
4	7	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	5	5
4	7	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	3	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	4	1	5	5
4	7	3	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	4	1	5	5
4	7	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	5	5
4	7	5	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/bintek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/bintek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	5	5
4	7	6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Sakip			Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	5	5
4	7	6	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	2	1	5	5
4	7	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	2	5	5
4	7	15	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	3	2	5	5
4	7	15	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	3	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	15	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	3	2	5	5
4	7	15	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	2	5	5
4	7	15	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	3	2	5	5
4	7	15	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	3	2	5	5
4	7	15	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	3	2	5	5
4	7	15	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RP/JMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	15	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	3	2	5	5
4	7	15	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	3	2	5	5
4	7	15	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	3	2	5	5
4	7	15	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	12	3	2	5	5
4	7	15	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	13	3	2	5	5
4	7	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	2	5	5
4	7	15	6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	2	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	2	2	5	5
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	2	2	5	5
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	2	5	5
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	2	2	5	5
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	2	2	5	5
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	2	2	5	5
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	2	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	2	2	5	5	
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	2	2	5	5	
4	7	15	21	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	2	2	5	5	
4	7	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	5	5	
4	7	15	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	5	5	
4	7	15	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	2	5	5	
4	7	15	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	1	2	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	15	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi Jumlah rakor yang dilaksanakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	6	1	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	7	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah rakor yang dilaksanakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	9	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	1	2	5	5
4	7	15	20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	11	1	2	5	5
4	7	15	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	12	1	2	5	5
4	7	15	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/Work Shop	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	13	1	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	15	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	14	1	2	5	5
4	7	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	5	5
4	7	15	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/Work Shop	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	5	5
4	7	15		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	2	5	5
4	7	15	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Kaji Terap	Penelitian Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	2	5	5
4	7	15	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Kaji Terap	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama Sience Park	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	2	5	5
4	7	15	16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	4	2	5	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	15	16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD Jumlah forum diskusi aktual Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	4	2	5	5	
4	7	15	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	2	5	5	
4	7	15	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama Sience Park	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	2	5	5	
4	7	15	19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	4	2	5	5	
4	7	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	2	5	5	
4	7	16	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi	Jumlah kerja sama	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	4	2	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	16	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi	Jumlah kerja sama	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama Sience Park	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	2	5	5	
4	7	16	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi	Jumlah kerja sama	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang mempunyai perlindungan hukum Jumlah kerja sama	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	4	2	5	5	
4	7	16	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis	Jumlah HKI yang mempunyai perlindungan hukum	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang mempunyai perlindungan hukum Jumlah kerja sama	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	4	2	5	5	
4	7	16	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif	Jumlah forum diskusi aktual	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD Jumlah forum diskusi aktual Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	4	2	5	5	
4	7	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		3	2	5	5	
4	7	16	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Sumber Daya Genetik (SDG)	Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	3	2	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	16	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Sumber Daya Genetik (SDG)	Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	3	2	5	5	
4	7	16	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Sumber Daya Genetik (SDG)	Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah buku khasanah IG/buku profil petani pelestari	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	3	2	5	5	
4	7	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	2	5	5	
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	5	5	
4	7	16	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi	Jumlah Sosialisasi/Work Shop	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/Work Shop	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	13	1	2	5	5	
4	7	16	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Rakor dan Forum Kelitbangan	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait Jumlah Sosialisasi Jumlah rakor yang dilaksanakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	8	1	2	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	7	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	1	5	5	
4	7	16	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi	Jumlah Sosialisasi/Work Shop	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi/Work Shop	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	10	4	1	5	5	
4	7	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		1	1	5	5	
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	1	1	1	5	5	
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	1	1	5	5	
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	1	1	5	5	
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	1	1	5	5	
4	7	16	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Rakor dan Forum Kelitbangan	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	1	1	5	5	
4	7	16		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan			Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		2	1	5	5	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	3	2	1	5	5
4	7	16	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan kinerja hasil litbang	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	5	2	1	5	5
4	7	17		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Science Park Persentase Peningkatan SIDA			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG		4	2	5	5
4	7	17	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Science Park di Provinsi Jambi	Science Park	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan SIDA Jumlah Laporan Kaji Terap Jumlah kerja sama Sience Park	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	2	4	2	5	5
4	7	17	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK	Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Lomba Inovasi Antar OPD Jumlah forum diskusi aktual Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang diaplikasikan SKPD	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG	4	4	2	5	5

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD
KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : Badan Penghubung Daerah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		3	1	6	5
4	1	1	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Jumlah pengiriman surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Pengiriman Uang (RTGS)	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	1	3	1	6	5
4	1	1	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Sumber Daya Telepon Jasa Sumber Daya Air Jasa Sumber Daya Listrik Jasa Sumber Daya Telekomunikasi/ Internet	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	2	3	1	6	5
4	1	1	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah Pengisian Tabung Gas	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	3	3	1	6	5
4	1	1	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentase penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis Asuransi untuk Kendaraan Jumlah Polis Asuransi untuk Bangunan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	5	3	1	6	5
4	1	1	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentase penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	6	3	1	6	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyediaan jasa adm keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	7	3	1	6	5
4	1	1	8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	8	3	1	6	5
4	1	1	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	10	3	1	6	5
4	1	1	11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	11	3	1	6	5
4	1	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	12	3	1	6	5
4	1	1	12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	14	3	1	6	5
4	1	1	15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/ Majalah dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	15	3	1	6	5
4	1	1	17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pertemuan, Jumlah Makanan, Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Mess	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	17	3	1	6	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	1	18	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	18	3	1	6	5
4	1	1		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		1	2	6	5
4	1	1	41	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	Jumlah Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum (OH)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Dokumentasi Pimpinan Daerah Jumlah Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi ASN Jumlah Makanan dan Minumanan Tamu Pimpinan Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	1	1	2	6	5
4	1	2		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		3	1	6	5
4	1	2	5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	21	3	1	6	5
4	1	2	7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	23	3	1	6	5
4	1	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	24	3	1	6	5
4	1	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	25	3	1	6	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	2	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	28	3	1	6	5
4	1	2	10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	26	3	1	6	5
4	1	2	22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase Gedung yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Jumlah Jasa Perizinan dan Administrasi	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	29	3	1	6	5
4	1	2	24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Jumlah Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	31	3	1	6	5
4	1	2	28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	35	3	1	6	5
4	1	3		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		4	1	6	5
4	1	3	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Pegawai yang terpenuhi pakaian dinasnya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	2	4	1	6	5
4	1	5		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		4	1	6	5

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	KEGIATAN INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
4	1	5	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Persentase Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kursus, Diklat, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	9	4	1	6	5
4	1	26		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitas kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		1	2	6	5
4	1	26	3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Persentase Jumlah koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan pelayanan Badan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	5	1	2	6	5
4	1	27		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Fasilitas Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan	Persentase Pemerintah Daerah, Lembaga & Ke-masyarakatan yang difasilitasi pertahun			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		1	2	6	5
4	1	27	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Sarasehan masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Sarasehan yang difasilitasi	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Sarasehan masyarakat Jambi di Jakarta	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	2	1	2	6	5
4	1	28		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah daerah	Persentase kabupaten/kota dalam provinsi Jambi yang difasilitasi di TMII			Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG		1	2	6	5
4	1	28	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi	Jumlah Promosi	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	3	1	2	6	5
4	1	28	1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi	Jumlah Promosi	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		PENGHUBUNG	UNSUR PENUNJANG	4	1	2	6	5